



Press
WIDYA GAMA

Kemiskinan Wilayah Pantura dan Pansela

Pendekatan Spasial

Dr. Khoirul Ifa, S.E., M.SE

Dr. Dra. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.

Dr. Edy Santoso S.E., M.Sc.

Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si.



Dr. Khoirul Ifa, S.E.,M.SE.
Dr. Dra. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes.
Dr. Edy Santoso, S.E, M.sc.
Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E, M.Si.

Kemiskinan Wilayah Pantura dan Pansela

Pendekatan Spasial



**KEMISKINAN WILAYAH PANTURA DAN PANSELA:
PENDEKATAN SPASIAL**

© 2025, Dr. Khoirul Ifa, S.E.,M.SE,

Cetakan Pertama, Maret 2025

ISBN: 978-623-8073-08-5

x + 174 hlm; 15,5 x 23 cm

Penulis: Dr. Khoirul Ifa, S.E.,M.SE,
Dr. Dra. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes,
Dr. Edy Santoso, S.E, M.sc,
Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E, M.SiS.

Desain Sampul: Widya Gama Press

Tata Letak Isi: Widya Gama Press

Diterbitkan Oleh:



WIDYA GAMA PRESS

ANGGOTA ASOSIASI PENERBIT PERGURUAN TINGGI
INDONESIA (APPTI)

Office:

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Jl. Gatot Subroto No. 4, Karangsari, Kec. Sukodono,

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Telp. (0334) 881924

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun
2014. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Kemiskinan Wilayah Pantura dan Pansela: Pendekatan Spasial" ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari keinginan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Provinsi Jawa Timur.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun geografis. Melalui buku ini, kami berupaya menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor spasial turut berkontribusi terhadap penyebaran dan dinamika kemiskinan di dua wilayah pesisir yang memiliki karakteristik berbeda. Dengan menggunakan pendekatan spasial, kami mencoba untuk menyoroti pentingnya distribusi geografis, aksesibilitas, serta keterkaitan antarwilayah dalam memahami kemiskinan secara lebih luas.

Buku ini tidak hanya berisi teori dan konsep kemiskinan spasial, tetapi juga dilengkapi dengan data empiris yang relevan, hasil kajian mendalam, serta peta distribusi kemiskinan dan variabel-variabel lainnya. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti, serta para pengambil kebijakan yang ingin menggali solusi lebih efektif dalam menangani kemiskinan, khususnya di wilayah pesisir Indonesia. Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi, baik berupa saran, masukan, maupun data yang sangat berharga dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan membuka wawasan baru bagi para pembaca dalam memahami kemiskinan dari perspektif spasial, serta mendorong langkah-langkah nyata dalam mengatasi permasalahan ini.

Lumajang, 24 September 2024

Penulis

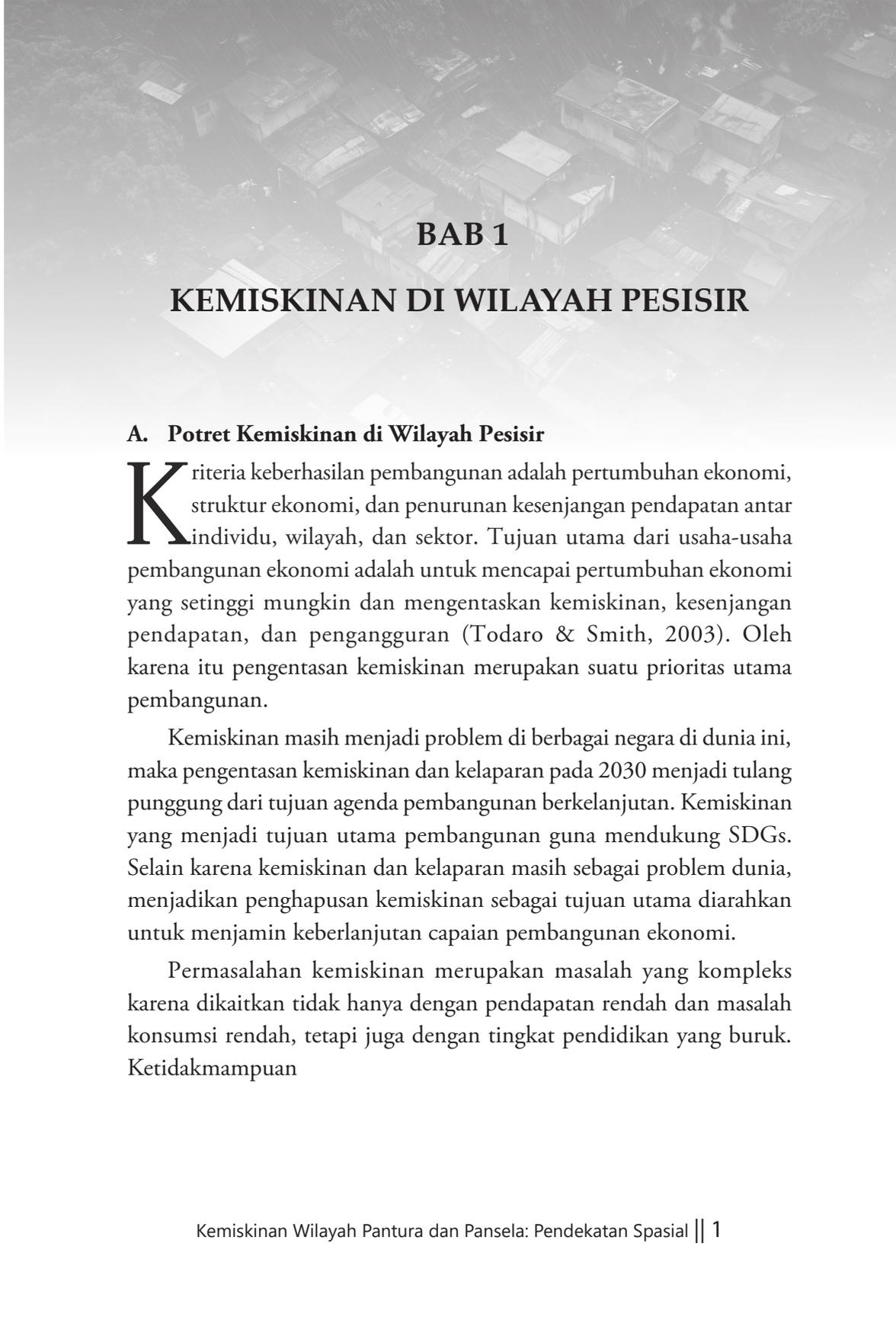
DAFTAR ISI

PRAKATA	
DAFTAR ISI.....	
BAB 1 - KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR.....	1
A. Potret Kemiskinan di Wilayah Pesisir.....	1
B. Faktor Utama Kemiskinan	7
BAB 2 - MENGURAI AKAR KEMISKINAN	16
A. Teori Kemiskinan	16
B. Teori Kemiskinan Spasial.....	19
C. Faktor-Faktor Kemiskinan	20
D. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan	22
E. Hubungan Pendidikan Dengan Kemiskinan.....	24
F. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan.....	25
G. Hubungan Sumber Daya Alam Dengan Kemiskinan	27
H. Hubungan Kesehatan Dengan Kemiskinan.....	31
I. Hubungan antara Aksesibilitas Dengan Kemiskinan	32
J. Kajian Empiris tentang Kemiskinan	33
BAB 3 - KONSEP KEMISKINAN SPASIAL.....	58
A. Sitensis Kajian.....	58
B. Konseptualisasi.....	65

C. Pengembangan Hipotesis	67
1. Dependensi Spasial Kemiskinan	67
2. Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	68
3. Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	69
4. Pengangguran Terhadap Kemiskinan	70
5. Sumber Daya Alam Terhadap Kemiskinan.....	71
6. Kesehatan Terhadap Kemiskinan	73
7. Aksesibilitas Terhadap Kemiskinan	75

BAB 4 - DISTRIBUSI SPASIAL KEMISKINAN DAN DETERMINAN KEMISKINAN WILAYAH PANTAI UTARA DAN SELATAN.....	77
A. Gambaran Geografis	77
B. Potret Kemiskinan dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur.....	79
C. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur...	87
D. Pendidikan dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur	94
E. Pengangguran dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur.....	99
F. Sumber Daya Alam dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur...	107
G. Kesehatan dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur.....	114
H. Aksesibilitas Wilayah dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur...	120

BAB 5 - ASPEK SPASIAL DAN NON SPASIAL KEMISKINAN DI WILAYAH PANTAI UTARA DAN SELATAN	130
A. Pengaruh Aspek Spasial Kemiskinan	130
B. Pengaruh Aspek Non Spasial Kemiskinan	135
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela.....	135
2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela.....	138
3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela.....	141
4. Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela	142
5. Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela.....	145
6. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela.....	147
 BAB 6 - PENUTUP	 149
DAFTAR PUSTAKA.....	155
INDEKS.....	168
BIOGRAFI PENULIS.....	171



BAB 1

KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR

A. Potret Kemiskinan di Wilayah Pesisir

Kriteria keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan penurunan kesenjangan pendapatan antar individu, wilayah, dan sektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi mungkin dan mengentaskan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran (Todaro & Smith, 2003). Oleh karena itu pengentasan kemiskinan merupakan suatu prioritas utama pembangunan.

Kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka pengentasan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 menjadi tulang punggung dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama pembangunan guna mendukung SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena dikaitkan tidak hanya dengan pendapatan rendah dan masalah konsumsi rendah, tetapi juga dengan tingkat pendidikan yang buruk. Ketidakmampuan

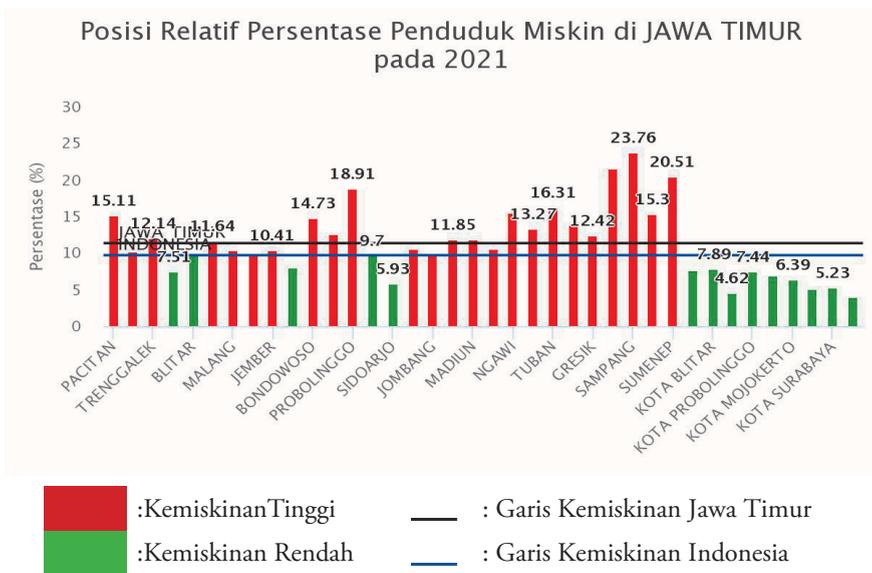
untuk berpartisipasi dalam kesehatan dan pembangunan, dan berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Aspek kemiskinan ini diwujudkan dalam makanan, air, perumahan yang sehat, perawatan medis yang buruk, dan kurangnya pendidikan. Kemiskinan dapat digunakan sebagai indeks untuk mengevaluasi hasil pembangunan daerah. Indeks ini dapat menunjukkan angka kemiskinan di setiap daerah. Istilah kemiskinan mengacu pada individu yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dijelaskan bahwa setiap provinsi dan kabupaten atau kota wajib membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tim ini mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Maka masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk mengatur program penanggulangan kemiskinan, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur. Hal ini diperkuat pula dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2024. Jawa timur kemudian berhasil tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi secara nasional (Shofihara, 2022).

Provinsi Jawa Timur juga merupakan salah satu Provinsi yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat sebesar 0,14 persen (q-to-q) pada Triwulan IV-2021, menunjukkan bahwa Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan ekonomi yang cukup baik. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,62% dalam produksi, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,61% dalam pengeluaran (BPS, 2021). Walaupun pertumbuhan ekonominya positif hal ini tidak menjadi satu-satunya patokan bahwa Provinsi Jawa Timur

tidak memiliki permasalahan ekonomi, Jawa Timur menjadi Provinsi terbanyak penyumbang penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi (Bourguignon & Chakravarty, 2003) yang menentukan garis kemiskinan untuk setiap dimensi kemiskinan dan untuk mempertimbangkan bahwa seseorang miskin berada dibawah garis kemiskinan atau tidak.

Berikut merupakan data kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Gambar 1 menunjukkan bahwa, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan TNP2K Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menyumbang 16,59% dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ini lebih besar daripada persentase kemiskinan nasional, yang hanya 10,14%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Timur.



Gambar 1. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), TNP2K (2021)

Pada Gambar 1 di atas juga dapat dijelaskan persentase kemiskinan terbesar terletak pada Kabupaten Sampang, Sumenep dan Probolinggo masing-masing mencapai 23,16 persen, 20,51 persen, dan 18,91 persen sedangkan persentase kemiskinan terendah terletak di Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Sidoarjo masing-masing mencapai 4,00 persen, 4,62 persen, 5,23 persen dan 5,93 persen. Adanya perbedaan tingkat dan derajat tingkat kemiskinan di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur akan berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah artinya disparitas antar daerah akan semakin melebar.

Menurut Shindo (2010) disparitas wilayah disebabkan oleh besarnya perbedaan produktivitas antar daerah, kesenjangan pertumbuhan yang semakin melebar dengan adanya reformasi kebijakan. Perbedaan tersebut berimplikasi pada kemampuan suatu wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong perbedaan proses pembangunan, sehingga akan menciptakan wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2014:107). Disparitas wilayah juga terlihat pada wilayah pantai selatan dan pantai utara Jawa Timur, dalam pidato Gubernur Jawa Timur dalam Webinar Nasional “Konektivitas Prasarana Jalan Untuk Kesejahteraan Bangsa” menuturkan bahwa terdapat isu kesenjangan yaitu adanya disparitas daerah di wilayah utara dan selatan di Provinsi Jawa Timur, infrastruktur di daerah selatan masih relatif terbatas terutama pada keberadaan aksesibilitas, serta potensi ekonomi di wilayah Selatan Jawa Timur cukup besar dan beragam, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Mulyono, 2020)

Kondisi disparitas wilayah ini juga diperkuat dengan kondisi pembangunan jalur lintas utara yang lebih didahulukan dibandingkan jalur lintas selatan di Provinsi Jawa Timur. Salah satu upaya pemerintah untuk menangani disparitas wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan Jawa Timur adalah pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dimulai sejak tahun 2002 dan melewati delapan kabupaten/kota yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. dan Blitar,

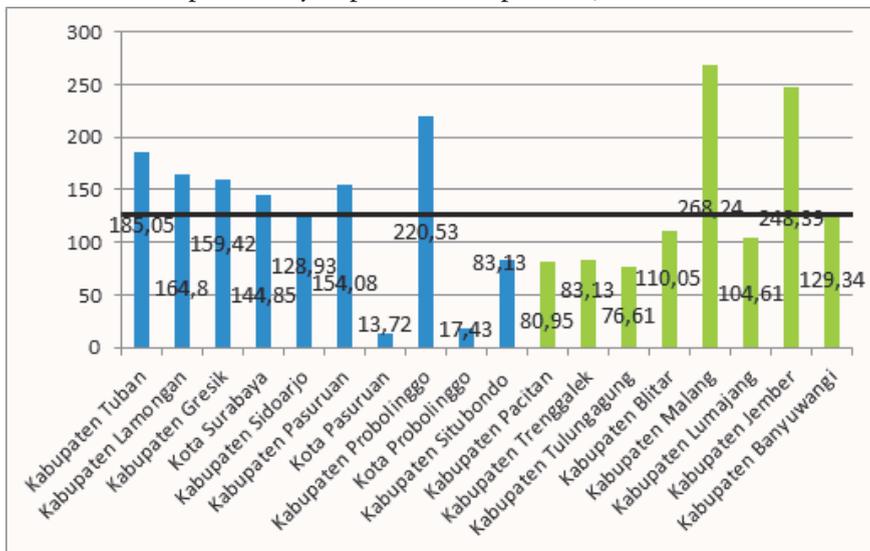
Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi (Hamid, 2014). Tujuan utama dibangunnya JLS adalah untuk mempercepat distribusi logistik guna mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan meningkatkan investasi di wilayah selatan Jawa Timur.

Wilayah pantai utara yang selanjutnya di singkat pantura terdiri dari 10 Kabupaten Kota yaitu terdiri dari Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo sedangkan wilayah pantai selatan yang selanjutnya di singkat pansela terdiri dari 8 Kabupaten yaitu : Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi (jatimprov.go.id).

Kondisi disparitas wilayah ini tentunya akan berdampak pada masing-masing daerah, daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi akan semakin maju dan daerah yang kurang maju akan semakin tertinggal. Secara struktur ekonomi wilayah pantura cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dan berkembang pesat daripada wilayah pansela. Pantura berada di sepanjang pantai utara Jawa Timur dan memiliki akses ke pelabuhan laut utama. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang merupakan pusat perdagangan dan ekonomi adalah salah satunya. Sebaliknya, Pansela bergantung pada bisnis konvensional seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu, terdapat perbedaan terkait aksesibilitas dan Infrastruktur, pansela mungkin menghadapi tantangan aksesibilitas dan infrastruktur yang lebih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Namun, karena terhubung dengan jaringan transportasi utama seperti jalan tol dan pelabuhan laut utama, pantura memiliki aksesibilitas yang lebih baik terhadap pusat-pusat ekonomi dan lapangan kerja.

Wilayah Pantura dan Pansela memiliki perbedaan terkait aksesibilitas dan infrastruktur serta ketergantungan pada sumber daya alam, pansela lebih bergantung pada sumber daya alam tertentu seperti

pertanian, perikanan, atau pertambangan, pantura lebih berkembang dalam bidang seperti perdagangan, manufaktur, pariwisata, dan jasa. Akhirnya, stabilitas ekonomi dan kerentanan terhadap perubahan harga komoditas dapat dipengaruhi oleh ketergantungan yang berbeda ini. Sesuai dengan teori jebakan sumber daya alam menurut Richard M. Auty (1995) berpendapat bahwa perkembangan pertama dari hipotesis kutukan sumber daya menunjukkan korelasi negatif antara kelimpahan sumber daya alam dan efisiensi ekonomi, negara-negara bergantung pada sumber daya alam, cenderung mengembangkan industri yang menguntungkan tetapi menghadapi masalah dalam pemulihan ekonomi. Negara yang kaya sumber daya alam justru merupakan Negara yang lambat dalam mengembangkan perekonomian di wilayahnya sehingga akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan. Hal ini terlihat pada wilayah pantura dan pansela Jawa Timur berikut ini:



■ : Kemiskinan pantura — : Rata-rata kemiskinan pantura
 ■ : Kemiskinan pansela — : Rata-rata kemiskinan pansela

Gambar 2. Rata-Rata Penduduk Miskin Wilayah Pantura dan Pansela Tahun 2017-2021 (Ribuan Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2 penduduk miskin di wilayah pantura rata-rata pada tahun 2017-2021 terlihat kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Tuban, masing-masing sebesar 220,53 ribu jiwa dan 185,05 ribu jiwa. Sedangkan data jumlah penduduk miskin pansela rata-rata pada tahun 2017-2021 terlihat kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember masing-masing sebesar 268,24 ribu jiwa dan 248,39 ribu jiwa. Hal tersebut juga terlihat di wilayah pantai utara rata-rata jumlah kemiskinan tahun 2017-2021 mencapai 127,19 ribu jiwa sedangkan wilayah pantai selatan lebih besar rata-rata jumlah kemiskinan tahun 2017-2021 yakni sebesar 137,67 ribu jiwa.

B. Faktor Utama Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh permasalahan individu dan struktural. Jika dilihat semakin tingginya angka kemiskinan di wilayah pantura dan pansela menandakan kemiskinan lebih disebabkan karena permasalahan struktur, adanya perbedaan struktur ekonomi, sosial menjadi penyebab adanya kemiskinan, seperti halnya yang dikemukakan J.M. Keynes (1936), bahwa adanya perbedaan struktur menyebabkan lemahnya aktivitas sosial ekonomi, teori ini didasarkan dengan adanya depresi ekonomi pada tahun 1920.

Fenomena kemiskinan selama ini hanya berfokus pada faktor sosial ekonomi dan mengabaikan faktor yang berkaitan dengan keruangan atau spasial. Kajian kemiskinan spasial juga dapat mengungkap faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Variabel fisik/alam dan variabel sosial digunakan sebagai variabel, karena kemiskinan secara fungsional terkait dengan berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, politik, teknologi, aksesibilitas wilayah, demografis, geofisika dan iklim-botani regional (Nugroho, T., Wahyono, E. B., & Bimasena, A. N, 2011).

Selain itu selama ini faktor kemiskinan selalu berfokus pada metode regresi linier dan mengabaikan aspek spasial (Ali, Partridge, & Olfert, 2007). Hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat memiliki

hubungan yang sama untuk semua lokasi penelitian didalam regresi linier global. Menurut Brunsdon, Fotheringham, & Charlton (1998); Fotheringham, Brunsdon, & Charlton (2003); Saefuddin, Setiabudi, & Achسانی (2011) adanya hubungan yang sama dalam regresi linear global memberikan informasi yang realibel pada masing-masing wilayah lokal jika terjadi keragaman antar wilayah lokalnya. Pada kenyataannya Provinsi Jawa Timur khususnya wilayah pantura dan pansela memiliki kondisi wilayah berbeda, adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur bahkan pendapatannya pun berbeda pada masing-masing wilayah. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sebagai arah penerapan kebijakan pengurangan kemiskinan dapat memperhatikan karakteristik dan keberagaman masing-masing wilayah, hal ini sesuai dengan teori Marshall mengatakan bahwa hal-hal yang memiliki karakteristik yang sama akan menunjukkan efek spasial, karena mereka memiliki tujuan yang sama seperti halnya kemiskinan, masing-masing daerah yang memiliki karakteristik sama akan menunjukkan efek spasial karena saling berdekatan dan saling mempengaruhi.

Pembangunan tidak hanya mempunyai dimensi sosial saja namun juga spasial. Bagi Hirschman (1958) pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah belakangnya melalui efek polarisasi (*polarization effect*) dan efek tetesan kebawah (*trickling downeffect*). Polarisasi efek tersebut diperkuat dengan adanya pemusatan investasi pada pusat pertumbuhan, sedangkan *trickling downeffect* dapat tumbuh dengan cara meningkatkan daya tarik wilayah sekitarnya.

Rustiadi (2018) berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa program pembangunan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan unsur spasial atau lokasi sehingga kegagalan program ataupun kebijakan dapat diminimalisir. Selain pola spasial, yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan aset dan ketersediaan sarana prasarana pendukung dan kualitas sumberdaya manusia. Studi yang dilakukan oleh Cahyadi,

Wibisono, Syamsulhakim, & Setiawan (2020) menemukan bahwa kemiskinan di tingkat kecamatan di Indonesia bersifat klaster dan terdapat klaster kemiskinan yang kuat. Setiap klaster memiliki geografis yang berbeda, oleh karena itu, tingkat lokal analisis spasial diperlukan untuk menentukan karakteristik geografis tertentu yang terkait dengan kemiskinan.

Penelitian yang memotret kemiskinan dari sisi spasial telah dilakukan oleh Dambudzo (2015), dimana menggunakan variabel pendapatan, pengeluaran dan aspek sosial ekonomi dan demografi rumah tangga, yang meliputi akses pendidikan, karakteristik demografi, tingkat lapangan kerja, layanan kesehatan, perumahan, *victimization* dan indikator kemiskinan. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Akinyemi & Bigirimana (2012) yang mengukur kemiskinan spasial dari empat indikator kemiskinan yaitu pengeluaran, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan, dalam temuannya menunjukkan pola kemiskinan dan adanya dikotomi kota-desa.

Higgins, Bird, & Harris (2010) berpendapat bahwa dimensi spasial kemiskinan menjadi wacana bagi pembuat kebijakan, dalam hal meninjau bagaimana dimensi spasial dari fitur kemiskinan dan sebagai serangkaian wacana kebijakan pembangunan untuk mengatasi perangkap kemiskinan. Maka penting sekali penelitian ini dilakukan untuk merekomendasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dari sisi spasial. Okwi et al (2007) juga menjelaskan faktor spasial dapat menjelaskan tingkat kesejahteraan di berbagai daerah yang pada akhirnya menunjukkan kebijakan yang tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan.

Di sebagian besar negara, kemiskinan secara geografis terkonsentrasi di beberapa wilayah, faktor-faktor geografis yang berbeda dan pengaruhnya terhadap kemiskinan tingkat desa dapat membantu menjelaskan pola spasial ini dan memberikan implikasi praktis untuk desain skema intervensi dan cara untuk mengentaskan kemiskinan (M. Liu et al., 2021) (Gamboa, Barona, & Estrella, 2021), yang pada akhirnya melahirkan kebijakan yang cocok untuk masing-masing daerah dalam mengentaskan

kemiskinan. Penelitian yang dikemukakan oleh Liu, M., Ge, Y., Hu, S., & Hao, H. (2023) menemukan bahwa kemiskinan di beberapa daerah di Provinsi Hubei, Tiongkok menunjukkan ketergantungan spasial yang signifikan pada berbagai skala, dengan tingkat spasial yang lebih tinggi.

Booth (1998) berpendapat bahwa ada lima faktor penyebab kemiskinan. Kelima faktor tersebut yang *pertama* faktor ekonomi yang terdiri dari kurangnya modal dan rendahnya teknologi. *kedua* adalah faktor sosial budaya yang terdiri dari keterampilan dan pendidikan yang rendah, lapangan kerja yang terbatas dan adanya budaya yang buruk. Faktor *ketiga* adalah geografi dan lingkungan yang terdiri dari isolasi wilayah, jumlah penyakit dan sterilitas lahan. Faktor *keempat* adalah personal dan fisik, yang terdiri dari usia, jenis kelamin dan kesehatan individu. Faktor *kelima* adalah keterbatasan akses terhadap banyak hal seperti produk pasar, fasilitas publik dan fasilitas kredit.

Faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa riset membuktikan adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Adams Jr (2004), Adeleye et al (2020), Fosu (2017), Perera & Lee (2013), Wan, Hu, & Liu (2021) menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Permadi (2018) mengungkapkan bahwa di antara sektor manufaktur, pertanian, dan jasa; manufakturlah yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Marrero & Servén (2021) menyatakan pengaruh antara pertumbuhan dengan kemiskinan bersifat negatif. Hassan, Zaman, & Gul (2015) menyatakan dalam jangka panjang ada hubungan positif antara PDB dengan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Beberapa peneliti lain mempunyai hasil yang berbeda, Dollar, Kleineberg, & Kraay (2016) menyebutkan tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. J. Chen, Wang, Wen, Fang, & Song (2016) berpendapat pertumbuhan ekonomi tidak dapat memecahkan masalah kemiskinan di pedesaan.

Faktor lain seperti faktor sosial budaya juga berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, hal tersebut tercermin dari tingkat pendidikan yang rendah dan pengangguran. Pendidikan memiliki peran penting dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Seperti yang dikemukakan oleh D. E. Bloom, Canning, & Chan (2006) yang berpendapat bahwa pendidikan secara luas diakui memainkan peran utama melalui pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu dikembangkan. Ini karena pendidikan dapat meningkatkan Kesejahteraan dan pengurangan terhadap kemiskinan. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, melalui pendidikan juga kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan sangat tinggi bahkan didunia kerja sekalipun. Oleh karena itu, pendidikan dapat dianggap sebagai investasi pembangunan dan hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sebagai pengembangan dari bidang lain, pendidikan adalah salah satu bidang utama setelah kesehatan dan ekonomi. Sejalan dengan Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe (2014) yang mengungkapkan pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, hal serupa dikemukakan oleh K.M. Chen & Wang (2015), Mai & Mahadevan (2016), Bici (2017) mengatakan bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan melalui perbaikan sumberdaya manusianya (*human capital*).

Hofmarcher (2021) menyatakan efek pengurangan kemiskinan yang besar secara ekonomi dari pendidikan. Hal ini berlaku untuk beberapa ukuran kemiskinan objektif, yang bersifat absolut dan relatif, dan ukuran kemiskinan subjektif. Garza-Rodrigue, et al. (2021), Tilak (2007) menyatakan salahsatu menurunnya rumah tangga miskin disebabkan oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah dasar, lebih lanjut Mohanty & Swain (2019) menyatakan tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan salahsatu penentu utama kemiskinan. Setiap masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah meningkatkan kemungkinan menjadi miskin. Peng et al. (2019), D. E. Bloom et al. (2006) berpendapat berinventasi dalam pendidikan tersier

dapat mempercepat difusi teknologi, yang akan mengurangi kesenjangan pengetahuan dan membantu mengurangi kemiskinan di suatu wilayah.

Beberapa penelitian lain menyebutkan hal yang berbeda Suripto & Subayil (2020) menyatakan tidak ada pengaruh antara tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan. Zhang (2014), Barham, et al. (1995) menjelaskan kemungkinan besar keluarga berpenghasilan rendah dan menengah dengan orang tua berpendidikan lebih baik yang memutuskan untuk melakukan investasi yang tidak terjangkau, mengharapkan manfaat jangka panjang dari pendidikan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan menengah ditemukan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, namun biaya pendidikan yang tinggi telah menciptakan beban yang jauh lebih tinggi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah yang akhirnya secara tak terduga terperangkap dalam jebakan kemiskinan pendidikan baru. Lebih lanjut Bonal (2007) menjelaskan tidak ada hubungan tingkat pendidikan seseorang terhadap pengentasan kemiskinan karena adanya keterbatasan reformasi kelembagaan pendidikan dalam hal mencapai keberhasilan pendidikan.

Selain pendidikan, peran pengangguran menjadi point penting dalam mengurangi kemiskinan. Ada pengaruh yang meningkat secara signifikan terhadap kemiskinan dari waktu ke waktu, terutama yang diprosisikan menggunakan jumlah pengangguran (M. Liu, Ge, Hu, Stein, & Ren, 2022) (Ucha, 2010) (Xue & Zhong, 2003), karena diyakini seseorang yang mempunyai pekerjaan akan mampu menurunkan resiko kemiskinan (Mosley & Miller, 2004) (Faridi, Chaudhry, Farooq, & Arif, 2016). Pengangguran juga diyakini tidak hanya menyebabkan kemiskinan namun juga menyebabkan ketidakamanan (John & Morufu, 2013). Saunders (2002) berpendapat bahwa pengangguran meningkatkan risiko kemiskinan dan berkontribusi pada ketidaksetaraan, dan hal itu juga menimbulkan serangkaian efek sosial yang melemahkan para penganggur itu sendiri, keluarga mereka, dan komunitas tempat mereka tinggal. Namun berbeda dengan pernyataan Quy (2016) yang justru menyatakan pengangguran memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemiskinan yaitu faktor geografi dan lingkungan. Dalam hal ini faktor geografi dan lingkungan biasanya dikaitkan dengan sumber daya alam, faktor lingkungan dimana terdapat hubungan antara tujuan utama pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan manusia, dan lingkungan alam (Schleicher et al., 2018) (Gray & Moseley, 2005). Lebih lanjut Malerba (2020) menyebutkan terdapat korelasi antara faktor lingkungan dengan kejadian kemiskinan.

Sumber daya alam merupakan salah satu faktor alamiah yang penting karena daerah yang memiliki tanah yang subur dan produktif tentunya akan meningkatkan perekonomian termasuk hasil-hasil pertanian. Birungi, Okwi, & Isoke (2005) X. Chen et al. (2015) menyatakan pentingnya lahan basah dan lahan pertanian di beberapa kecamatan tanpa keduanya maka daerah akan menjadi miskin. Selanjutnya Ge, Ren, & Fu (2021) juga berpendapat bahwa persentase irigasi pada lahan subur merupakan faktor dominan yang menjelaskan pola spasial kemiskinan. Lebih lanjut Kassa, Teferi, & Delelegn (2021) menyatakan hilangnya potensi dan lahan pertanian yang ada akibat kekeringan, banjir, dan degradasi lahan mempengaruhi sebagian besar kemiskinan. Lebih lanjut Zhou & Xiong (2018), Gao, et al. (2020) menyebutkan kondisi alam yang kompleks memiliki efek pendorong positif pada distribusi spasial kabupaten yang dilanda kemiskinan.

Faktor kemiskinan keempat menurut Booth (1998) adalah faktor personal dan fisik, faktor personal dan fisik biasanya terkait dengan faktor kesehatan, kesehatan juga dapat menjadi peluang dalam pengurangan tingkat kemiskinan, hal ini disampaikan oleh Gupta & Mitra (2004) yang menyatakan pengeluaran kesehatan per kapita jelas dan positif mempengaruhi status kesehatan dan hasilnya tampak menunjukkan bahwa kemiskinan menurun sebagai respons terhadap peningkatan status kesehatan. Sejalan dengan D. Bloom & Canning (2003) yang berpendapat bahwa terdapat pengaruh besar peningkatan kesehatan terhadap pendapatan rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi dan menjadikannya alat penting untuk pengurangan kemiskinan.

Buddelmeyer & Cai (2009), Gounder & Xing (2012) menyebutkan ada hubungan 2 arah antara kesehatan dengan kemiskinan, secara khusus ditemukan bahwa keluarga yang dikepalai oleh orang yang sakit lebih banyak cenderung berada dalam kemiskinan dibandingkan dengan keluarga yang dikepalai oleh orang yang sehat. Di sisi lain, kepala keluarga yang keluarganya berada dalam kemiskinan pada tahun berjalan lebih mungkin untuk mengalami sakit pada tahun berikutnya dibandingkan dengan kepala keluarga yang keluarganya tidak miskin. Grant (2005) juga berpendapat orang-orang termiskin sebagian besar hampir selalu mengalami morbiditas yang lebih tinggi, rata-rata meninggal lebih muda dan mengalami tingkat kematian ibu dan anak yang lebih tinggi, hal ini mencerminkan pada tahun-tahun berikutnya kemiskinan akan lebih parah karena terkait masalah kesehatan jangka Panjang. Senada dengan Novignon, Mussa, & Chiwaula (2012) yang menyatakan bahwa status kesehatan mempengaruhi kerentanan terhadap kemiskinan karena kemungkinan terjadinya penyakit dimasa mendatang akan berkurang untuk rumah tangga. Weziak-Bialowolska (2016), W. Liu, Li, & Zhao (2020) juga berpendapat kesehatan memiliki hubungan erat terhadap kemiskinan, sama seperti Szwarcwald, et al. (2000) yang menyatakan kondisi kesehatan yang buruk terkonsentrasi di wilayah penduduk yang kumuh, dalam hal ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun hal ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Gragnolati & Marini (2003) status kesehatan tidak berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

Menurut Booth (1998) faktor kemiskinan juga berasal dari keterbatasan akses. Pengaruh aksesibilitas terhadap heterogenitas stratifikasi spasial kemiskinan cukup signifikan, di antaranya aksesibilitas ekonomi, aksesibilitas pasar, dan aksesibilitas lalu lintas merupakan faktor pendorong utama (Liang, Li, Zeng, & Wu, 2022). Lebih lanjut Martens & Bastiaanssen (2019), Sugasawa (2019) berpendapat daerah perkotaan berkontribusi besar terhadap kemiskinan yang disebabkan aksesibilitas. Temuan menarik juga dikemukakan oleh Ahlström, Pilesjö, & Lindberg (2011), Edith, Jaffu, & John (2011), Minot, Baulch, &

Epprecht (2006), Pozzi, Robinson, & Nelson (2009) bahwa rumah tangga dengan perkiraan aksesibilitas tinggi ke pasar tampaknya miskin daripada rumah tangga dengan aksesibilitas tinggi ke kota. Disamping itu aksesibilitas terhadap layanan infrastruktur seperti jalan menunjukkan semakin jauh seseorang mengakses layanan infrastruktur maka semakin tinggi tingkat kemiskinan (Amaliah & Ulimaz, 2021) (Cahyadi et al., 2020).

Bagaimanapun, fenomena garis kemiskinan sangat membantu menarik perhatian pemerintah dan masyarakat untuk memahami kondisi kehidupan masyarakat miskin yang sebenarnya. Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai pendekatan untuk mengukur kemakmuran suatu daerah Ravallion (1998). Memahami tentang pengertian kemiskinan, Analisis dimulai dengan determinan penyebab kemiskinan dan aspek spasial kemiskinan (Bourguignon, 2003). Aspek kemiskinan secara garis besar dapat dibagi menjadi lima kategori: faktor ekonomi, faktor sosial budaya, geografi dan lingkungan, personal dan fisik dan keterbatasan akses (Booth, 1998). Lebih lanjut, kajian pada buku ini akan mengulas kemiskinan dari sisi spasial dan mengkombinasi dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan dari berbagai faktor, seperti sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, personal dan fisik serta faktor aksesibilitas.

BAB 2

MENGURAI AKAR KEMISKINAN

A. Teori Kemiskinan

Ada dua paradigma atau *grand theory* terkait dengan kemiskinan: yaitu paradigma neoliberal dan sosial demokrat, yang kemudian menjadi dasar analisis kemiskinan, penyebab maupun perumusan pengambilan kebijakan dan program anti kemiskinan.

Tabel 1. Teori Neo Liberal dan Demokrasi-Sosial tentang Kemiskinan

	Neo-Liberal	Demokrasi-Sosial
Landasan Teoritis	Individual	Struktural
Konsep dan Indikator Kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab Kemiskinan	Kelemahan dan pilihan-pilihan individu; lemahnya pengaturan pendapatan; lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh)	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; ketidakadilan sosial

Strategi Penanggulangan Kemiskinan	Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif. Memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat	Penyaluran pendapatan dasar secara universal. Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi Negara dan kebijakan sosial
Prinsip	Residual, dukungan yang saling menguntungkan (mutual aid)	Institusional, redistribusi pendapatan vertikal dan horizontal, aksi kolektif

Sumber: dikembangkan dari Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:170)

Dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi sosial. Teori demokrasi sosial tidak melihat kemiskinan sebagai masalah individu tetapi melihat kemiskinan sebagai permasalahan struktural. Kemiskinan adalah karena keberadaan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat karena terbatasnya akses beberapa kelompok terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan sosial. Teori ini didasarkan pada prinsip ekonomi campuran yang muncul melalui gaya Keynesian sebagai tanggapan terhadap depresi ekonomi pada 1920-an dan awal 1930-an.

Bagi Keynes (1936) kemiskinan disebabkan oleh struktur tatanan sosial ekonomi yang lebih besar, Abdulai dan Shirmshiry (2014) mereka yang percaya pada teori ini mengaitkan sumber kemiskinan dengan ekonomi, politik, dan sistem sosial yang menyebabkan orang memiliki kesempatan dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai pendapatan dan kesejahteraan (Bradshaw, 2006). Pandangan yang sama diungkapkan oleh Samati et, al. (2012) yang berpendapat lebih besar struktur ekonomi dan sosial merupakan penyebab kemiskinan. Mereka berpendapat bahwa kapitalisme menciptakan kondisi yang mendorong kemiskinan, terlepas dari upaya individu (kerja keras, keterampilan dan

kompetensi), struktur beberapa ekonomi, misalnya ekonomi Amerika Serikat memastikan bahwa jutaan orang menjadi miskin. Dengan kata lain sejumlah besar literatur menunjukkan bahwa walaupun sistem ekonomi disusun sedemikian rupa, mereka tidak lepas dari kemiskinan dan tertinggal terlepas dari seberapa kompeten mereka (Bradshaw, 2006).

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (Suryawati, 2005) :

- a. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Kemiskinan memiliki empat jenis berdasarkan kondisi yang dianggap sebagai masalah multidimensional. Keempat jenis ini adalah (Suryawati, 2005):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan juga didefinisikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi untuk kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Teori kemiskinan absolut ini paling sering digunakan untuk menentukan atau mendefinisikan syarat seseorang atau kelompok orang yang dianggap miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah jenis kemiskinan di mana kebijakan pembangunan tidak menjangkau seluruh masyarakat, menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan atau standar kesejahteraan. Istilah

“daerah tertinggal” digunakan untuk menggambarkan wilayah yang tidak dapat diakses oleh program pembangunan seperti ini.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang berasal dari budaya atau adat istiadat yang tidak mau memperbaiki taraf hidup mereka dengan cara moderen. Sikap dan kebiasaan seperti itu dapat termasuk malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan terlalu bergantung pada orang lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya. Ini biasanya terjadi dalam tatanan sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan dan terkadang mengandung elemen diskriminatif.

B. Teori Kemiskinan Spasial

Menurut Bradshaw (2006) ada tiga perspektif dari teori ini. Satu perspektif teoritis tentang konsentrasi spasial kemiskinan berasal dari teori aglomerasi ekonomi, yang kedua dari teori tempat sentral, dan ketiga teori migrasi keluar selektif. Dalam penelitian ini menggunakan teori aglomerasi ekonomi yakni menjelaskan seberapa kedekatan atau konsentrasi perusahaan serupa menarik layanan dan pasar yang mendukung, yang selanjutnya menarik lebih banyak perusahaan. Sebaliknya, di mana ada kemiskinan dan kondisi kemiskinan justru menghasilkan lebih banyak kemiskinan didaerah sekitarnya atau yang berdekatan.

Teori Aglomerasi muncul berasal dari sebuah ide Alfred Marshall (1920) tentang *Agglomeration Economies* yang juga dikenal sebagai penghematan aglomerasi atau menurut istilah Marshall yaitu *Localized Industri*. Dalam teori Aglomerasi Marshall disebutkan bahwa industri akan memilih lokasi untuk kegiatan produksinya dalam jangka panjang

sehingga masyarakat akan memperoleh banyak keuntungan dengan adanya pendirian sebuah industri tersebut dan akan menarik beberapa perekonomian masyarakat sekitar. Dalam teori kemiskinan spasial dijelaskan bahwa adanya kemiskinan disuatu daerah justru akan menarik kemiskinan daerah lain disekitarnya.

Kemiskinan spasial adalah di mana modal geografis (fisik, alam, sosial, politik dan modal manusia suatu daerah) rendah dan kemiskinan tinggi, sebagian sebagai akibat dari ketidakberuntungan geografis. Perangkap kemiskinan spasial mungkin secara geografis jauh (daerah yang jauh dari pusat-pusat politik dan kegiatan ekonomi) berpotensi rendah atau daerah tertinggal yang memiliki sumber daya pertanian atau alam yang kurang/ rendah, daerah yang secara politik kurang beruntung atau lemah, kawasan yang kurang terhubung baik secara fisik maupun dalam hal komunikasi dan pasar (Bird, Higgins, & Harris, 2010). Jadi kemiskinan spasial disebabkan karena kondisi geografis suatu daerah yang kurang memadai baik secara alam, fisik, sosial politik dan modal manusia, sehingga hal ini menyebabkan beberapa daerah yang berdekatan akan mendapatkan pengaruh besar karena kondisi kemiskinan wilayah tersebut.

C. Faktor-Faktor Kemiskinan

Banyak teori kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai penyebab kemiskinan dari berbagai sudut pandang. Booth (1998) berpendapat bahwa ada lima faktor penyebab kemiskinan. Kelima faktor tersebut merupakan faktor ekonomi yang terdiri dari kurangnya modal dan rendahnya teknologi. kedua adalah faktor sosial budaya yang terdiri dari keterampilan dan pendidikan yang rendah, lapangan kerja yang terbatas dan adanya budaya yang buruk. Faktor ketiga adalah geografi dan lingkungan yang terdiri dari isolasi wilayah, jumlah penyakit dan sterilitas lahan. Faktor keempat adalah personal dan fisik, yang terdiri dari usia, jenis kelamin dan kesehatan individu. Faktor kelima adalah keterbatasan akses terhadap banyak hal seperti produk pasar, fasilitas publik dan fasilitas kredit.

Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah pemenuhan kebutuhan dasar dari segi ekonomi (*basic needs approach*), meliputi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Orang sering kekurangan gizi dan kesehatannya buruk, hampir atau sama sekali tidak terbaca, tinggal di lingkungan yang buruk, tidak terwakili secara politik, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan minimum, yang disebut usaha kecil dan daerah yang dianggap miskin jika berada di daerah kumuh (Todaro, 1998).

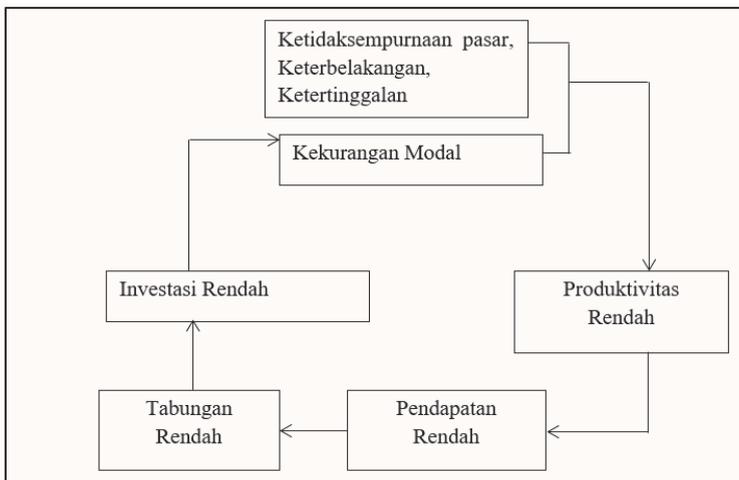
Sementara itu Chambers (1995) berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah: Belitan kemiskinan adalah hilangnya hak. Aset yang sulit untuk dikembalikan mungkin karena kebutuhan akan tekanan di atas ambang batas kekuatannya. Biasanya, sulitnya membawa seseorang ke jurang kemiskinan menyangkut lima hal. Kewajiban normal; nasib buruk; ketidakmampuan fisik, pengeluaran yang tidak produktif, dan pemerasan. Chambers (1995) mengajukan lima karakteristik kerugian yang melingkupi orang miskin dan keluarga miskin. Ini termasuk (a) kemiskinan, (b) kelemahan fisik, (c) keterasingan, dan (d) ketidakberdayaan.

Kemiskinan mengacu pada hubungan antara kebutuhan minimum orang dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kesulitan dalam mendefinisikan kemiskinan mengacu pada pentingnya kebutuhan minimal dan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Sharp & McDermott, 2009).

Penduduk negara tersebut miskin menurut Kuncoro (2012) karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Sachs (2005) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan

dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (1971) adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Gambar 3. Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle Of Poverty*)
Sumber: Nurkse (1971) dalam Kuncoro (2012)

D. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai macam jenis barang ekonomi dalam jumlah yang banyak kepada penduduknya. Adanya kemajuan atau penyesuaian

teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada menentukan kenaikan kapasitas itu sendiri (Boediono, 2012).

Menurut Arsyad (2010) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- 1) Akumulasi modal Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa depan. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.
- 2) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja Pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisonal telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.
- 3) Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi caracara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaanpekerjaan tradisonal. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:
 - a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
 - b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output

yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menurut Kuznets menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif. Sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan pemerataan pendapatan tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu perlu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat (Suparmoko, 2008).

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsurangsur berkurang (Kuznets, 1955).

E. Hubungan Pendidikan Dengan Kemiskinan

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses yang disadari dan dipikirkan dengan matang (suatu proses kerja intelektual). Oleh karena itu, kegiatan pendidikan harus dilaksanakan dan direncanakan pada semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, di tingkat nasional, daerah/provinsi dan kota, di tingkat lembaga/sekolah serta di dalam proses belajar mengajar dikelas.

Todaro & Smith (2003) menyarankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan fundamental, yang penting untuk pembentukan keterampilan orang yang lebih besar yang merupakan inti dari arti pembangunan.

Pendidikan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Nurkse (1971) menyatakan bahwa pendidikan mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas sumber daya yang rendah pula. Ketika kualitas sumber daya yang ada rendah akan berdampak pada produktivitas yang menurun. Menurunnya produktivitas akan mempengaruhi upah yang rendah sehingga menyebabkan bertambahnya kemiskinan.

Dalam artikelnya Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, World Bank (2007) menyatakan bahwa pendidikan yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penentu kemiskinan. Pendidikan yang memadai dan pendapatan yang tinggi juga terkait dengan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Dengan kata lain, peningkatan tingkat pendidikan dapat menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan tingkat pendidikan terendah.

Banyak orang miskin bahkan mengalami kebodohan secara sistematis. Kemiskinan bisa berujung pada kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan harus segera diberantas, oleh karena itu di dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa

F. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan atau dalam proses mencari pekerjaan. Pengangguran adalah angka yang menunjukkan jumlah angkatan kerja yang sedang aktif untuk mencari pekerjaan (Sukirno, 2011).

Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang mempengaruhi orang secara langsung dan merupakan masalah yang sangat besar

sulit untuk dikalahkan. Kehilangan pekerjaan berarti menurunkan standar hidup dan adanya tekanan psikologis. Tidak mengherankan, pengangguran adalah masalah yang sering dibahas dalam debat politik dan sering dibahas oleh para politisi yang mengklaim bahwa praktik yang mereka tawarkan membantu menciptakan lapangan pekerjaan (Mankiw, 2003). Jadi pengangguran merupakan persoalan yang sangat krusial dimana jika seseorang tidak memiliki pekerjaan akan secara langsung menurunkan kualitas hidup mereka, serta mengakibatkan adanya tekanan psikologis, maka tidak heran peranan pemerintah sangat diperlukan sekali dalam mengentaskan kemiskinan.

Untuk menanggapi masalah pengangguran, Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik. Menurut Teori Keynes, masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini dapat dilimpahkan pada mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan mengakibatkan kerugian, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, sehingga produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Menurut Sukirno (2011), dalam suatu perekonomian modern, pengangguran terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Pengangguran Normal, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh keinginan seseorang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginan mereka.
- b. Pengangguran Struktural, yaitu perkembangan suatu perekonomian akan menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak selalu baik yang akan berakibat pada penggunaan tenaga kerja.
- c. Pengangguran Kongjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kemerosotan kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan akibat kemerosotan dalam pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian tersebut.

Reinstadler & Ray (2010) berpendapat bahwa tingkat pengangguran regional dapat memiliki hubungan langsung dan dampak tidak langsung terhadap kemiskinan. Yang pertama efek langsung: pengangguran agregat yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan pengangguran individu. Efek kedua adalah efek tidak langsung melalui dampak negatif dari tingkat pengangguran pada daya tawar upah dari pekerjaan yang berisiko lebih tinggi (karena mereka menghadapi persaingan yang lebih tinggi) dipecah atau menerima upah yang lebih rendah ketika tingkat pengangguran regional agregat meningkat.

Menurut Sukirno (2011) dampak negatif dari pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mengurangi kekayaan yang dicapai seseorang. Tentu saja, ketika kekayaan orang turun karena pengangguran, kemungkinan mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan yang tinggi. Ketika pengangguran sangat tinggi di suatu negara, akan selalu ada kerusuhan politik dan sosial, yang secara serius mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi.

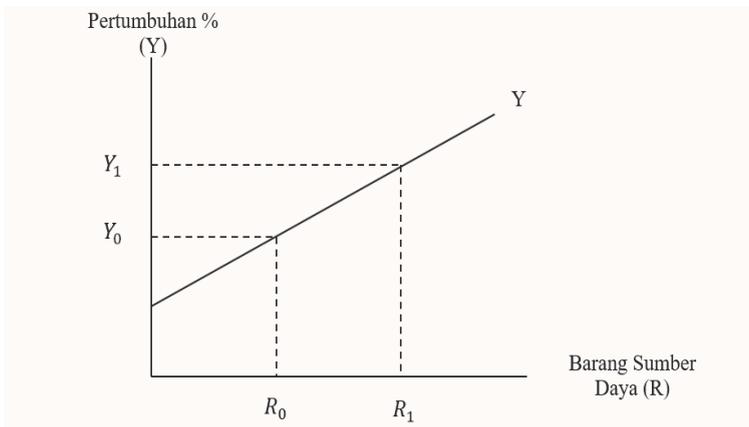
Menurut Arsyad (2010), anggapan bahwa setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah orang miskin adalah salah, sedangkan orang yang bekerja penuh waktu adalah orang kaya. Karena terkadang ada pekerja di perkotaan yang tidak sukarela bekerja karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka anggap di bawah standar dan melakukannya karena mereka memiliki sumber lain yang dapat membantu masalah keuangan mereka.

G. Hubungan Sumber Daya Alam Dengan Kemiskinan

Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi termasuk tanah itu sendiri. Artinya adalah sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar bumi yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian (Suparmoko, 2016).

Tanah dan sumber daya alam adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan proses pembangunan ekonomi negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam dan dengan tanah yang subur sangat memungkinkan ada produktivitas pertanian yang tinggi pada tahap awal pertumbuhan bisnis.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumber daya alam tidak sama dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya barang sumber daya yang dipakai dalam proses produksi (Suparmoko, 2016)

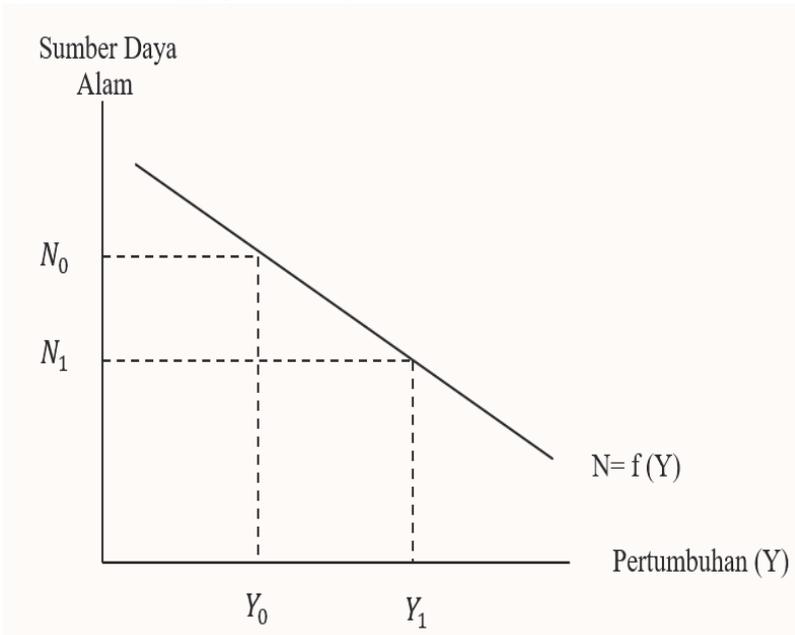


Gambar 4. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Barang Sumber Daya

Sumber : Suparmoko (2016)

Gambar 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang digambarkan pada sumbu vertikal merupakan fungsi dari tersedianya barang sumber daya yang digambarkan pada sumbu horizontal. Kurva $Y = f(R)$ menunjukkan adanya hubungan positif yang artinya bila jumlah barang sumber daya yang dipakai dalam proses produksi bertambah maka perekonomian juga berkembang lebih maju. Misalnya dalam Gambar 2.2 dapat dilihat bila jumlah barang sumber daya yang dipakai dalam perekonomian setinggi R_0 , maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan setinggi Y_0 ; dan bila jumlah barang sumber daya alam yang dipakai

bertambah menjadi R_1 , maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi yaitu menjadi Y_1 .



Gambar 5. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Persediaan Sumber Daya Alam
Sumber : Suparmoko (2016)

Sedangkan Gambar 5 menunjukkan bahwa jumlah persediaan sumber daya alam (N) merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi (Y), dan di sini terdapat hubungan yang negatif artinya semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian akan semakin menipis tersedianya sumber daya alam di negara yang bersangkutan. Dalam Gambar 4 ditunjukkan pada saat pertumbuhan ekonomi setinggi Y_0 %, maka jumlah persediaan sumber daya alam adalah N_0 dan bila laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi Y_1 %, maka jumlah persediaan sumber daya alam menurun menjadi N_1 .

Pada umumnya orang menerangkan bahwa kemunduran suatu perekonomian ataupun adanya kesempatan untuk berkembang bagi

suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Bahkan sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan bahwa suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukupnya sumber daya alam yang dimilikinya. Memang benar terbatasnya tingkat output di negara yang pendapatannya rendah antara lain disebabkan oleh terbatasnya sumber daya alam yang tersedia, baik dalam arti kuantitas maupun jenisnya. Tanpa adanya sumber alam yang minimum di negara itu, maka akan tidak banyak harapan untuk adanya perkembangan ekonomi (Suparmoko, 2016).

Sumber daya alam memainkan peran khusus dalam kehidupan masyarakat miskin (USAID, 2006). Lebih dari 1,3 miliar masyarakat bergantung pada perikanan, hutan, dan pertanian dalam pekerjaannya hampir setengah dari semua pekerjaan di seluruh dunia. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2002, 90 persen dari 1,1 miliar dunia miskin mereka yang hidup dengan kurang dari \$1 per hari bergantung pada hutan untuk setidaknya sebagian dari pendapatan mereka.

Faktor tanah dan sumber daya alam sangat penting untuk menentukan proses pembangunan ekonomi negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam dan dengan tanah yang subur sangat memungkinkan ada produktivitas pertanian yang tinggi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada fase pembangunan ekonomi berikutnya, produktivitas pertanian yang meningkat memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan sektor lain seperti industri dan jasa.

Pada umumnya orang menerangkan bahwa kemunduran suatu perekonomian ataupun adanya kesempatan untuk berkembang bagi suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut. Bahkan sampai saat ini masih ada orang yang mengatakan bahwa suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukupnya sumberdaya alam yang dimilikinya. sumber daya alam menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (Wright & Czelusta, 2004). Hal tersebut pula diungkapkan oleh Richard M Auty & Mikesell (1998) yang menyebutkan dengan asumsi hal-hal lain yang dianggap tetap,

kelimpahan sumber daya alam akan meningkatkan tingkat kesejahteraan per kapita, sehingga negara tersebut dapat berkelanjutan di masa depan. Dengan kata lain wilayah yang kaya sumber daya alam memiliki keuntungan ekonomi yang berbeda dengan wilayah yang miskin sumber daya alam.

H. Hubungan Kesehatan Dengan Kemiskinan

Menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan adalah dasar untuk mencapai kedamaian dan keamanan individu. Tingkat kesehatan yang tinggi dapat digunakan untuk mengendalikan segala penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya. Masalah ekonomi utama yang terkait dengan kemiskinan adalah masalah kesehatan (OECD). Ketika orang mengalami kemiskinan, mereka lebih rentan terhadap penyakit. Rumah tangga terjebak dalam spiral ke bawah kehilangan pendapatan dan berjuang untuk membayar biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Sebaliknya, individu yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, rata-rata investasi dalam dan luar negeri, modal manusia, rata-rata tabungan nasional dan demografi negara (OECD).

Todaro & Smith (2003) berpendapat bahwa kesehatan dan pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga. Kedua hal tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sebenarnya.

Dalam hal kesehatan, yang dikaitkan dengan kemiskinan, seperti yang terjadi saat itu akibat krisis ekonomi, reaksi masyarakat bermacam-macam, seperti: orang miskin cenderung menghindari layanan rawat jalan, menunda layanan rumah sakit, menghindari layanan spesialis yang mahal, mempersingkat masa tinggal di rumah sakit, membeli setengah atau bahkan sepertiga dari obat yang diresepkan untuk menghindari

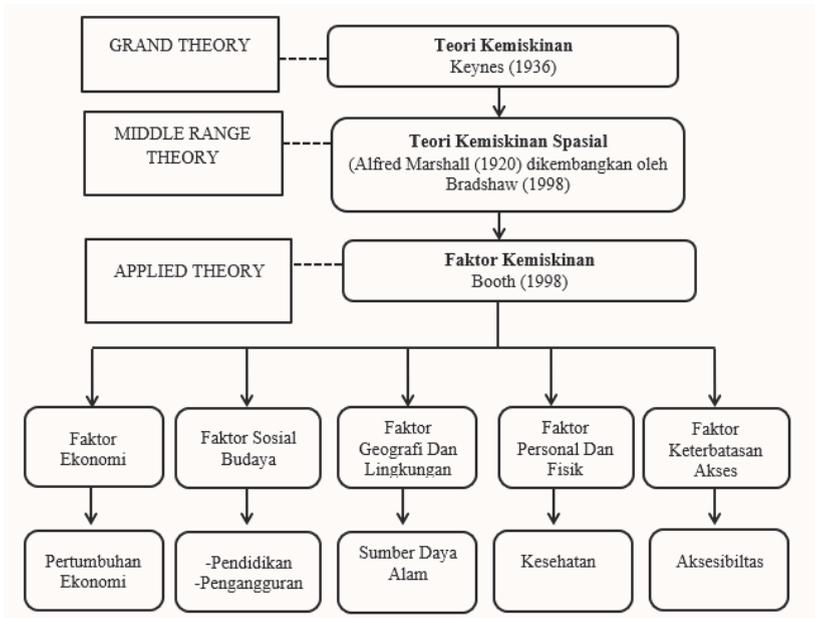
perawatan penuh, mencari perawatan lokal, yang terkadang dapat menimbulkan efek berbahaya. ibu biasanya melahirkan di rumah dengan bantuan dukun bayi yang meningkatkan resiko melahirkan, penyakit menjadi kronis karena terhindar dari pengobatan yang mahal (Suryawati, 2005).

I. Hubungan antara Aksesibilitas Dengan Kemiskinan

Menurut Miro (2005) aksesibilitas adalah konsep yang menyatukan (menghubungkan) sistem tata guna lahan geografis dengan sistem jaringan transportasi yang saling berhubungan dimana perubahan tata guna lahan yang menciptakan zona dan jarak geografis dalam suatu wilayah atau kota dapat dengan mudah dihubungkan oleh infrastruktur atau penyedia transportasi.

Aksesibilitas merupakan konsep yang menghubungkan sistem pengaturan budidaya geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Konektivitas transportasi dapat dinyatakan sebagai ukuran kemudahan atau kesulitan aksesibilitas. Semuanya kemudian dinyatakan dalam bentuk jarak, waktu atau biaya (Tamin, 2000).

Aksesibilitas terhadap layanan infrastruktur seperti jalan menunjukkan semakin jauh seseorang mengakses layanan infrastruktur maka semakin tinggi tingkat kemiskinan (Amaliah & Ulimaz, 2021) (Cahyadi et al., 2020). Hal tersebut menandakan bahwa semakin baik aksesibilitas seseorang terhadap infrastruktur fisik maka akan memudahkan seseorang tersebut lepas dari jeratan kemiskinan. Hal ini juga di kemukakan oleh Warr (2010) yang menyatakan bahwa penurunan kemiskinan dikaitkan dengan peningkatan akses aksesibilitas terutama aksesibilitas jalan.



Gambar 6. Peta Teori

Sumber : Teori dan penelitian terdahulu

J. Kajian Empiris tentang Kemiskinan

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
1.	(Xu et al., 2019)	Identifying the Geographic Indicators of Poverty Using Geographically Weighted Regression: A Case Study from Qian-dongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Guizhou, China	Sumber daya alam : Topografi, penggunaan lahan, lokasi geografi, kepadatan jaringan jalan Kemiskinan : Jumlah penduduk miskin	geographically weighted regression (GWR)	Hasilnya menunjukkan bahwa kepadatan jaringan jalan memiliki korelasi yang paling signifikan secara statistik dengan rasio jumlah penduduk miskin, topografi, penggunaan lahan, lokasi geografis juga berpengaruh terhadap angka kemiskinan

2.	(Ge et al., 2021)	Understanding the Relationship between Dominant Geo-Environmental Factors and Rural Poverty in Guizhou, China	Sumber daya alam : lahan subur, kemiringan, ketinggian dan lahan subur Kemiskinan : persentase kemiskinan	Spatial Autocorrelation Analysis dan Geo-Detector Model	Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengelompokan spasial dari kejadian kemiskinan di wilayah studi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa persentase irigasi pada lahan subur merupakan faktor dominan yang menjelaskan pola spasial kemiskinan.
3.	(X. Chen et al., 2015)	Spatial distribution patterns and influencing factors of poverty - a case study on key country from national contiguous special povertystricken areas in china	Sumber daya alam : sumber daya air, aksesibilitas, topografi, sumber daya lahan Kemiskinan : persentase kemiskinan	spatial autocorrelation method.	Aksesibilitas, sumber daya tanah berpengaruh signifikan terhadap kejadian kemiskinan
4	Zhou & Xiong, 2018)	Natural topographic controls on the spatial distribution of poverty-stricken counties in China	Kemiskinan, topografi	Spatial overlay analysis	Hasil menunjukkan bahwa kondisi alam yang kompleks topografi memiliki efek pendorong positif pada distribusi spasial kabupaten yang dilanda kemiskinan. Sebaliknya, kabupaten yang tidak miskin terutama terletak di daerah dengan kondisi topografi yang baik.

5	(Gao et al., 2020)	The Nexus between Poverty and the Environment: A Case Study of Lijiang, China	Sumber daya alam : Topografi, Iklim, Sumber daya air, Sumber daya lahan, Risiko alam Faktor Sosial Ekonomi : unit administrasi dan jarak ke pusat kota Kemiskinan: Persentase kemiskinan	Geo Detector	Hasil menunjukkan sumber daya alam dalam hal ini tanah mempengaruhi pengurangan kemiskinan. Faktor sosial ekonomi seperti unit administrasi dan jarak ke pusat kota juga memainkan peran kunci terhadap penurunan kemiskinan
6.	(M. Liu et al., 2022)	The spatial–temporal variation of poverty determinants	Sumber daya alam, faktor sosial ekonomi : Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran Kemiskinan : persentase kemiskinan	spatial autocorrelation	Kondisi lingkungan alam terhadap kemiskinan sedikit menurun pengaruhnya terhadap kemiskinan, sedangkan faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang meningkat secara signifikan terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten dari waktu ke waktu, terutama yang diproksikan menggunakan jumlah pengangguran.

7.	(Liang et al., 2022)	Examining the impact of multidimensional accessibility on regional poverty in Laos	Aksesibilitas: aksesibilitas ekonomi, aksesibilitas pasar, aksesibilitas lalu lintas Pendidikan : Fasilitas pendidikan Faktor Alam : SDA Kemiskinan : Persentase kemiskinan	<i>GWR</i>	Pengaruh aksesibilitas multidimensi terhadap heterogenitas spasial kemiskinan cukup signifikan, di antaranya aksesibilitas ekonomi, aksesibilitas pasar, dan aksesibilitas lalu lintas merupakan faktor pendorong utama, fasilitas pendidikan dan faktor alam memiliki pengaruh yang terbatas terhadap pola kemiskinan.
8.	(Martens & Bastiaansen, 2019)	An index to measure accessibility poverty risk	Kemiskinan dan Aksesibilitas	Accessibility modeling	(sub) daerah perkotaan berkontribusi paling besar terhadap risiko kemiskinan, aksesibilitas secara keseluruhan di wilayah tersebut berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan
9.	(Ahlström et al., 2011)	Improved accessibility modeling and its relation to poverty e A case study in Southern Sri Lanka	Kemiskinan dan Aksesibilitas: Aksesibilitas ke kota, Aksesibilitas ke pasar	Accessibility modeling	Temuan menarik adalah bahwa rumah tangga dengan perkiraan aksesibilitas tinggi ke pasar tampaknya miskin daripada rumah tangga dengan aksesibilitas tinggi ke kota. perbedaan antara pasar dan kota juga bisa memiliki arti penting untuk implikasi kebijakan.

10	(Edith et al., 2011)	The impact of road accessibility of rural villages on recognition of poverty reduction opportunities	Akses jalan, kepemilikan lahan, akses terhadap pemerintahan, akses informasi, kemiskinan	Regresi linear berganda dan focus group discussion	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) masyarakat pedesaan lebih mudah mengakses kepusat ekonomi melalui jalan darat. (2) mayoritas anggota masyarakat pedesaan mengakui tanah sebagai peluang utama untuk pengentasan kemiskinan. (3) anggota masyarakat pedesaan merasa bahwa mereka tidak mengakses beberapa dukungan yang diberikan oleh komunitas internasional untuk pengurangan kemiskinan. (4) beberapa program pembangunan tidak cocok untuk situasi pedesaan. (5) masyarakat pedesaan terutama di daerah pedalaman sulit mengakses informasi.
----	----------------------	--	--	--	--

1	(Amaliah & Ulimaz, 2021)	Spatial modeling on the influence of social network and infrastructure accessibility on the number of poverty alleviation program recipients in Budaya Pam-pang Village	Jaringan sosial dan aksesibilitas infrastruktur, kemiskinan	Spatial autocorrelation	Berdasarkan hasil analisis, ditemukan kemiskinan dipengaruhi oleh indikator aspek jaringan sosial dan aksesibilitas infrastruktur. Hubungan antara tingkat jaringan sosial dan kemiskinan sangat tinggi. Sementara itu, semakin jauh seseorang mengakses layanan infrastruktur, semakin tinggi tingkat kemiskinan
12	(Sugasawa, 2019)	Accessibility to the nearest urban metropolitan area and rural poverty in Japan	Aksesibilitas ke kota dan kemiskinan	Panel Regression	Hasil penelitian menemukan bahwa jarak waktu yang lebih jauh ke wilayah metropolitan perkotaan terdekat secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan regional.
13	(Minot et al., 2006)	Poverty and Inequality in Vietnam Spatial Patterns and Geographic Determinants	Akses pasar, lahan pertanian, aksesibilitas, dan kemiskinan	Spatial Regression Analysis	Kemampuan akses pasar dan kepemilikan lahan menjelaskan sebagian besar dari Perbedaan tingkat kemiskinan pedesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di daerah terpencil terkait dengan rendahnya potensi pertanian dan kurangnya akses pasar.

14	(Pozzi et al., 2009)	Accessibility mapping and rural poverty in the horn of Africa	Aksesibilitas : Akses ke jalan, akses ke kota, akses ke pasar Kesejahteraan : pengeluaran rumah tangga dan jumlah penduduk miskin	Panel Regression	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak dan waktu tempuh ke jalan tidak berkorelasi tinggi dengan kesejahteraan, sedangkan jarak dan waktu tempuh ke pusat kota sangat berkorelasi dengan kesejahteraan. Akses ke pusat-pusat pasar lebih penting daripada akses ke pasar lokal yang sangat kecil.
15	(Cahyadi et al., 2020)	Towards Spatial Poverty Targeting: Identification Of Poverty Clustering In Indonesia	Pertanian, bentang alam, infrastruktur fisik, Akses fasilitas, Kemiskinan	Spatial Analysis, Spatial Lag Regression, Local & Global Moran's I	Faktor-faktor spasial seperti pertanian, bentang alam (dataran tinggi, hutan, laut, dan sungai), infrastruktur fisik (akses jalan dan ketersediaan irigasi), akses fasilitas (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) secara signifikan berkorelasi dengan pengelompokan kemiskinan.

16	(Birungi et al., 2005)	Incorporating Environmental Factors in Poverty Analysis Using Small Area Estimation and Spatial Regression Techniques: The Case of Land Use Indicators in Uganda	Faktor lingkungan : lahan basah, jalan, rumah sakit, padang rumput, lahan pertanian, area terbangun, lereng dan curah hujan Kemiskinan : Persentase kemiskinan	Generalized linear models, Moran Indeks	Hasilnya menunjukkan pentingnya lahan pertanian di beberapa kecamatan menjadi miskin. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan antara faktor lingkungan terhadap kemiskinan.
17	(Ge et al., 2021)	Understanding the Relationship between Dominant Geo-Environmental Factors and Rural Poverty in Guizhou, China	SDA : lahan subur, kemiringan, ketinggian dan lahan rumput Kemiskinan: % Kemiskinan	Spatial Autocorrelation Analysis dan Geo-Detector Model	Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengelompokan spasial dari kejadian kemiskinan di wilayah studi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa persentase lahan subur merupakan faktor dominan yang menjelaskan pola spasial kemiskinan.

18	(Kassa et al.)	The Poverty - Environment Nexus in Developing Countries: Evidence from Ethiopia: A Systematic Review	Faktor Lingkungan : kelangkaan tanah, lahan pertanian Kemiskinan : Jumlah penduduk miskin	Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan lingkungan terhadap tanah yang dapat ditanami, yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian. Hilangnya potensi dan lahan pertanian yang ada akibat kekeringan, banjir, dan degradasi lahan mempengaruhi sebagian besar kaum miskin di dunia, banyak dari mereka bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian dan makanan mereka
19	(Schleicher et al., 2018)	Poorer without It? The Neglected Role of the Natural Environment in Poverty and Wellbeing	SDA, Kemiskinan	Kami berpendapat bahwa kegagalan untuk mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan yang hilang ini dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak lengkap dari berbagai dimensi kesejahteraan dan kemiskinan, dan faktor pendorong yang mendasarinya.

20	(Malerba, 2020)	Poverty alleviation and local environmental degradation: An empirical analysis in Colombia	Lahan, kemiskinan	spatial autocorrelation method.	Temuan menunjukkan kepemilikan lahan menyebabkan kemiskinan. namun pada gilirannya, tidak memiliki efek negatif pada kondisi lingkungan lokal di kotamadya.
21	(Mosley & Miller, 2004)	Spatial Variations in Factors Affecting Poverty	Pengangguran, kemiskinan	Descriptive Analysis	Seseorang yang mempunyai pekerjaan umumnya diasosiasikan akan menurunkan risiko kemiskinan, Namun efek lapangan kerja tidak sama di seluruh rangkaian desa-kota.
22	(John & Morufu, 2013)	Unemployment and Poverty: Implications for National Security and Good Governance in Nigeria	Pengangguran, ketidakamanan, dan kemiskinan	Granger Causality	Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan menyebabkan ketidakamanan. Di negara di mana banyak orang menganggur, mereka akan menjadi miskin; dan kemiskinan akan menyebabkan ketidakamanan.

23	(Faridi et al., 2016)	Labor Force Participation and Poverty Alleviation in Pakistan: An Empirical Analysis	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Inflasi, Tingkat Melek Huruf, Pengeluaran Kesehatan, Tingkat Kesuburan, dan Kemiskinan	Co-integration, ARDL	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan adalah sumber utama dari pengentasan kemiskinan dan pengeluaran kesehatan berkontribusi secara signifikan. Disarankan bahwa lebih banyak pekerjaan yang terampil yang harus diciptakan untuk mengurangi kemiskinan di Pakistan.
24	(Ucha, 2010)	Poverty in Nigeria: Some Dimensions and Contributing Factors	pengangguran, korupsi, non-diversifikasi ekonomi Nigeria, ketimpangan, kemalasan, sistem pendidikan, dan kemiskinan	Descriptive Analysis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan sistem pendidikan yang buruk adalah beberapa faktor penentu utama kemiskinan.
25	(Saunders, 2002)	The Direct and Indirect Effects of Unemployment on Poverty and Inequality	Pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan	Panel Regression	Pengangguran meningkatkan risiko kemiskinan dan berkontribusi pada ketidaksetaraan, dan hal itu juga menimbulkan serangkaian efek sosial yang melemahkan para penganggur itu sendiri, keluarga mereka, dan komunitas tempat mereka tinggal.

26	(Quy, 2016)	Relationship between Economic Growth, Unemployment and Poverty: Analysis at Provincial Level in Vietnam	Tingkat pengangguran, Pengeluaran pemerintah, Nilai ekspor dan impor, Investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan	Panel Regression	Pengangguran memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan
27	(Xue & Zhong, 2003)	Unemployment, Poverty and Income Disparity in Urban China	Pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	Panel Regression	Temuan utama adalah bahwa tingkat pengangguran perkotaan mencapai 11,6% pada tahun 1999 dan merupakan penyebab utama kemiskinan perkotaan
28	(Hofmarcher, 2021)	The effect of education on poverty: A European perspective	Pendidikan, kemiskinan	ordinary least squares (OLS)	Hasil penelitian menunjukkan efek pengurangan kemiskinan yang besar secara ekonomi dari pendidikan. Hal ini berlaku untuk beberapa ukuran kemiskinan objektif, yang bersifat absolut dan relatif, dan ukuran kemiskinan subjektif.
29	(Garza-Rodriguez et al., 2021)	Determinants of Poverty in Mexico: A Quantile Regression Analysis	Pendidikan, kemiskinan	Quantile Regression Model	Ditemukan bahwa menurunnya rumah tangga miskin disebabkan karena tingkat pendidikan lebih tinggi dari sekolah dasar.

30	(Mohanty & Swain, 2019)	Identifying Social Groupwise Household-Level Determinants of Poverty in Rural Odisha Using Logistic Regression Model	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga, kemiskinan	Logistic Regression Model	Hasilnya menunjukkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, merupakan penentu utama kemiskinan di pedesaan Odisha
31	(Peng et al., 2019)	Determinants of Poverty and Their Variation Across the Poverty Spectrum: Evidence from Hong Kong, a High-Income Society with a High Poverty Level	Pendidikan, kesehatan dan kemiskinan	Quantile regression	Regresi logistik ditunjukkan bahwa memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan memiliki kesehatan diri yang buruk, meningkatkan kemungkinan menjadi miskin.

32	(D. E. Bloom et al., 2006)	Higher Education and Economic Development in Africa	tingkat pendidikan, angka kelahiran, teknologi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	Panel Regression	<p>Hasil penelitiannya menyatakan pendidikan tinggi memiliki peran yang kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan tersier dapat meningkatkan pengejaran teknologi dan sehingga membantu memaksimalkan potensi Afrika untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar mungkin.</p> <p>Berinvestasi dalam pendidikan tersier di Afrika dapat mempercepat difusi teknologi, yang akan mengurangi kesenjangan pengetahuan dan membantu mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.</p>
----	----------------------------	---	--	------------------	--

33	(Suripto & Subayil, 2020)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Periode 2010-2017	Tingkat Pendidikan, pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, kemiskinan	Panel regresi	Hasil dalam penelitian dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1) Variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan; (2) variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan; (3) Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
34	(Zhang, 2014)	The poverty trap of education: Education–poverty connections in Western China	Tingkat pendidikan, biaya pendidikan, pendapatan percapita dan kemiskinan	Regresi data panel	Hasil temuan menjelaskan biaya kuliah dan biaya yang tinggi telah menciptakan beban yang jauh lebih tinggi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah yang akhirnya yang secara tak terduga terperangkap dalam jebakan kemiskinan baru dari faktor pendidikan.

35	(Barham et al., 1995)	Education and the poverty trap	Pembiayaan pendidikan, tingkat pendidikan, kemiskinan	Panel regresi	Hasil penelitian ditemukan di mana anak-anak dari keluarga miskin ditemukan dalam perangkap kemiskinan karena ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan mereka sehingga orang tua terpaksa untuk berhutang dan menimbulkan kemiskinan yang baru.
36	(Bonal, 2007)	On global absences: Reflections on the failings in the education and poverty relationship in Latin America	Kelem-bagaan, kualitas pendidikan, tingkat pendidikan, kemiskinan	Descriptif analysis	Hasil penelitian menjelaskan tidak ada hubungan tingkat pendidikan seseorang terhadap pengentasan kemiskinan karena adanya keterbatasan reformasi kelembagaan pendidikan dalam hal mencapai keberhasilan pendidikan, selain itu kemiskinan bukan hanya soal materi namun ada hambatan lain untuk sukses di sekolah yaitu seperangkat materi, sosial, budaya dan kondisi emosional yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran.

37	(Tilak, 2007)	Post-elementary education, poverty and development in India	Tingkat pendidikan, kematian bayi, angka harapan hidup, Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (a) Pendidikan menengah dan tinggi meningkatkan pendapatan individu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. (b) Pendidikan pasca sekolah dasar signifikan berkontribusi terhadap pengurangan absolut dan kemiskinan relatif. (c) Hal ini juga berpengaruh negatif terhadap kematian bayi (d) Harapan hidup juga berhubungan positif dengan pendidikan pasca sekolah dasar.
38	(Gupta & Mitra, 2004)	Economic Growth, Health and Poverty: An Exploratory Study for India	Kesehatan, Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	Panel Regression	pengeluaran kesehatan per kapita jelas dan positif mempengaruhi status kesehatan dan hasilnya tampak menunjukkan bahwa kemiskinan menurun sebagai respons terhadap peningkatan status kesehatan

39	(D. Bloom & Canning, 2003)	The Health and Poverty of Nations: From theory to practice	Kesehatan, pendapatan rumah tangga, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan		terdapat pengaruh besar peningkatan kesehatan terhadap pendapatan rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi dan menjadikannya alat penting untuk pengurangan kemiskinan.
40	(Bud-delmeyer & Cai, 2009)	Interrelated Dynamics of Health and Poverty in Australia	status sosial ekonomi, kesehatan dan kemiskinan	Panel regression, mean marginal effects (MME)	ada hubungan 2 arah antara Kesehatan dengan kemiskinan, secara khusus ditemukan bahwa keluarga yang dikepalai oleh orang yang sakit lebih banyak cenderung berada dalam kemiskinan dibandingkan dengan keluarga yang dikepalai oleh orang yang sehat. Di sisi lain, kepala keluarga yang keluarganya berada dalam kemiskinan pada tahun berjalan lebih mungkin untuk mengalami sakit pada tahun berikutnya dibandingkan dengan kepala keluarga yang keluarganya tidak miskin

41	(Grant, 2005)	Health and Poverty Linkages: Perspectives of the chronically poor	Kesehatan dan kemiskinan		orang-orang termiskin sebagian besar hampir selalu mengalami morbiditas yang lebih tinggi, rata-rata meninggal lebih muda dan mengalami tingkat kematian ibu dan anak yang lebih tinggi, hal ini mencerminkan pada tahun-tahun berikutnya kemiskinan akan lebih parah karena terkait masalah kesehatan jangka Panjang
42	(Novignon et al., 2012)	Health and vulnerability to poverty in Ghana: evidence from the Ghana Living Standards Survey Round 5	Status kesehatan, kesejahteraan dan kemiskinan	Feasible Generalized Least Squares (FGLS)	status kesehatan mempengaruhi kerentanan terhadap kemiskinan karena kemungkinan terjadinya penyakit dimasa mendatang akan berkurang untuk rumah tangga.
43	(Gragnotati & Marini, 2003)	Health and Poverty in Guatemala	Pengeluaran untuk fasilitas kesehatan dan kemiskinan		pengeluaran untuk kesehatan dan hasil kesehatan belum meningkat secara signifikan. Selain itu, belanja publik untuk kesehatan tidak tepat sasaran

44	(Gounder & Xing, 2012)	Impact of education and health on poverty reduction: Monetary and non-monetary evidence from Fiji	Pendidikan, kesehatan dan kemiskinan	Panel Regression	Hasil untuk model non moneter menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan orang untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan kesehatan dan dalam memperoleh fasilitas perumahan yang baik sehingga tidak terjebak dalam kondisi kemiskinan
45	(Weziak-Bialowolska, 2016)	Spatial Variation in EU Poverty with Respect to Health, Education and Living Standards	Kesehatan, Pendidikan, standar hidup dan kemiskinan	The Multi-dimensional Poverty Index, Spatial analysis	Menggunakan MPI terdiri dari tiga dimensi—kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang menegaskan bahwa tingkat kemiskinan yang dipahami terutama sebagai kesejahteraan ekonomi di UE berkisar antara 0,7 hingga 16,3%, hasil juga menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pendidikan, kesehatan dan standar hidup terhadap kemiskinan

46	(Szwarcwald et al., 2000)	Health conditions and residential concentration of poverty: a study in Rio de Janeiro, Brazil	Kesehatan dan kemiskinan	A geographical information system (GIS)	Kondisi kesehatan terburuk ditemukan di klaster yang terdiri dari kawasan pelabuhan dan sekitar utara, tepatnya di sektor dengan konsentrasi penduduk kumuh tertinggi. Sektor yang mengkonsentrasikan kemakmuran, yang terdiri dari unit-unit geografis yang terletak di sepanjang pantai, menunjukkan kondisi kesehatan yang paling baik. Kondisi kesehatan menengah ditemukan di wilayah barat, yang juga memiliki standar hidup yang buruk tetapi pemukiman kumuh yang rendah.
47	(W. Liu et al., 2020)	Rural Public Expenditure and Poverty Alleviation in China: A Spatial Econometric Analysis	pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur dan kemiskinan	spatial autoregressive (SAR) model and the spatial error (SEM)	Hasil penelitian menunjukkan perbedaan struktural dalam kemiskinan efek pengurangan pengeluaran pemerintah sangat jelas, menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, telah menunjukkan efek pengentasan kemiskinan yang baik

48	(Adams Jr, 2004)	Economic Growth, Inequality and Poverty: Estimating the Growth Elasticity of Poverty	Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	Desriptif analysis	Studi menemukan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi memang mengurangi kemiskinan di negara berkembang, namun tingkat pengurangan kemiskinan bergantung pada sangat banyak tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi didefinisikan. Mengontrol perubahan ketimpangan pendapatan, kapan pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan survey pendapatan rata-rata (konsumsi), elastisitas pertumbuhan kemiskinan (tidak termasuk Eropa Timur dan Asia Tengah)
49	(Permadi, 2018b)	Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia	Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan dan kemiskinan	metode Growth Incidence Curve (GIC), dan metode Pro-Poor Growth Index (PPGI)	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, berpengaruh signifikan terhadap kejadian kemiskinan di Indonesia. Hasil empiris menunjukkan tidak ada satupun pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan

50	(Dollar et al., 2016)	Growth still is good for the poor	Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi		Temuan ini mencerminkan fakta bahwa perubahan dalam pendapatan dari 20 persen terbawah dan 40 persen terbawah umumnya kecil dan tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.
51	(Marrero & Servén, 2022)	Growth, Inequality, and Poverty A Robust Relationship?	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan	GMM approach	Korelasi pertumbuhan dengan kemiskinan secara konsisten negatif. Sementara secara tidak langsung pengaruh ketimpangan terhadap pertumbuhan dan kemiskinan sangat negatif
52	(Adeleye et al., 2020)	Comparative investigation of the growth-poverty-inequality trilemma in Sub-Saharan Africa and Latin American and Caribbean Countries	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan	GMM	(1) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sifat pengurangan kemiskinan; (2) laju ketimpangan pendapatan memperparah kemiskinan, (3) ketimpangan memperburuk dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan, dan (4) trilemma ketimpangan pertumbuhan-kemiskinan berbeda antar kelompok pendapatan dan sampel regional.

53	(Hassan et al., 2015)	The Relationship between Growth-Inequality-Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality	Pertumbuhan ekonomi, emisi karbon, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan	Cointegration Test, Error Correction Model (ECM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi & kemiskinan sedangkan Dalam jangka panjang, ada hubungan positif yang signifikan antara PDB dan kemiskinan di Pakistan.
54	(Fosu, 2017)	Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence	Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	random-effects (RE), country fixed-effects (FE), and generalized method of moments (GMM)	Studi ini menemukan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi merupakan kekuatan pendorong utama di balik penurunan dan peningkatan kemiskinan
55	(Perera & Lee, 2013)	Have economic growth and institutional quality contributed to poverty and inequality reduction in Asia?	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan	Generalized Method of Moments (GMM)	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada ketimpangan pendapatan, namun pertumbuhan justru mengarah pada pengurangan kemiskinan.

56	(Wan et al., 2021)a	China's poverty reduction miracle and relative poverty: Focusing on the roles of growth and inequality	GDP, Ketimpangan pendapatan, Kemiskinan	panel-VAR modelling	hasil pemodelan panelVAR menunjukkan bahwa pertumbuhan memainkan peran besar dalam pengurangan kemiskinan tetapi kemiskinan relatif terus meningkat. Dan pertumbuhan, bertentangan dengan kasus kemiskinan absolut.
57	(X. Chen et al., 2015)	The influences of aging population and economic growth on Chinese rural poverty	Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	OECD, 2002. Indicators to Measure Decoupling of Environmental Pressure and Economic Growth.	Menurut analisis dampak positif dari pertumbuhan ekonomi pada pengentasan kemiskinan pedesaan telah menghilang di banyak tempat. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memecahkan masalah kemiskinan pedesaan, seperti yang diasumsikan sebelumnya, dan penuaan penduduk yang semakin serius telah menjadi kunci yang mempengaruhi faktor kemiskinan di sebagian besar daerah pedesaan.

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2022

BAB 3

KONSEP KEMISKINAN SPASIAL

A. **Sitensis Kajian**

Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan J.M. Keynes (1936) yang merujuk pada teori demokrasi sosial. Teori demokrasi sosial tidak melihat kemiskinan sebagai masalah individu tetapi melihat kemiskinan sebagai permasalahan struktural. Kemiskinan Struktural menurut pandangan Keynes merupakan permasalahan yang disebabkan oleh struktur tatanan sosial ekonomi yang mengakibatkan terbatasnya akses beberapa kelompok terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan sosial.

Penelitian ini juga menggunakan teori kemiskinan spasial yang berasal dari teori aglomerasi ekonomi (Alfred Marshall, 1920) yakni menjelaskan seberapa kedekatan atau konsentrasi perusahaan serupa menarik layanan dan pasar yang mendukung, yang selanjutnya menarik lebih banyak perusahaan. Sebaliknya, di mana ada kemiskinan dan kondisi kemiskinan justru menghasilkan lebih banyak kemiskinan didaerah sekitarnya atau yang berdekatan (Bradshaw, 2006). Menurut Bird, Higgins, & Harris (2010) kemiskinan spasial merupakan kondisi di mana modal geografis (fisik, alam, sosial, politik dan modal manusia suatu daerah) rendah dan kemiskinan tinggi, sebagian sebagai akibat dari ketidakberuntungan geografis.

Dalam melihat faktor kemiskinan penelitian ini menggunakan teori Booth (1998) berpendapat bahwa ada lima faktor penyebab kemiskinan.

Kelima faktor tersebut merupakan faktor ekonomi yang terdiri dari kurangnya modal dan rendahnya teknologi. kedua adalah faktor sosial budaya yang terdiri dari keterampilan dan pendidikan yang rendah, lapangan kerja yang terbatas dan adanya budaya yang buruk. Faktor ketiga adalah geografi dan lingkungan yang terdiri dari isolasi wilayah, jumlah penyakit dan sterilitas lahan. Faktor keempat adalah personal dan fisik, yang terdiri dari usia, jenis kelamin dan kesehatan individu. Faktor kelima adalah keterbatasan akses terhadap banyak hal seperti produk pasar, fasilitas publik dan fasilitas kredit.

Faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi menggunakan teori Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsurangsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian Adams Jr (2004), Permadi (2018), Marrero & Servén (2022), Adeleye et al (2020), Hassan et al (2015), Fosu (2017), Perera & Lee (2013), Wan et al (2021), X. Chen et al (2015) lebih banyak mengulas pertumbuhan ekonomi dari sisi makro bukan daerah kabupaten kota dan menggunakan metode GMM, VAR dan OLS sedangkan penelitian ini menggunakan regresi panel spasial untuk membuktikan apakah terdapat dependensi spasial antar daerah satu dengan lainnya.

Faktor sosial budaya seperti pendidikan menggunakan teorinya (Nurkse, 1971) yang menyatakan bahwa pendidikan mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas sumber daya yang rendah pula. Ketika kualitas sumber daya yang ada rendah akan berdampak pada produktivitas yang menurun. Menurunnya produktivitas akan mempengaruhi upah yang rendah sehingga menyebabkan bertambahnya kemiskinan. Begitupun dengan beberapa penelitian Hofmarcher (2021), Garza-Rodriguez et al (2021), Mohanty & Swain (2019), Peng et al (2019), D. E. Bloom et al (2006), Suripto & Subayil (2020), Zhang (2014), Barham et al (1995), Bonal (2007), Tilak (2007), yang melihat pendidikan dari sudut pandang

investasi pendidikan, jenjang tingkat pendidikan, dan pendidikan terakhir kepala keluarga, dan pembiayaan pendidikan sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran rata-rata lama sekolah, hal ini dimaksudkan agar mengetahui kualitas pendidikan pada masing-masing daerah sehingga terpotret ada tidaknya pengaruhnya terhadap kemiskinan menggunakan panel spasial.

Selain itu faktor sosial budaya juga menggunakan variabel pengangguran menggunakan teori Sukirno (2011) yang menyatakan dampak negatif dari pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mengurangi kekayaan yang dicapai seseorang. Dalam penelitian Mosley & Miller (2004), John & Morufu (2013), Kiaušienė (2015), Faridi et al (2016), Ucha (2010), Saunders (2002), Quy (2016), Xue & Zhong (2003) untuk melihat faktor sosial ekonomi dengan variabel pengangguran menggunakan metode OLS dan regresi panel, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan regresi panel spasial, hal tersebut bertujuan untuk melihat keterkaitan antar wilayah kabupaten dan kota apakah memiliki dependensi spasial antar daerah.

Faktor geografi dan lingkungan dalam hal ini sumber daya alam menggunakan teori kutukan sumber daya alam Richard M Auty & Mikesell (1998) yang menyebutkan dengan asumsi hal-hal lain yang dianggap tetap, kelimpahan sumber daya alam akan meningkatkan tingkat kesejahteraan per kapita, sehingga negara tersebut dapat berkelanjutan di masa depan. Dengan kata lain wilayah yang kaya sumber daya alam memiliki keuntungan ekonomi yang berbeda dengan wilayah yang miskin sumber daya alam. Dalam landasan empiris terkait faktor geografi dan lingkungan yang dikemukakan Ge et al (2021) sumber daya alam menggunakan proxy lahan subur sedangkan penelitian ini menggunakan share sektor pertanian, karena di Provinsi Jawa Timur sendiri khususnya wilayah pantai selatan dan pantai Utara merupakan daerah agraris. Beberapa penelitian memproxikan sumber daya alam dengan kondisi topografi daerah M. Liu et al (2022), Gao et al (2020), X. Chen et al (2015) menggunakan metode *geographically weighted regression* (GWR) sedangkan penelitian ini menggunakan share sektor pertanian

dengan metode yang berbeda yaitu menggunakan panel spasial, hal ini bertujuan karena wilayah pantai utara dan pantai selatan merupakan wilayah agraris dengan lahan pertanian produktif yang sangat besar sekali sehingga memungkinkan hal ini untuk diteliti lebih lanjut pengaruhnya terhadap kemiskinan.

Faktor personal dan fisik seperti kesehatan disebutkan dalam teori Todaro & Smith (2003) berpendapat bahwa kesehatan dan pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan pendidikan bagi kehidupan masyarakat. Beberapa studi empiris variabel kesehatan juga diteliti oleh Gupta & Mitra (2004), D. Bloom & Canning (2003), Buddelmeyer & Cai (2009), Grant (2005), Novignon et al (2012), Gragnolati & Marini (2003), Gounder & Xing (2012), Weziak-Bialowolska (2016), Szwarcwald et al (2000), W. Liu et al (2020) juga menggunakan metode OLS dan regresi panel, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan regresi panel spasial, hal tersebut bertujuan untuk melihat keterkaitan antar wilayah kabupaten dan kota apakah memiliki dependensi spasial antar daerah.

Faktor keterbatasan akses yang diproxikan menggunakan aksesibilitas dalam penelitian Xu et al (2019) diukur menggunakan kepadatan jaringan jalan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pemanfaatan jaringan jalan yang menggunakan indeks aksesibilitas yaitu panjang jalan dibagi dengan jumlah penduduk. Dalam penelitian Liang et al (2022), Sugasawa (2019), Minot et al (2006), Pozzi et al (2009), Cahyadi et al (2020) aksesilitas yang dimaksud yaitu aksesibilitas ekonomi, aksesibilitas pasar, aksesibilitas lalu lintas, aksesibilitas pendidikan, aksesibilitas jalan dengan mengukur jarak antar fasilitas ekonomi sedangkan dalam penelitian ini berbeda yaitu aksesibilitas jalan yang diukur dengan indeks aksesibilitas yang mengukur panjang jalan dibagi dengan jumlah penduduk hal ini tentunya untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pantai utara dan selatan. Kajian landasan teori dan landasan empiris terlihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 3. Landasan Teoritis dan Landasan Empiris Penelitian

No	Landasan Teori	Landasan Empiris	Keterangan
1	Teori Kemiskinan Keynes (1936)	Xu et al (2019), Ge et al (2021), X. Chen et al (2015), Gao et al (2020), M. Liu et al (2022), Liang et al (2022),	Landasan empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang kemiskinan dan dependensi spasial kemiskinan, namun dalam penelitian diatas belum ada yang menggunakan pendekatan spasial khususnya panel spasial, dan belum ada juga yang menggunakan teori kemiskinan spasial dalam landasan teorinya. Selain itu masing-masing proxy yang digunakan juga berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini mencoba mengembangkan kemiskinan dari aspek spasial dengan menggabungkan 5 faktor kemiskinan. Di dalam beberapa penelitian juga membahas beberapa faktor kemiskinan secara terpisah, sedangkan didalam penelitian ini dibahas kelima faktor tersebut secara bersama, kemudian membandingkan antara kelima faktor tersebut manakah kira-kira yang paling berperan penting dalam menentukan penurunan kemiskinan, selain itu penelitian ini akan membandingkan kedua wilayah yaitu wilayah pantura dan wilayah pansela, dari kedua wilayah tersebut faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan
2	Teori Kemiskinan Spasial (Alfred Marshall (1920) dikembangkan oleh Bradshaw (1998)	Martens & Bastiaanssen (2019), Ahlström et al (2011), Edith et al (2011), Amaliah & Ulimaz (2021), Sugasawa (2019), Minot et al (2006), Pozzi et al (2009), Cahyadi et al (2020), Birungi et al (2005),	
3	Teori Faktor Kemiskinan Booth (1998)	Ge et al (2021), Schleicher et al (2018), Malerba (2020), Mosley & Miller (2004), John & Morufu (2013), Faridi et al (2016), Ucha (2010), Saunders (2002), Quy (2016), Xue & Zhong (2003), Hofmarcher (2021), Garza-Rodriguez et al (2021), Mohanty & Swain (2019), Peng et al (2019), D. E. Bloom et al (2006), Suario & Subayil (2020), Zhang (2014), Barham et al (1995), Bonal (2007), Tilak (2007), Gupta & Mitra (2004), D. Bloom & Canning (2003), Buddelmeyer & Cai (2009), Grant (2005), Novignon et al (2012), Gagnolati & Marini (2003), Gounder & Xing (2012), Weziak-Bialowolska (2016), Szwarcwald et al (2000), W. Liu et al (2020), Adams Jr (2004), Permadi (2018), Dollar et al (2016), Marrero & Servén (2022), Adeleye et al (2020), Hassan et al (2015), Fosu (2017), Perera & Lee (2013), Wan et al (2021), X. Chen et al (2015).	

Sumber : Teori dan Penelitian terdahulu, 2022

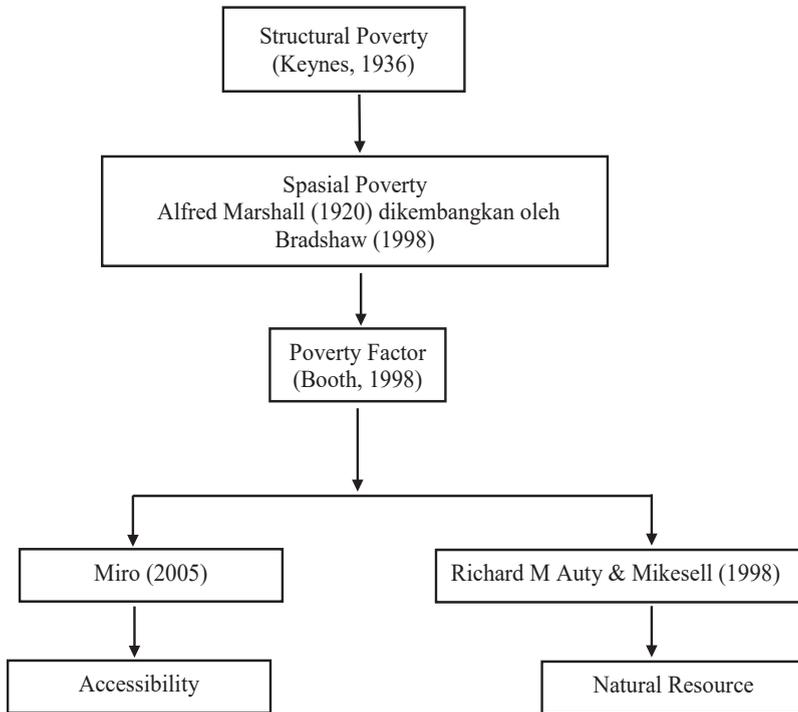
Untuk membangun suatu kerangka sintesis dibutuhkan dua atau lebih dimensi teori yang mendukung penelitian ini, yang *pertama* teori kemiskinan J.M. Keynes (1936) yang merujuk pada teori demokrasi sosial. Teori demokrasi sosial tidak melihat kemiskinan sebagai masalah individu tetapi melihat kemiskinan sebagai permasalahan struktural. Kemiskinan Struktural menurut pandangan Keynes merupakan permasalahan yang disebabkan oleh struktur tatanan sosial ekonomi yang mengakibatkan terbatasnya akses beberapa kelompok terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan sosial.

Yang *kedua* teori menggunakan teori kemiskinan spasial yang berasal dari teori aglomerasi ekonomi (Alfred Marshall, 1920) yakni menjelaskan seberapa kedekatan atau konsentrasi perusahaan serupa menarik layanan dan pasar yang mendukung, yang selanjutnya menarik lebih banyak perusahaan. Sebaliknya, di mana ada kemiskinan dan kondisi kemiskinan justru menghasilkan lebih banyak kemiskinan didaerah sekitarnya atau yang berdekatan (Bradshaw, 2006). Menurut Bird, Higgins, & Harris (2010) kemiskinan spasial merupakan kondisi di mana modal geografis (fisik, alam, sosial, politik dan modal manusia suatu daerah) rendah dan kemiskinan tinggi, sebagian sebagai akibat dari ketidakberuntungan geografis.

Dan yang *ketiga*, dalam melihat faktor kemiskinan penelitian ini menggunakan teori Booth (1998) berpendapat bahwa beberapa faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan yang belum banyak dibahas adalah faktor geografi dan lingkungan menurut Richard M Auty & Mikesell (1998) yang menyebutkan kelimpahan sumber daya alam akan meningkatkan tingkat kesejahteraan per kapita, sehingga negara tersebut dapat berkelanjutan di masa depan. Dengan kata lain wilayah yang kaya sumber daya alam memiliki keuntungan ekonomi yang berbeda dengan wilayah yang miskin sumber daya alam, dalam hal ini wilayah pansela yang memiliki kekayaan sumber daya alam justru terjebak dalam kemiskinan yang lebih besar dibandingkan wilayah pantura, yang pada gilirannya akan menghasilkan sebuah *novelty* faktor

geografi dan lingkungan yang belum banyak dibahas dalam beberapa penelitian lain yaitu sumber daya alam. Adapun sumber daya alam yang dimaksudkan adalah share sektor pertanian terhadap PDRB, mengapa share sektor pertanian terhadap PDRB yang di jadikan proxy dalam penelitian ini karena di wilayah pantura dan pansela Provinsi Jawa Timur merupakan daerah agraris yang memiliki share sektor pertanian produktif yang besar.

Faktor Aksesibilitas juga belum banyak dibahas dalam faktor penyebab kemiskinan. Aksesibilitas Menurut Miro (2005) aksesibilitas adalah konsep yang menyatukan (menghubungkan) sistem tata guna lahan geografis dengan sistem jaringan transportasi yang saling berhubungan dimana perubahan tata guna lahan yang menciptakan zona dan jarak geografis dalam suatu wilayah atau kota dapat dengan mudah dihubungkan oleh infrastruktur atau penyedia transportasi. Sedangkan aksesibilitas yang dimaksudkan adalah aksesibilitas jalan yang diukur dengan pemanfaatan jaringan jalan, dalam hal ini menggunakan indeks aksesibilitas yaitu panjang jalan dibagi dengan jumlah penduduk, hal ini bertujuan untuk untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pantura dan pansela, karena selama ini prioritas pembangunan jalan lebih banyak digunakan untuk wilayah pantura dibandingkan wilayah pansela. Hal ini sekaligus sebagai *novelty* dalam penelitian karena belum ada penelitian yang membahas aksesibilitas khususnya pemanfaatan jaringan jalan yang dikaitkan dengan kemiskinan.



Gambar 7. Kerangka Sintesis

Sumber : Teori dan Penelitian Terdahulu, 2023

B. Konseptualisasi

Konsep penelitian yang pertama menggunakan konsep spasial, yakni wilayah kemiskinan satu daerah terdapat dependensi antar kemiskinan daerah lain . Teori kemiskinan spasial yang berasal dari teori aglomerasi ekonomi (Alfred Marshall, 1920) yakni menjelaskan seberapa kedekatan atau konsentrasi perusahaan serupa menarik layanan dan pasar yang mendukung, yang selanjutnya menarik lebih banyak perusahaan. Sebaliknya, di mana ada kemiskinan dan kondisi kemiskinan justru menghasilkan lebih banyak kemiskinan didaerah sekitarnya atau yang berdekatan (Bradshaw, 2006).

Yang kedua menggunakan faktor kemiskinan menggunakan enam faktor penyebab kemiskinan (Booth, 1998) yaitu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, sumber daya alam, kesehatan dan aksesibilitas. Menurut Kuznets (1955) pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsurangsur berkurang.

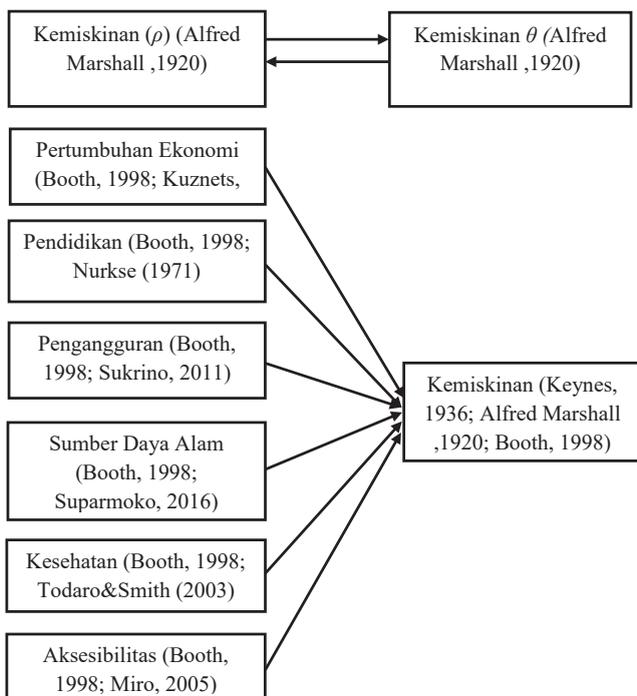
Sementara Nurkse (1971) menyatakan bahwa pendidikan mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas sumber daya yang rendah pula. Ketika kualitas sumber daya yang ada rendah akan berdampak pada produktivitas yang menurun. Menurunnya produktivitas akan mempengaruhi upah yang rendah sehingga menyebabkan bertambahnya kemiskinan.

Menurut Sukirno (2011) dampak negatif dari pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mengurangi kekayaan yang dicapai seseorang. Tentu saja, ketika kekayaan orang turun karena pengangguran, kemungkinan mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan yang tinggi.

Selain itu faktor kemiskinan yaitu sumber daya alam, terbatasnya tingkat output di negara yang pendapatannya rendah antara lain disebabkan oleh terbatasnya sumber daya alam yang tersedia, baik dalam arti kuantitas maupun jenisnya. Tanpa adanya sumber alam yang minimum di negara itu, maka akan tidak banyak harapan untuk adanya perkembangan ekonomi (Suparmoko, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu kesehatan. Todaro & Smith (2003) berpendapat bahwa kesehatan dan pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga. Kedua hal tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai intii makna pembangunan yang sebenarnya.

Aksesibilitas terhadap layanan infrastruktur seperti jalan menunjukkan semakin jauh seseorang mengakses layanan infrastruktur maka semakin tinggi tingkat kemiskinan Miro (2005). Hal tersebut menandakan bahwa semakin baik aksesibilitas seseorang terhadap infrastruktur fisik maka akan memudahkan seseorang tersebut lepas dari jeratan kemiskinan. Maka kerangka konseptual penelitian dapat disajikan dalam Gambar 8 berikut :



Gambar 8. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Kajian Teori, 2023

C. Pengembangan Hipotesis

1. Dependensi Spasial Kemiskinan

Dalam teori aglomerasi Marshall disebutkan bahwa industri akan memilih lokasi untuk kegiatan produksinya dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan memperoleh banyak keuntungan dengan

adanya pendirian sebuah industri tersebut dan akan menarik beberapa perekonomian masyarakat sekitar. Dalam teori kemiskinan spasial dijelaskan bahwa adanya kemiskinan disuatu daerah justru akan menarik kemiskinan daerah lain disekitarnya.

Studi yang dilakukan oleh Cahyadi, Wibisono, Syamsulhakim, & Setiawan (2020) menemukan bahwa terdapat dependensi spasial kemiskinan di tingkat kecamatan di Indonesia bersifat klaster dan terdapat klaster kemiskinan yang kuat. Setiap klaster memiliki geografis yang berbeda, sehingga kemiskinan di beberapa kecamatan berpengaruh terhadap kecamatan yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Akinyemi & Bigirimana (2012) yang mengukur kemiskinan spasial dari empat indikator kemiskinan yaitu pengeluaran, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan, dalam temuannya menunjukkan terdapat pola kemiskinan dan adanya dikotomi kota-desa secara spasial. Higgins, Bird, & Harris (2010) berpendapat bahwa dimensi spasial kemiskinan menjadi wacana bagi pembuat kebijakan, dalam hal meninjau bagaimana dimensi spasial dari fitur kemiskinan dan sebagai serangkaian wacana kebijakan pembangunan untuk mengatasi perangkat kemiskinan.

Di sebagian besar negara, kemiskinan secara geografis terkonsentrasi di beberapa wilayah, faktor-faktor geografis yang berbeda dan pengaruhnya terhadap kemiskinan tingkat desa dapat membantu menjelaskan pola spasial berkelompok (M. Liu et al., 2021) (Gamboa, Barona, & Estrella, 2021).

H1 : Terdapat dependensi spasial kemiskinan antar wilayah

2. Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menurut Kuznets menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif. Sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan pemerataan pendapatan tidak akan mampu mengurangi jumlah

penduduk miskin, untuk itu perlu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat (Suparmoko, 2008).

Selain itu pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor sosial ekonomi yang juga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Beberapa riset membuktikan adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Adams Jr (2004), Adeleye et al (2020), Fosu (2017), Perera & Lee (2013), Wan et al (2021) menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Permadi (2018) mengungkapkan bahwa di antara sektor manufaktur, pertanian, dan jasa, manufaktur lah yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Marrero & Servén (2021) menyatakan korelasi antara pertumbuhan dengan kemiskinan bersifat negatif. Berdasarkan argumentasi dan kajian literatur diatas maka peneliti mengajukan hipotesis :

H2 : Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan

3. Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Pendidikan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Nurkse (1971) menyatakan bahwa pendidikan mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas sumber daya yang rendah pula. Ketika kualitas sumber daya yang ada rendah akan berdampak pada produktivitas yang menurun. Menurunnya produktivitas akan mempengaruhi upah yang rendah sehingga menyebabkan bertambahnya kemiskinan.

Dalam artikelnya Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, World Bank (2007) menyatakan bahwa pendidikan yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penentu kemiskinan. Pendidikan yang memadai dan pendapatan yang tinggi juga terkait dengan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Dengan kata lain, peningkatan tingkat pendidikan dapat menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan tingkat pendidikan terendah.

Sedangkan faktor sosial budaya yang lain yaitu pendidikan, pendidikan memiliki peran penting dalam pengurangan tingkat

kemiskinan. Seperti yang dikemukakan oleh D. E. Bloom et al (2006) yang berpendapat bahwa pendidikan secara luas diakui memainkan peran utama melalui pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan dapat dianggap sebagai investasi pembangunan dan hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sebagai pengembangan dari bidang lain, pendidikan adalah salah satu bidang utama setelah kesehatan dan ekonomi. Sejalan dengan Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe (2014) yang mengungkapkan pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, hal serupa dikemukakan oleh K.-M. Chen & Wang (2015), Mai & Mahadevan (2016), Bici (2017) mengatakan bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan melalui perbaikan sumberdaya manusianya (*human capital*).

Hofmarcher (2021) menyatakan efek pengurangan kemiskinan yang besar secara ekonomi dari pendidikan. Hal ini berlaku untuk beberapa ukuran kemiskinan objektif, yang bersifat absolut dan relatif, dan ukuran kemiskinan subjektif. Garza-Rodriguez et al (2021), Tilak (2007) menyatakan salahsatu menurunnya rumah tangga miskin disebabkan oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah dasar, lebih lanjut Mohanty & Swain (2019) menyatakan tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan salahsatu penentu utama kemiskinan. Setiap masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah meningkatkan kemungkinan menjadi miskin Peng et al (2019), D. E. Bloom et al (2006) berpendapat berinventasi dalam pendidikan tersier dapat mempercepat difusi teknologi, yang akan mengurangi kesenjangan pengetahuan dan membantu mengurangi kemiskinan di suatu wilayah. Berdasarkan kajian literature dan beberapa argumen diatas maka peneliti mengajukan hipotesis :

H3 : Pendidikan Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan

4. Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Menurut Sukirno (2004), dampak negatif dari pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mengurangi kekayaan yang dicapai seseorang. Tentu saja, ketika kekayaan orang turun

karena pengangguran, kemungkinan mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan yang tinggi. Ketika pengangguran sangat tinggi di suatu negara, akan selalu ada kerusuhan politik dan sosial, yang secara serius mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi.

Menurut Arsyad (2010), anggapan bahwa setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah orang miskin adalah salah, sedangkan orang yang bekerja penuh waktu adalah orang kaya. Karena terkadang ada pekerja di perkotaan yang tidak sukarela bekerja karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka anggap di bawah standar dan melakukannya karena mereka memiliki sumber lain yang dapat membantu masalah keuangan mereka.

Faktor sosial budaya memiliki pengaruh yang meningkat secara signifikan terhadap kemiskinan dari waktu ke waktu, terutama yang diprosikan menggunakan jumlah pengangguran M. Liu et al (2022), Ucha (2010), Xue & Zhong (2003), karena diyakini seseorang yang mempunyai pekerjaan akan mampu menurunkan resiko kemiskinan Mosley & Miller (2004), Faridi et al (2016). Pengangguran juga diyakini tidak hanya menyebabkan kemiskinan namun juga menyebabkan ketidakamanan (John & Morufu, 2013). Saunders (2002) berpendapat bahwa pengangguran meningkatkan risiko kemiskinan dan berkontribusi pada ketidaksetaraan, dan hal itu juga menimbulkan serangkaian efek sosial yang melemahkan para penganggur itu sendiri, keluarga mereka, dan komunitas tempat mereka tinggal. Berdasarkan ulasan literatur dan beberapa penelitian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis:

H4 : Pengangguran Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan

5. Sumber Daya Alam Terhadap Kemiskinan

Sumber daya alam memainkan peran khusus dalam kehidupan masyarakat miskin (USAID, 2006). Lebih dari 1,3 miliar masyarakat bergantung pada perikanan, hutan, dan pertanian dalam pekerjaannya hampir setengah dari semua pekerjaan di seluruh dunia. Menurut Bank

Dunia, pada tahun 2002, 90 persen dari 1,1 miliar dunia miskin mereka yang hidup dengan kurang dari \$1 per hari bergantung pada hutan untuk setidaknya sebagian dari pendapatan mereka.

Faktor tanah dan sumber daya alam sangat penting untuk menentukan proses pembangunan ekonomi negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam dan dengan tanah yang subur sangat memungkinkan ada produktivitas pertanian yang tinggi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada fase pembangunan ekonomi berikutnya, produktivitas pertanian yang meningkat memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan sektor lain seperti industri dan jasa.

Pada umumnya orang menerangkan bahwa kemunduran suatu perekonomian ataupun adanya kesempatan untuk berkembang bagi suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut. Bahkan sampai saat ini masih ada orang yang mengatakan bahwa suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukupnya sumberdaya alam yang dimilikinya. sumber daya alam menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Wright & Czelusta (2004). Hal tersebut pula diungkapkan oleh Richard M Auty & Mikesell (1998) yang menyebutkan dengan asumsi hal-hal lain yang dianggap tetap, kelimpahan sumber daya alam akan meningkatkan tingkat kesejahteraan per kapita, sehingga negara tersebut dapat berkelanjutan di masa depan. Dengan kata lain wilayah yang kaya sumber daya alam memiliki keuntungan ekonomi yang berbeda dengan wilayah yang miskin sumber daya alam.

Faktor sumber daya alam merupakan faktor dimana terdapat hubungan antara tujuan utama pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan manusia, dan lingkungan alam Schleicher et al (2018), Gray & Moseley (2005). Lebih lanjut Malerba (2020) menyebutkan terdapat korelasi antara faktor lingkungan dengan kejadian kemiskinan.

Lebih lanjut Zhou & Xiong (2018), Gao et al (2020) menyebutkan kondisi alam yang kompleks memiliki efek pendorong positif pada distribusi spasial kabupaten yang dilanda kemiskinan. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor geografi dan lingkungan yang penting

karena daerah yang memiliki tanah yang subur dan produktif tentunya akan meningkatkan perekonomian termasuk hasil-hasil pertanian. Birungi et al (2005), X. Chen et al (2015) menyatakan pentingnya lahan basah dan lahan pertanian di beberapa kecamatan tanpa keduanya maka daerah akan menjadi miskin. Selanjutnya Ge et al (2021) juga berpendapat bahwa persentase irigasi pada lahan subur merupakan faktor dominan yang menjelaskan pola spasial kemiskinan. Lebih lanjut Kassa et al (2021) menyatakan hilangnya potensi dan lahan pertanian yang ada akibat kekeringan, banjir, dan degradasi lahan mempengaruhi sebagian besar kemiskinan. Berdasarkan kajian literatur dan argumentasi beberapa penelitian, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

H5 : Sumber Daya Alam Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan

6. Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan adalah dasar untuk mencapai kedamaian dan keamanan individu. Tingkat kesehatan yang tinggi dapat digunakan untuk mengendalikan segala penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya. Masalah ekonomi utama yang terkait dengan kemiskinan adalah masalah kesehatan (OECD). Ketika orang mengalami kemiskinan, mereka lebih rentan terhadap penyakit. Rumah tangga terjebak dalam spiral ke bawah kehilangan pendapatan dan berjuang untuk membayar biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Sebaliknya, individu yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, rata-rata investasi dalam dan luar negeri, modal manusia, rata-rata tabungan nasional dan demografi negara (OECD).

Dalam hal kesehatan, yang dikaitkan dengan kemiskinan, seperti yang terjadi saat itu akibat krisis ekonomi, reaksi masyarakat bermacam-macam, seperti: orang miskin cenderung menghindari layanan rawat jalan, menunda layanan rumah sakit, menghindari layanan spesialis yang mahal, mempersingkat masa tinggal di rumah sakit, membeli setengah

atau bahkan sepertiga dari obat yang diresepkan untuk menghindari perawatan penuh, mencari perawatan lokal, yang terkadang dapat menimbulkan efek berbahaya. Ibu biasanya melahirkan di rumah dengan bantuan dukun bayi yang meningkatkan resiko melahirkan, penyakit menjadi kronis karena terhindar dari pengobatan yang mahal (Suryawati, 2005).

Selain itu kesehatan juga dapat menjadi peluang dalam pengurangan tingkat kemiskinan, hal ini disampaikan oleh Gupta & Mitra (2004) yang menyatakan pengeluaran kesehatan per kapita jelas dan positif mempengaruhi status kesehatan dan hasilnya tampak menunjukkan bahwa kemiskinan menurun sebagai respons terhadap peningkatan status kesehatan. Sejalan dengan D. Bloom & Canning (2003) yang berpendapat bahwa terdapat pengaruh besar peningkatan kesehatan terhadap pendapatan rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi dan menjadikannya alat penting untuk pengurangan kemiskinan.

Disamping itu Buddelmeyer & Cai (2009), Gounder & Xing (2012) menyebutkan ada hubungan 2 arah antara kesehatan dengan kemiskinan, secara khusus ditemukan bahwa keluarga yang dikepalai oleh orang yang sakit lebih banyak cenderung berada dalam kemiskinan dibandingkan dengan keluarga yang dikepalai oleh orang yang sehat. Di sisi lain, kepala keluarga yang keluarganya berada dalam kemiskinan pada tahun berjalan lebih mungkin untuk mengalami sakit pada tahun berikutnya dibandingkan dengan kepala keluarga yang keluarganya tidak miskin. Grant (2005) juga berpendapat orang-orang termiskin sebagian besar hampir selalu mengalami morbiditas yang lebih tinggi, rata-rata meninggal lebih muda dan mengalami tingkat kematian ibu dan anak yang lebih tinggi, hal ini mencerminkan pada tahun-tahun berikutnya kemiskinan akan lebih parah karena terkait masalah kesehatan jangka Panjang. Senada dengan Novignon et al (2012) yang menyatakan bahwa status kesehatan mempengaruhi kerentanan terhadap kemiskinan karena kemungkinan terjadinya penyakit dimasa mendatang akan berkurang untuk rumah tangga. Weziak-Bialowolska (2016), W. Liu et al (2020) juga

berpendapat Kesehatan memiliki hubungan erat terhadap kemiskinan, sama seperti Szwarcwald et al (2000) yang menyatakan kondisi kesehatan yang buruk terkonsentrasi di wilayah penduduk yang kumuh, dalam hal ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan argument dan literatur tersebut maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

H6 : Kesehatan Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan

7. Aksesibilitas Terhadap Kemiskinan

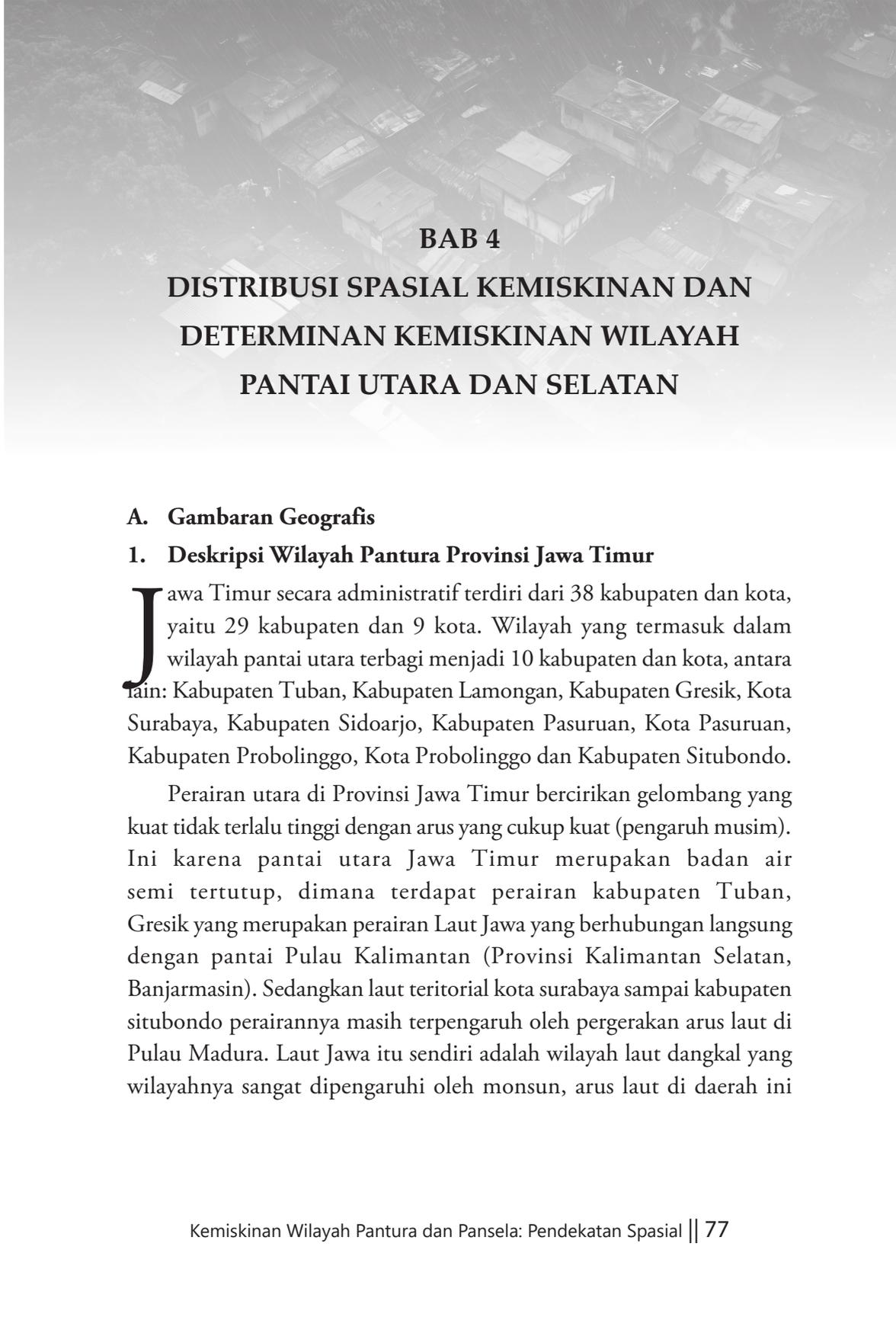
Menurut Miro (2005) aksesibilitas adalah konsep yang menyatukan (menghubungkan): Sistem tata guna lahan geografis dengan sistem jaringan transportasi yang saling berhubungan dimana perubahan tata guna lahan yang menciptakan zona dan jarak geografis dalam suatu wilayah atau kota dapat dengan mudah dihubungkan oleh infrastruktur atau penyedia transportasi.

Aksesibilitas merupakan konsep yang menghubungkan sistem pengaturan budidaya geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Konektivitas transportasi dapat dinyatakan sebagai ukuran kemudahan atau kesulitan aksesibilitas. Semuanya kemudian dinyatakan dalam bentuk jarak, waktu atau biaya (Tamin, 2000).

Pengaruh aksesibilitas terhadap heterogenitas stratifikasi spasial kemiskinan cukup signifikan, di antaranya aksesibilitas ekonomi, aksesibilitas pasar, dan aksesibilitas lalu lintas merupakan faktor pendorong utama Liang et al (2022). Lebih lanjut Martens & Bastiaanssen (2019) dan Sugasawa (2019) berpendapat daerah perkotaan berkontribusi besar terhadap kemiskinan yang disebabkan aksesibilitas. Temuan menarik juga dikemukakan oleh Ahlström et al (2011), Edith et al (2011), Minot et al (2006), Pozzi et al (2009) bahwa rumah tangga dengan perkiraan aksesibilitas tinggi ke pasar tampaknya miskin daripada rumah tangga dengan aksesibilitas tinggi ke kota. Disamping itu aksesibilitas terhadap layanan infrastruktur seperti jalan menunjukkan semakin jauh seseorang mengakses layanan infrastruktur maka semakin tinggi tingkat kemiskinan (Amaliah & Ulimaz, 2021), (Cahyadi et al., 2020).

Berdasarkan argumentasi tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H7 : Aksesibilitas Berpengaruh Negatif Terhadap Kemiskinan



BAB 4

DISTRIBUSI SPASIAL KEMISKINAN DAN DETERMINAN KEMISKINAN WILAYAH PANTAI UTARA DAN SELATAN

A. Gambaran Geografis

1. Deskripsi Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur secara administratif terdiri dari 38 kabupaten dan kota, yaitu 29 kabupaten dan 9 kota. Wilayah yang termasuk dalam wilayah pantai utara terbagi menjadi 10 kabupaten dan kota, antara lain: Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Situbondo.

Perairan utara di Provinsi Jawa Timur bercirikan gelombang yang kuat tidak terlalu tinggi dengan arus yang cukup kuat (pengaruh musim). Ini karena pantai utara Jawa Timur merupakan badan air semi tertutup, dimana terdapat perairan kabupaten Tuban, Gresik yang merupakan perairan Laut Jawa yang berhubungan langsung dengan pantai Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin). Sedangkan laut teritorial kota surabaya sampai kabupaten situbondo perairannya masih terpengaruh oleh pergerakan arus laut di Pulau Madura. Laut Jawa itu sendiri adalah wilayah laut dangkal yang wilayahnya sangat dipengaruhi oleh monsun, arus laut di daerah ini

memiliki kecepatan relatif perubahan musim (Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Vol 1 Utara Jawa Timur, 2016).

Wilayah Pantura terkenal dengan pintu masuk ajaran agama islam di Jawa Timur, hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Walisongo yang mayoritas berada di wilayah pantura jawa timur seperti sunan bonang di Kabuapten Tuban, sunan drajat di Kabupaten Lamongan, sunan giri di Kabupaten Gresik dan sunan ampel di Kota Surabaya.

Masyarakat di wilayah timur-selatan utara Jawa Timur seperti Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo sering disebut sebagai daerah tapal kuda) adalah daerah yang sangat dipengaruhi atau dipengaruhi oleh adat istiadat orang Madura. Jadi pada umumnya masyarakat di daerah ini punya dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan Madura.

2. Deskripsi Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur

Sedangkan wilayah yang termasuk daerah pansela terdiri dari 8 Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.

Pansela Jawa Timur memiliki deretan perbukitan terbentang dari Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan berakhir di Malang. Pegunungan tersebut merupakan pegunungan kapur yang lanjutan dari Pegunungan Sewu. Secara keseluruhan, wilayah ini memiliki iklim tropis lembab dengan curah hujan rata-rata 1900 mm per tahun.

Wilayah Pansela berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, di mana karakter oseanografi cenderung keras, gelombang dan arus tinggi mencacah, hal tersebut mengakibatkan kelangsungan hidup ekosistem pesisir seperti Terumbu karang, lamun, dan bakau cenderung tidak berkembang. Beberapa potensi yang bisa dikembangkan di daerah ini adalah industri perikanan dan pariwisata (Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Vol 2 Selatan Jawa Timur, 2016).

Produksi tangkapan ikan terapung di Provinsi Jawa Timur sangat tinggi tergantung pada produksi wilayah pesisir selatannya, antara lain Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Malang dan Banyuwangi. Makanan

utamanya adalah ikan. Ikan terapung di pesisir selatan Jawa Timur antara lain tuna, tongkol dan cakalang, ketiga jenis ikan apung ini menjadi makanan pokok, terutama di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pacitan, Trenggalek dan Malang.

Pariwisata dapat berkembang di pesisir adalah wisata bahari, khususnya wisata pantai. Ini karena pantai-pantai di sini relatif alami. Beberapa pantai bahkan menjadi destinasi utama. Penyu datang ke darat untuk bertelur, sehingga bisa menjadi destinasi ekowisata. Beberapa titik di selatan masih terdapat ekosistem terumbu karang, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat wisata untuk *snorkling* dan *diving* (Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Vol 2 Selatan Jawa Timur, 2016).

B. Potret Kemiskinan dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur

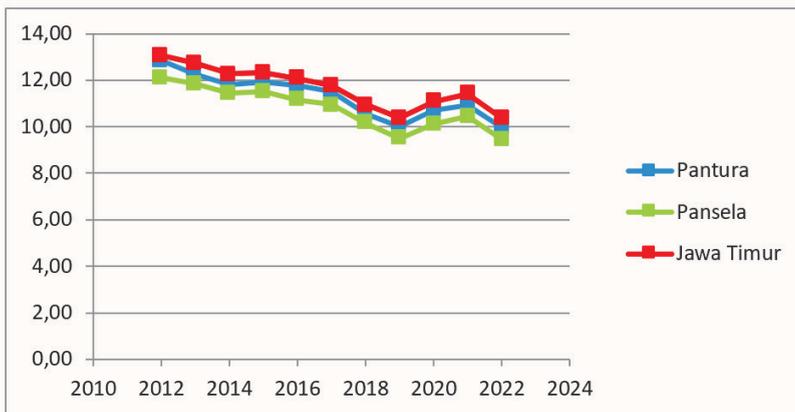
Kemiskinan menjadi permasalahan yang serius di Provinsi Jawa Timur, tak terkecuali daerah-daerah seperti wilayah pantura dan pansela. Wilayah pantura terdiri dari 10 Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya.

Berdasarkan Gambar 9 terlihat bahwa baik wilayah pantura maupun pansela rata-rata kemiskinannya terletak dibawah garis kemiskinan rata-rata Jawa Timur. Secara visual wilayah pansela lebih rendah persentase kemiskinannya dibandingkan wilayah pantura, kondisi ini disebabkan karena pansela memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya alam seperti lahan pertanian yang subur atau air tanah yang melimpah, sementara Pantura memiliki sumber daya alam laut seperti ikan dan hasil laut lainnya. Selain itu, adanya kondisi lingkungan global seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem (el nino) dan masalah lingkungan global lainnya menjadikan kedua wilayah tersebut memiliki perbedaan kemiskinan, misalnya wilayah Pansela yang lebih terbuka ke Samudera Hindia lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir atau badai

tropis, sementara wilayah Pantura lebih terpengaruh oleh kekeringan atau pola cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

Wilayah Pantura merupakan wilayah industri yang terorganisir dan berkembang baik, seperti kawasan industri rungkut di sidoarjo telah menciptakan perkembangan industri dan investasi yang pesat. Disamping itu, wilayah tersebut terdapat pembangunan infrastruktur yang meningkat seperti jaringan transportasi yang lancar dan akses ke air bersih dan sanitasi yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan akses yang lebih baik ke peluang ekonomi dan sosial.

Sedangkan berbeda di wilayah pansela, secara geografis beberapa daerah dipansela memiliki ketergantungan pada sektor primer seperti sektor pertanian atau industri primer lainnya yang kurang produktif atau rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Gagal panen atau penurunan harga komoditas dapat berdampak besar pada pendapatan penduduk setempat. Adanya keterbatasan akses seperti jalan, transportasi, dan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi akses masyarakat setempat ke peluang ekonomi dan pendidikan.



Gambar 9. Rata-Rata Kemiskinan Wilayah Pantura dan Pansela Di Provinsi Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2012-2022

Adanya perbedaan tingkat kemiskinan di wilayah pantura dan pansela ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya perbedaan struktur ekonomi misalnya dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Wilayah pantura yang didominasi oleh sektor industri manufaktur memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dengan wilayah pansela yang lebih mengandalkan sektor pertanian. Perbedaan yang lain terletak pada perbedaan infrastruktur daerah, wilayah pantura memiliki infrastruktur lebih baik di bandingkan wilayah pansela, adanya akses jalan baik yang lebih besar menjadikan wilayah pantura memiliki aksesibilitas wilayah yang tinggi hal ini tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan. Adanya kondisi sosial dan budaya yang berbeda menjadikan kedua wilayah tersebut mempunyai perbedaan kondisi kemiskinan seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan kondisi pengangguran.

1. Distribusi Spasial Kemiskinan di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 10 dan Gambar 11 di bawah terlihat bahwa distribusi spasial kemiskinan Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 dan tahun 2022 tersebar di beberapa daerah.

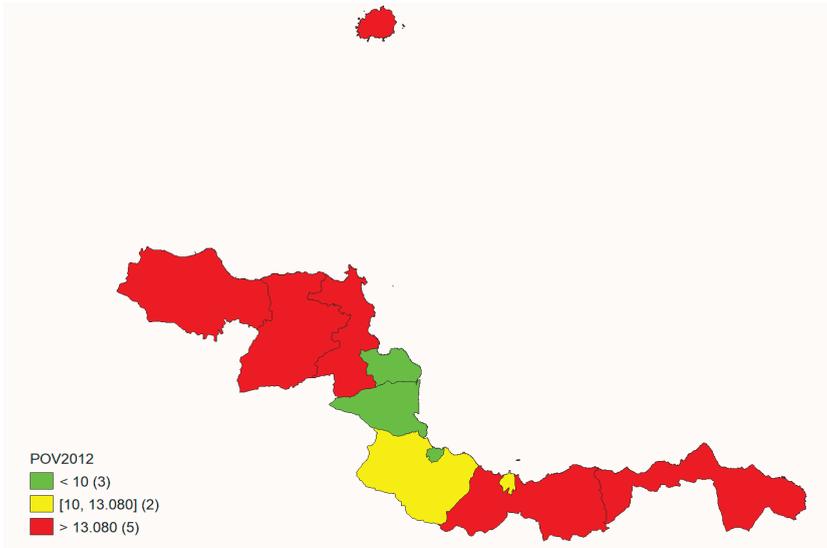
Persentase kemiskinan wilayah pantura tahun 2012 dengan nilai persentase kemiskinan diatas 13.08% (*area merah*) terletak di Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Adanya ketergantungan pada Sektor Pertanian atau Perikanan yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama di daerah-daerah ini, dan daerah tersebut menghadapi masalah seperti rendahnya produktivitas, fluktuasi harga, atau kerentanan terhadap bencana alam. Tantangan-tantangan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di sektor-sektor ini, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan pelatihan keterampilan dapat membatasi peluang ekonomi dan mobilitas sosial bagi penduduk di daerah-daerah tersebut, yang dapat menyebabkan

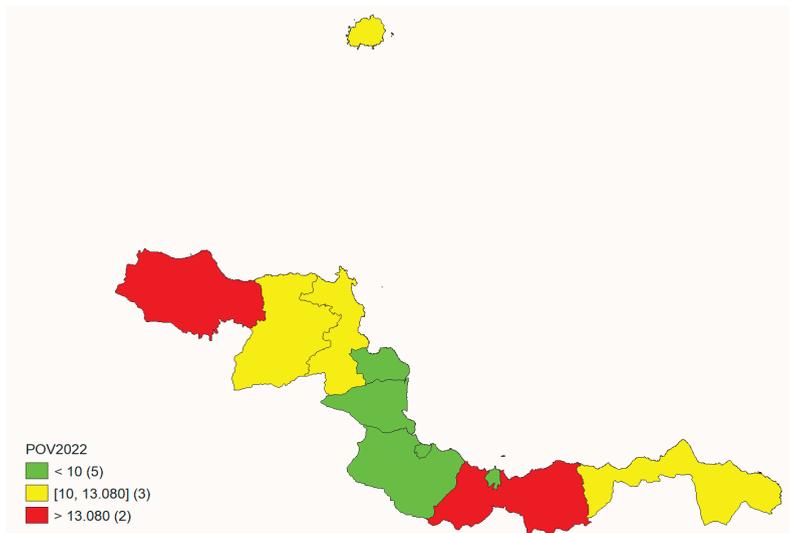
rendahnya tingkat pendapatan dan kemungkinan kemiskinan yang lebih tinggi. Selain itu, daerah-daerah tersebut juga mengalami ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Sedangkan persentase kemiskinan di wilayah pantura pada tahun 2012 dengan nilai persentase antara 10-13.08% (*area kuning*) terletak pada Kota Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Struktur ekonomi Kota Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan belum sepenuhnya berkembang, terutama dalam hal diversifikasi sektor ekonominya. Ketika terlalu bergantung pada sektor ekonomi tertentu, fluktuasi harga atau kondisi pasar dapat memengaruhi pendapatan dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kemiskinan moderat di Kota Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan juga dapat disebabkan oleh ketergantungan pada bidang ekonomi tertentu, seperti pertanian atau industri yang rentan terhadap perubahan pasar atau iklim.

Persentase kemiskinan di wilayah pantura pada tahun 2012 dengan nilai persentase kemiskinan dibawah 10% (*area hijau*) terletak di Kota Pasuruan, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Ketiga daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik dengan akses yang baik ke pusat-pusat perekonomian dan pelabuhan utama di provinsi Jawa Timur, hal ini tentunya dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi pada daerah tersebut sehingga akan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Selain itu, ketiga daerah tersebut memiliki infrastruktur yang lebih berkembang dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Timur, adanya jaringan transportasi yang baik, fasilitas kesehatan, pendidikan yang memadai dan akses ke pelayanan dasar baik akan meningkatkan kualitas hidup sehingga akan membantu mengurangi kemiskinan.



Gambar 10. Distribusi Spasial Kemiskinan di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012



Gambar 11. Distribusi Spasial Kemiskinan di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Sedangkan persentase kemiskinan di wilayah pantura pada tahun 2022 terbagi menjadi tiga area, yakni area merah, kuning dan hijau.

Persentase kemiskinan dengan nilai persentase kemiskinan >13.08% (*area merah*) terletak di Kabupaten Tuban dan Probolinggo. Kedua daerah tersebut memiliki ketergantungan pada Sektor Pertanian atau Perikanan yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama di daerah-daerah tersebut, daerah tersebut juga menghadapi masalah rendahnya produktivitas, fluktuasi harga, atau kerentanan terhadap bencana alam. Tantangan-tantangan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di sektor-sektor ini, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Area kuning dengan nilai persentase kemiskinan pantura tahun 2022 antara 10-13.08% terletak di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Situbondo. Ketiga kabupaten tersebut memiliki struktur ekonomi yang beragam, dengan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa yang cukup berkembang. Diversifikasi ekonomi ini dapat membantu mengurangi risiko kemiskinan karena ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Ketiga wilayah tersebut juga memiliki akses ekonomi yang baik ke pusat perekonomian di Jawa Timur yang pada akhirnya dapat memfasilitasi akses investasi dan perdagangan.

Nilai persentase kemiskinan pantura tahun 2022 dengan nilai di bawah 10% (*area hijau*) terletak di Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi, kota-kota dan kabupaten tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih pesat. Pertumbuhan ini meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, dan secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, Kota dan kabupaten tersebut memiliki akses yang baik ke pusat ekonomi utama Jawa Timur, seperti Surabaya. Penduduk setempat memiliki akses ke perdagangan, investasi, dan kesempatan kerja berkat hubungan ini.

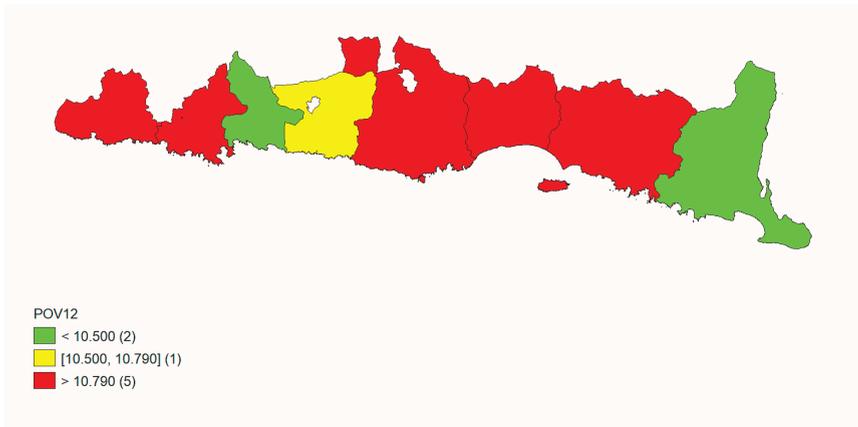
2. Distribusi Spasial Kemiskinan Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur

Berbeda dengan distribusi spasial kemiskinan di wilayah pansela tahun 2012, terlihat pada Gambar 12 dan Gambar 13 sebaran kemiskinan

>10.79% (*area merah*) terletak di Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Daerah seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang. Daerah tersebut memiliki struktur ekonomi yang beragam, meskipun beberapa kabupaten memiliki sektor ekonomi yang berkembang, sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor informal atau pertanian dengan pendapatan yang rendah. Sedangkan kondisi geografis dan topografi Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek dapat berdampak pada tingkat kemiskinan karena wilayah tersebut terdiri dari daerah pedesaan, pegunungan, atau wilayah yang sulit diakses secara infrastruktur. Kurangnya infrastruktur, termasuk jaringan transportasi dan fasilitas kesehatan, dapat menyulitkan orang untuk mendapatkan layanan dasar dan peluang ekonomi.

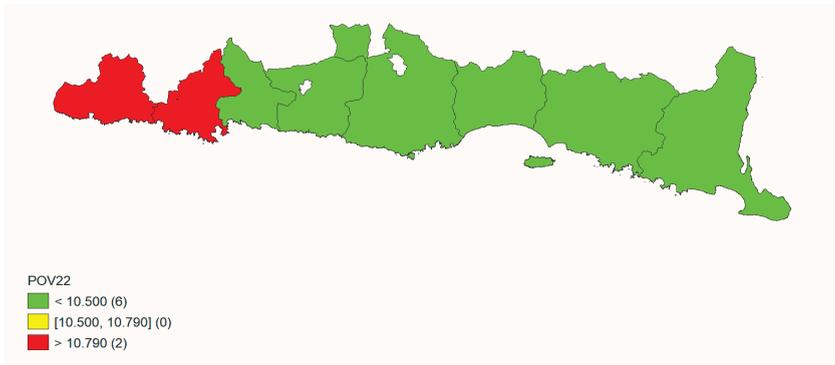
Nilai persentase kemiskinan pansela tahun 2012 yang berada antara 10.50-10.79% (*area kuning*) terletak di Kabupaten Blitar. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, struktur ekonomi Kabupaten Blitar berbeda. Ada perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi antara kota dan pedesaan. Jika Kabupaten Blitar memiliki sektor ekonomi yang lebih terfokus pada pertanian atau sektor informal, hal ini dapat berdampak pada tingkat penghasilan dan kemiskinan.

Sedangkan nilai persentase kemiskinan pansela tahun 2012 yang berada kurang dari 10.50% (*area hijau*) terletak di Kabupaten Banyuwangi dan Tulungagung. Berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, dan industri kecil dan menengah, dapat membantu mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi penduduk di Kabupaten Banyuwangi dan Tulungagung. Faktor geografis dan sosial seperti sumber daya alam yang potensial, industri kreatif, kearifan lokal dan budaya yang kuat telah berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.



Gambar 12. Distribusi Spasial Kemiskinan Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 13. Distribusi Spasial Kemiskinan Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

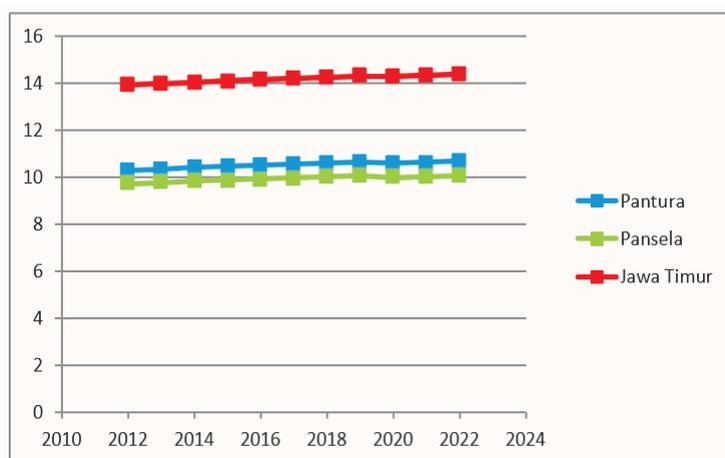
Distribusi spasial juga terlihat pada wilayah pansela tahun 2022, persentase kemiskinan dengan nilai 10.79% (*area merah*) terletak di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Secara geografis Kabupaten Pacitan dan Trenggalek terletak di daerah yang terpencil, yang dapat mempengaruhi kemudahan akses yang terhubung ke pusat ekonomi utama sehingga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

menumbuhkan potensi ekonomi lokal. Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi yang memadai dapat menjadi kendala bagi penduduk Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan layanan dasar.

Tidak ada daerah dengan persentase kemiskinan di wilayah pansela tahun 2022 dengan nilai antara 10.50-10.79% (*area kuning*). Sedangkan persentase kemiskinan di wilayah pansela tahun 2022 dengan nilai <10.500% (*area hijau*) terletak di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten tersebut telah berhasil membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi yang memadai. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi dan pengembangan ekonomi.

C. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan laju PDRB tertinggi di wilayah pantura terletak di Kota Surabaya dengan nilai rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2012-2022 sebesar 6.38%, hal ini disebabkan karena Kota Surabaya merupakan Kota dengan Ibukota provinsi di Jawa Timur sehingga pusat perekonomian terpusat di Kota Surabaya, disamping itu sektor perdagangan, sektor industri pengolahan menjadi sektor unggulan penyumbang nilai tambah barang jasa terbesar PDRB.



Gambar 14. Rata-rata Laju PDRB Di Wilayah Pantura dan Pansela di Provinsi Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012-2022

Rata-rata laju PDRB di wilayah pantura dan pansela berada dibawah nilai rata-rata laju PDRB nasional, hal ini menandakan bahwa terdapat perbedaan dalam struktur ekonomi di daerah Pantura dan Pansela dengan rata-rata laju PDRB nasional. Beberapa daerah bergantung pada sektor-sektor tertentu yang kurang produktif dibandingkan dengan sektor-sektor yang lebih dominan secara nasional. Daerah pansela sektor ekonominya masih terdapat ketergantungan pada Sektor Primer, jika sebuah daerah bergantung terlalu banyak pada sektor primer seperti pertanian atau perikanan, yang kurang berkembang atau rentan terhadap bencana alam atau perubahan iklim, hal itu dapat menghambat pertumbuhan ekonominya.

1. Distribusi Spasial Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur

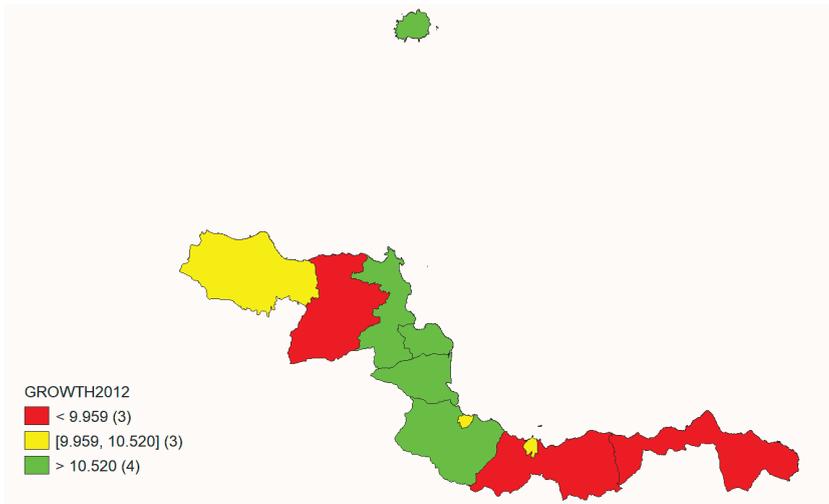
Berdasarkan Gambar 15 terlihat bahwa distribusi spasial pertumbuhan ekonomi di wilayah pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Tahun 2022 tersebar di beberapa daerah.

Berdasarkan Gambar 16 distribusi spasial pertumbuhan ekonomi pantura tahun 2012 tersebar di tiga area, yakni *area merah* (<9.95%),

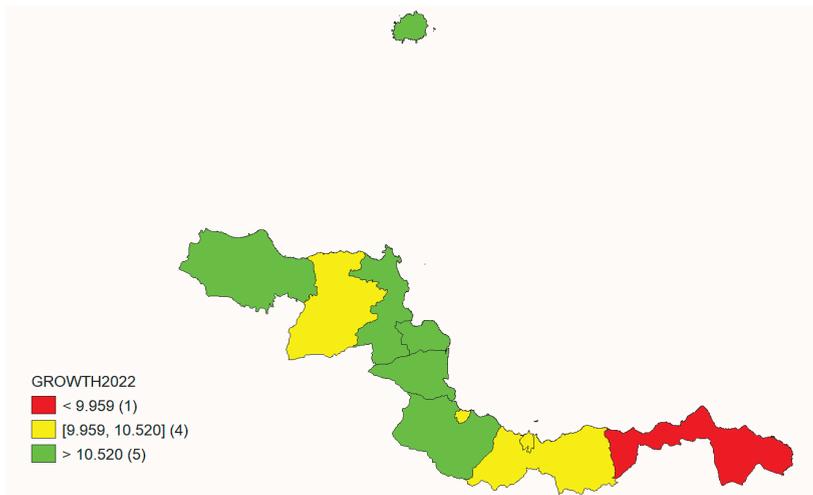
area kuning (9.95-10.52%), dan area hijau (>10.52%). Pertumbuhan ekonomi wilayah pantura yang berada di area merah (<9.95%) tersebar di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Ketiga wilayah tersebut memiliki ketergantungan pada sektor tertentu, jika sebuah daerah bergantung pada satu atau lebih sektor ekonomi tertentu yang mengalami stagnasi atau pertumbuhan yang lambat, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan daerah.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi wilayah pantura tahun 2012 yang berada di *area kuning* (9.95-10.52%) tersebar di 3 Kabupaten Kota yaitu Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Tuban. Sektor-sektor ekonomi yang dominan, seperti pertanian, industri, perdagangan, atau jasa, dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Misalnya, Pasuruan dan Probolinggo memiliki bidang perindustrian yang berkembang, sementara Tuban lebih terkonsentrasi pada pertanian atau pengolahan, hal tersebut yang menyebabkan adanya ketimpangan wilayah dan akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi wilayah pantura tahun 2012 yang berada di *area hijau* (>10.52%) tersebar di Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo. Keempat wilayah tersebut memiliki infrastruktur yang baik, yang mencakup jaringan transportasi yang terintegrasi, akses ke bandara dan pelabuhan, serta fasilitas telekomunikasi dan listrik yang memadai. Infrastruktur tersebut memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan efisien. Disamping itu, Kota Surabaya merupakan central bussiness dan industri utama di Jawa Timur. Kabupaten Gresik, Pasuruan, dan Sidoarjo juga memiliki industri yang berkembang pesat. Pusat industri dan bisnis ini akhirnya menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.



Gambar 15. Distribusi Spasial Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 16. Distribusi Spasial Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Sementara pertumbuhan ekonomi pantura tahun 2022 yang berada di **area merah** (<9.95%) tersebar di Kabupaten Situbondo. Sektor pertanian adalah mata pencaharian utama masyarakat Situbondo, jadi jika sektor pertanian menghadapi masalah seperti penyakit tanaman, harga rendah, atau cuaca ekstrim, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi wilayah pantura tahun 2022 yang berada di **area kuning** (9.95-10.52%) tersebar di 4 Kabupaten Kota yaitu Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Probolinggo. Beberapa daerah terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan seperti Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Kabupaten Lamongan lebih terkonsentrasi pada pertanian atau pengolahan, beberapa daerah yang memiliki ketergantungan pada sektor tertentu akan mengalami stagnasi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi wilayah pantura tahun 2022 yang berada di **area hijau** (>10.52%) tersebar di Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban. Kota Surabaya merupakan *central bussiness* dan industri utama di Jawa Timur. Kabupaten Gresik, Pasuruan, dan Sidoarjo dan Tuban juga memiliki industri yang berkembang pesat. Pusat industri dan bisnis ini akhirnya menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

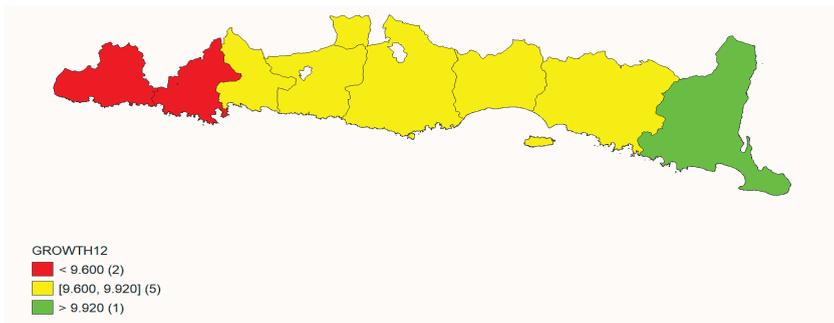
2. Distribusi Spasial Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 17 terlihat bahwa distribusi spasial pertumbuhan ekonomi di wilayah pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Tahun 2022 tersebar di 3 area yakni area merah (<9.60%), area kuning (9.60-9.92%) dan area hijau (>9.92%). Pertumbuhan ekonomi wilayah pansela tahun 2012 yang berada di **area merah** (<9.60%) tersebar di 2 daerah yakni Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Sektor

pertanian adalah bagian penting dari ekonomi Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Jika pertanian mengalami stagnasi atau pertumbuhan yang lambat karena faktor seperti cuaca ekstrem, penyakit tanaman, atau harga yang tidak menguntungkan, maka pertumbuhan ekonomi keseluruhan juga akan terhambat.

Sedangkan Pertumbuhan ekonomi wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area kuning* (9.60-9.92%) tersebar di Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung. Kelima daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang beragam, dan masing-masing memiliki sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, dan promosi pariwisata adalah cara penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Selanjutnya, Pertumbuhan ekonomi wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area hijau* (>9.92%) tersebar hanya di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, seperti Taman Nasional Baluran, Pantai Pulau Merah, dan Kawah Ijen. Upaya untuk meningkatkan pariwisata telah menarik lebih banyak wisatawan ke daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh adanya industri pariwisata terkait.



Gambar 17. Distribusi Spasial Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 18. Distribusi Spasial Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

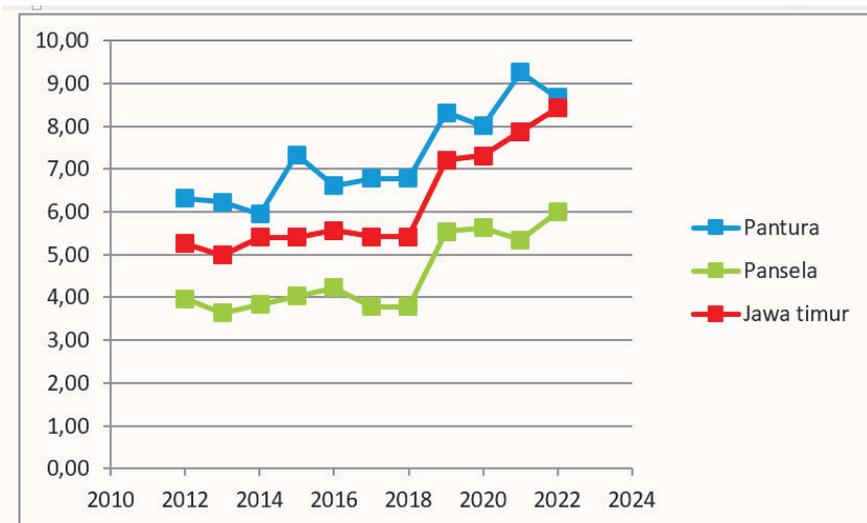
Berdasarkan Gambar 18 juga terlihat pertumbuhan ekonomi wilayah pansela tahun 2022, tidak ada pertumbuhan ekonomi wilayah pansela yang berada di *area merah* (<9.60%). Sedangkan Pertumbuhan ekonomi wilayah pansela tahun 2022 yang berada di *area kuning* (9.60-9.92%) tersebar di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Sektor pertanian adalah bagian penting dari ekonomi Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Jika pertanian mengalami stagnasi atau pertumbuhan yang lambat karena faktor seperti cuaca ekstrem, penyakit tanaman, atau harga yang tidak menguntungkan, maka pertumbuhan ekonomi keseluruhan juga akan terhambat.

Selanjutnya, Pertumbuhan ekonomi wilayah pansela tahun 2022 yang berada di *area hijau* (>9.92%) tersebar hanya di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Daerah-Daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang beragam, dan masing-masing memiliki sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, dan promosi pariwisata adalah cara penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

D. Pendidikan dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan perkembangan rata-rata pendidikan tinggi yang ditamatkan di Wilayah Pantura dan Pansela tahun 2012-2022 pada Grafik 19 menunjukkan rata-rata pendidikan yang berada di atas rata-rata pendidikan Jawa Timur yaitu wilayah pantura. Daerah Pantura memiliki aksesibilitas yang lebih baik ke fasilitas pendidikan dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti jalan raya yang baik, transportasi umum yang memadai, dan akses internet. Infrastruktur yang baik dapat mempermudah akses ke pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Di wilayah Pantura, pemerintah daerah atau organisasi swasta mungkin telah memberikan lebih banyak sumber daya dan investasi ke sektor pendidikan. Ini dapat mencakup membangun sekolah baru, memberikan pelatihan guru, menyediakan peralatan pendidikan, dan menawarkan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan.



Gambar 19. Rata-rata Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Di Wilayah Pantura dan Pansela di Provinsi Jawa Timur
Sumber : Badan Pusat Statistik 2012-2022

1. Distribusi Spasial Pendidikan Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur

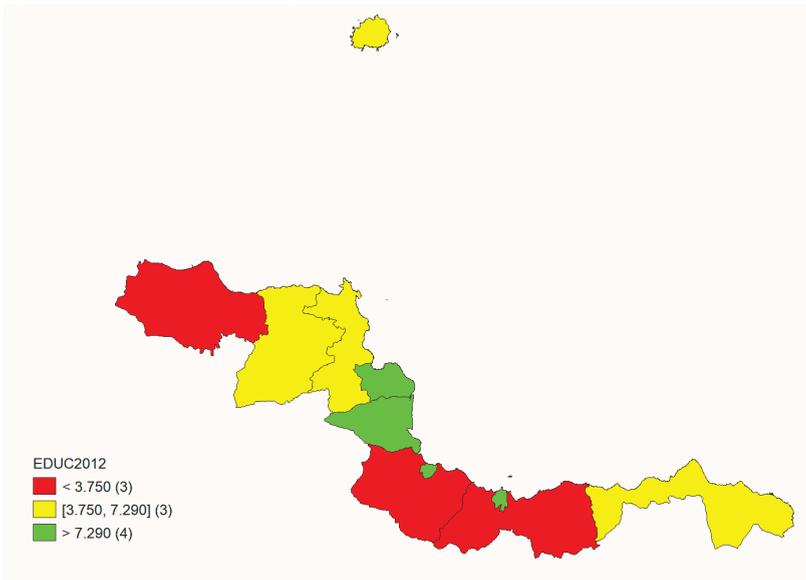
Berdasarkan peta Gambar 20 distribusi spasial pendidikan di wilayah pantura dan tahun 2012 dan 2022 tersebar di beberapa wilayah dan terbagi menjadi 3 area, (1) area merah (<3.75%), (2) area kuning (3.75-7.29%), (3) area hijau (>7.29%).

Pendidikan pantura tahun 2012 yang berada di *area merah* (<3.75%) tersebar di tiga wilayah yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Tuban. Ketiga Kabupaten ini memiliki banyak sekolah dari tingkat menengah atas hingga dasar. Meskipun demikian, kualitas pendidikan dan aksesibilitas masih rendah, terutama di daerah pedesaan. Tingkat pendidikan di beberapa kabupaten tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk tingkat kemiskinan, kekurangan infrastruktur pendidikan, dan kekurangan sumber daya manusia berkualitas tinggi.

Selanjutnya, Pendidikan pantura tahun 2012 yang berada di *area kuning* (3.75-7.29%) tersebar di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Situbondo. Kabupaten Gresik karena berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sehingga kualitas pendidikan cukup baik, sedangkan Kabupaten Lamongan walaupun pendidikan dasar sampai menengah telah tersedia namun masih terdapat banyak tantangan dalam dunia pendidikan seperti keterbatasan akses dan infrastruktur terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Sedangkan Kabupaten Situbondo terletak di pesisir utara Jawa Timur. Kualitas pendidikan di Situbondo dapat bervariasi tergantung pada berbagai hal, seperti tingkat ekonomi, infrastruktur, dan aksesibilitas. Kondisi geografisnya yang beragam, termasuk daerah pesisir dan pegunungan, akan menjadikannya sulit untuk memberikan pendidikan berkualitas.

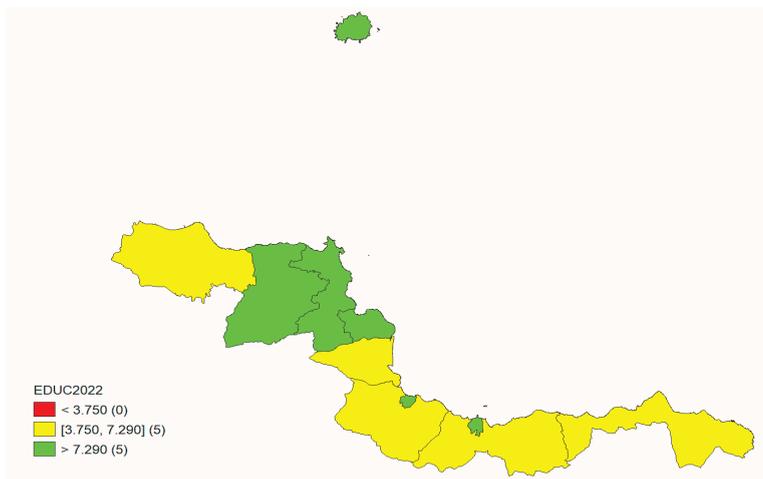
Sedangkan pendidikan pantura tahun 2012 yang berada di *area hijau* (>7.29%) tersebar di Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo. Infrastruktur pendidikan di kota-kota tersebut cenderung lebih baik, termasuk sekolah-sekolah yang memiliki

laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan fasilitas pembelajaran yang baik. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.



Gambar 20. Distribusi Spasial Pendidikan Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 21. Distribusi Spasial Pendidikan Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Berbeda dengan distribusi spasial pendidikan di wilayah pantura tahun 2022, tidak ada persentase pendidikan yang berada di *area merah*, sedangkan pendidikan pantura tahun 2022 yang berada di *area kuning* terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Tuban. Perkembangan ekonomi dan industri tertentu yang membutuhkan tenaga kerja terampil terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut. Hal ini dapat mendorong penduduk setempat untuk mengejar pendidikan tinggi untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di industri-industri tersebut.

Pendidikan di wilayah pantura tahun 2022 yang berada di *area hijau* terletak di Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten dan Kota tersebut memiliki akses ke universitas atau perguruan tinggi yang baik. Dengan adanya lembaga pendidikan tinggi ini, warga setempat dapat mengejar pendidikan tinggi tanpa meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka.

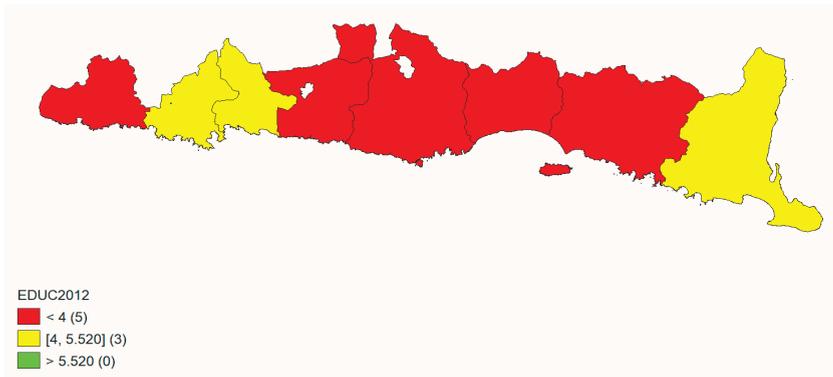
2. Distribusi Spasial Pendidikan di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan distribusi spasial pendidikan di wilayah pansela terlihat pada Gambar 22, tersebar ke beberapa wilayah dengan 3 area, yakni area merah (<4.00%), area kuning (4.00-5.52%), dan area hijau (>5.52%).

Distribusi spasial pendidikan di wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area merah* tersebar di Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pacitan. Ketimpangan sosial ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah tersebut dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Keluarga yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat memberikan dukungan keuangan atau insentif yang cukup untuk anak-anak mereka untuk belajar.

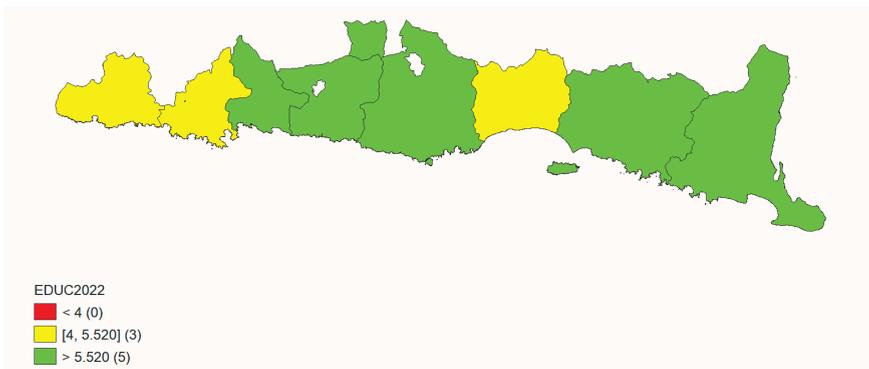
Sedangkan distribusi spasial pendidikan di wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area kuning* tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Keadaan ekonomi

yang relatif stabil di daerah tersebut dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan. Keadaan ekonomi yang baik dapat membantu keluarga mengurangi beban finansial untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, serta memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan. Berdasarkan distribusi spasial pendidikan di wilayah pansela tahun 2012, tidak ada persentase pendidikan yang berada di *area hijau*.



Gambar 22. Distribusi Spasial Pendidikan Di Wilayah Pansela Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 23. Distribusi Spasial Pendidikan Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Sama halnya, berdasarkan distribusi spasial pendidikan wilayah pansela tahun 2022, tidak ada persentase pendidikan yang berada di *area merah*. Sedangkan distribusi spasial pendidikan di wilayah pansela tahun 2022 yang berada di *area kuning* tersebar di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai adalah salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Kekurangan sekolah, fasilitas pembelajaran yang kurang memadai, kondisi bangunan sekolah yang buruk, dan kekurangan sumber daya seperti laboratorium dan buku dapat menghambat proses pembelajaran.

Selanjutnya distribusi spasial pendidikan di wilayah pansela tahun 2022 yang berada di *area hijau* tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten-kabupaten tersebut memiliki akses yang baik ke perguruan tinggi atau program pendidikan tinggi. Ketersediaan program pendidikan tinggi ini dapat memudahkan warga setempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka.

E. Pengangguran dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur

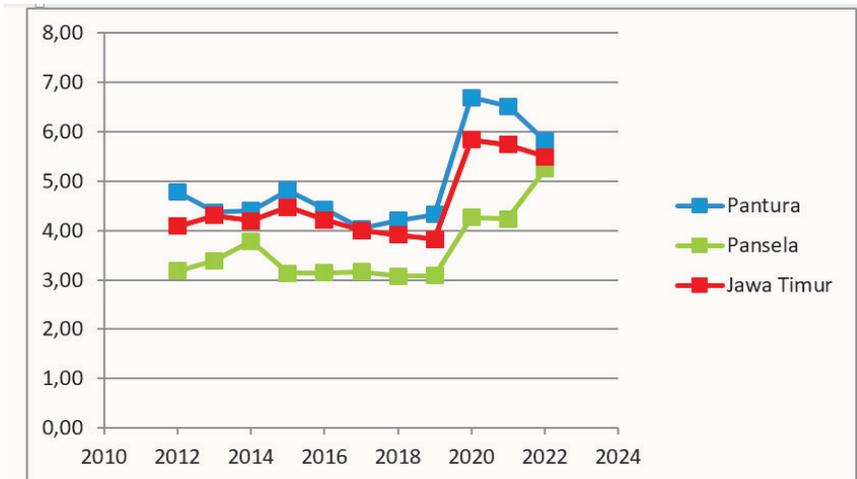
Berdasarkan rata-rata perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2022 menunjukkan perkembangan yang berbeda antar wilayah. Pantura memiliki nilai tingkat pengangguran terbuka yang berada di atas Provinsi Jawa Timur, sedangkan wilayah pansela berada dibawa nilai tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur.

Daerah Pantura terlalu bergantung pada sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau perikanan, yang mungkin tidak cukup besar untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia, sehingga tingkat pengangguran dapat meningkat ketika sektor-sektor ini mengalami ketidakstabilan atau tidak berkembang.

Tingkat pengangguran di daerah Pantura dapat meningkat karena urbanisasi yang tinggi dan mobilitas tenaga kerja dari daerah lain ke wilayah Pantura, karena di yakini wilayah pantura merupakan pusat-pusat industri, sehingga adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota menjadikan adanya persaingan yang ketat, sehingga menyulitkan penduduk pendatang baru terutama yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman kerja akibatnya, dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di daerah ini. Peningkatan pengangguran pada tahun 2020-2021 di Pantura juga terlihat sangat tinggi hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi terhambat dan masyarakat kehilangan pekerjaan karena adanya kebijakan PHK.

Investasi dalam sektor pariwisata di pansela dapat menciptakan banyak pekerjaan dan memiliki potensi pariwisata yang besar. Dengan meningkatnya pariwisata, baik lokal maupun internasional, akan ada pekerjaan baru di bidang terkait seperti perhotelan, restoran, dan transportasi.

Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam di Pansela memiliki keunggulan dalam sumber daya alam atau kondisi geografis yang mendukung jenis industri tertentu. Ini dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.



Gambar 24. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Di Wilayah Pantura dan Pansela di Provinsi Jawa Timur
 Sumber : Badan Pusat Statistik 2012-2022

Tingkat pengangguran wilayah pansela memang berada dibawah nilai tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur, namun tingkat pengangguran juga banyak terjadi di Pansela, peningkatan pengangguran terjadi pada tahun 2020-2021, adanya pandemi covid menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi terhambat dan masyarakat kehilangan pekerjaan karena adanya kebijakan PHK, hal ini juga berlaku di beberapa wilayah Jawa Timur dan Indonesia.

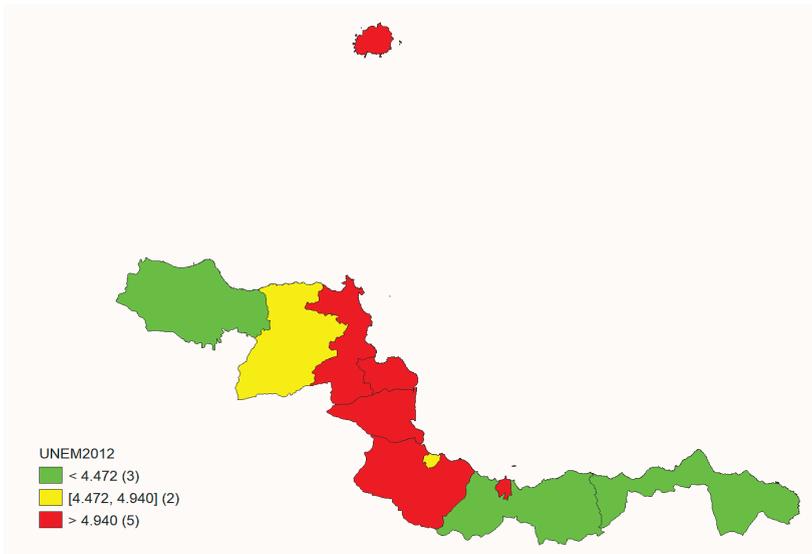
1. Distribusi Spasial Pengangguran di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 25 dan Gambar 26 terlihat bahwa distribusi spasial pengangguran di wilayah pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Tahun 2022. Nilai tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 dengan nilai > 4.94% (*area merah*) tersebar pada 5 wilayah yaitu Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo. Banyak individu bersaing untuk pekerjaan yang terbatas di daerah-daerah perkotaan besar seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Hal ini

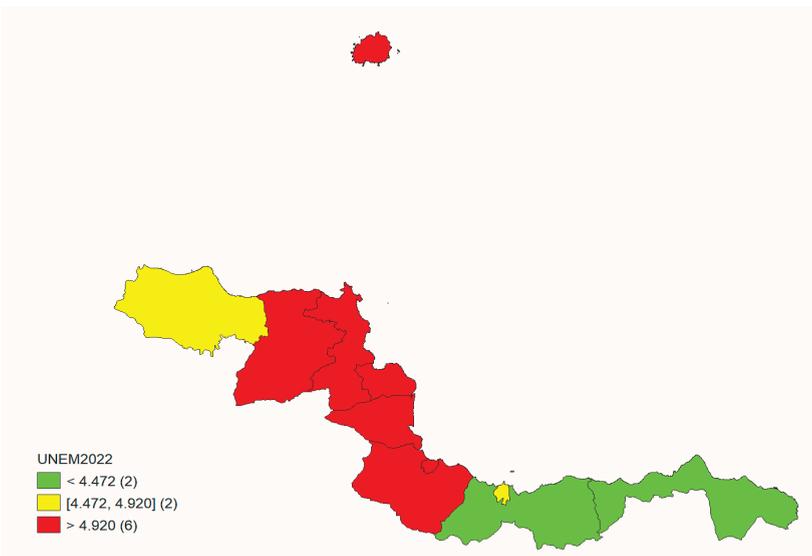
akan menjadi sulit bagi orang untuk mendapatkan pekerjaan karena persaingan yang sangat ketat. Selain itu, adanya efek urbanisasi yang cepat menjadikan masyarakat dari daerah pedesaan yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik ke kota-kota besar. Urbanisasi yang cepat dapat mengakibatkan ketegangan pada infrastruktur dan sumber daya kota, serta meningkatkan tekanan pada pasar tenaga kerja, yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka wilayah pantura tahun 2012 dengan nilai antara 4.47-4.94% (*area kuning*) tersebar di 2 wilayah yaitu Kota Pasuruan dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten dan Kota tersebut dapat mengalami kekurangan lapangan kerja dan tingkat pengangguran yang tinggi jika bergantung pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan atau stagnasi, seperti pertanian atau manufaktur. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bersaing di pasar kerja. Jika penduduk setempat tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka wilayah pantura tahun 2012 dengan nilai < 4.47% (*area hijau*) tersebar di 3 wilayah yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Tuban. Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Tuban memiliki beberapa sektor ekonomi yang kuat dan berkembang, seperti industri manufaktur, dan energi. Industri yang kuat dan beragam ini dapat memberikan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat. Sedangkan Kabupaten Situbondo berkembang di industri pariwisata yang dapat menjadi sumber utama lapangan kerja, hal tersebut terlihat pada potensi pantai yang indah atau objek wisata alam sehingga akan menciptakan peluang kerja di sektor pariwisata dan industri terkait lainnya.



Gambar 25. Distribusi Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
 Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 26. Distribusi Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
 Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Berbeda dengan tingkat pengangguran terbuka wilayah pantura tahun 2022. Distribusi spasial pengangguran dengan nilai $>4.94\%$ (*area merah*) terletak di Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo. Adanya efek urbanisasi yang cepat menjadikan masyarakat dari daerah pedesaan yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik ke kota-kota besar. Urbanisasi yang cepat dapat mengakibatkan ketegangan pada infrastruktur dan sumber daya kota, serta meningkatkan tekanan pada pasar tenaga kerja, yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka wilayah pantura tahun 2022 dengan nilai antara $4.47-4.94\%$ (*area kuning*) tersebar di Kota Probolinggo dan Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban. Wilayah tersebut mengalami kekurangan lapangan kerja dan tingkat pengangguran yang tinggi jika bergantung pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan atau stagnasi, seperti pertanian atau manufaktur. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bersaing di pasar kerja. Jika penduduk setempat tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Sementara tingkat pengangguran terbuka wilayah pantura tahun 2022 dengan nilai $< 4.47\%$ (*area hijau*) tersebar di Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo berkembang di industri pariwisata yang dapat menjadi sumber utama lapangan kerja, hal tersebut terlihat pada potensi pantai yang indah atau objek wisata alam sehingga akan menciptakan peluang kerja di sektor pariwisata dan industri terkait lainnya.

2. Distribusi Spasial Pengangguran di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan distribusi spasial tingkat pengangguran terbuka wilayah pansela tahun 2012 dan tahun 2022 pada Gambar 27 dan Gambar

28 terbagi dalam 3 area, pertama area merah (>4.50%), area kuning (3.00.4.50%) dan area hijau (<3.00%).

Distribusi spasial tingkat pengangguran terbuka wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area merah* (>4.50%) terletak di Kabupaten Lumajang. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Lumajang berpengaruh terhadap permintaan pasar kerja. Kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat mengakibatkan kesulitan bagi penduduk setempat untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Sedangkan distribusi spasial tingkat pengangguran terbuka wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area kuning* (3.00.4.50%) tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung. Karena banyaknya penduduk dan keberagaman industri, Kabupaten dan Kota tersebut sering memiliki tingkat persaingan yang tinggi di pasar tenaga kerja. Hal ini membuat sulit bagi beberapa orang untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan keterampilan mereka.

Sementara distribusi spasial tingkat pengangguran terbuka wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area hijau* (<3.00%) terletak di Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Ketiga kabupaten ini memiliki struktur ekonomi yang beragam dengan sektor-sektor yang stabil dan berkembang seperti pertanian, industri, pariwisata, dan jasa. Diversifikasi ekonomi dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran dengan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor.



Gambar 27. Distribusi Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
 Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 28. Distribusi Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
 Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Berbeda dengan distribusi spasial tingkat pengangguran terbuka wilayah pansela tahun 2022 yang berada di **area merah** (>4.50%) yakni tidak ada wilayah yang tersebar diarea ini. Sementara distribusi spasial tingkat pengangguran terbuka wilayah pansela tahun 2022 yang berada di **area kuning** (3.00.4.50%) tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Beberapa masyarakat sulit

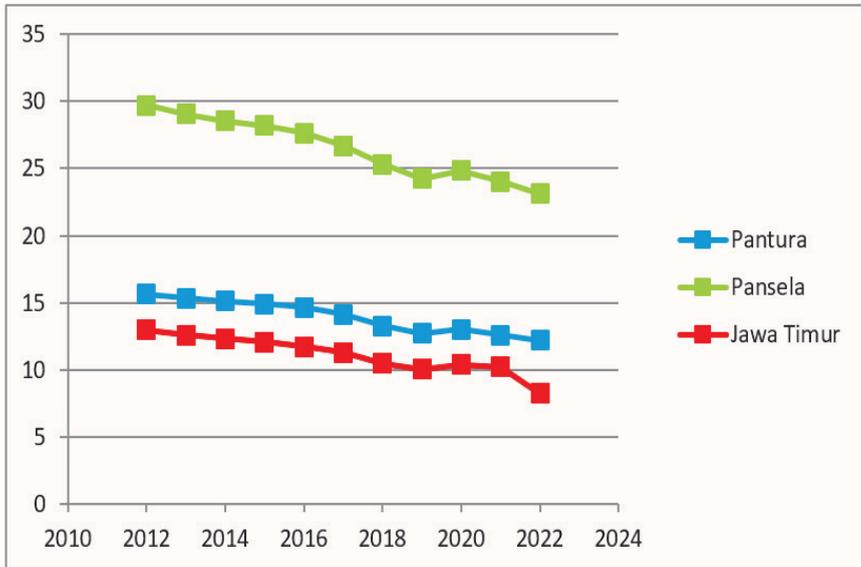
untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan keterampilan mereka, hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk dan keberagaman industri pada masing-masing daerah sehingga memiliki tingkat persaingan yang tinggi di pasar tenaga kerja.

Sedangkan distribusi spasial tingkat pengangguran terbuka wilayah pansela tahun 2022 yang berada di *area hijau* (<3.00%) terletak di Kabupaten Jember dan Kabupaten Pacitan. Adanya sektor ekonomi yang berkembang seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa, Kabupaten Jember dan Kabupaten Pacitan memiliki struktur ekonomi yang beragam. Keanekaragaman ini mengurangi tingkat pengangguran karena memberikan banyak kesempatan kerja bagi penduduk setempat.

F. Sumber Daya Alam dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Grafik 29 terlihat perkembangan rata-rata sumber daya alam yang di ukur menggunakan share pertanian terhadap PDRB dengan nilai sangat timpang antara Wilayah Pantura dan Pansela. Wilayah pansela memiliki sumber daya alam yang berada diatas sumber daya alam pantura dan provinsi jawa timur. Pansela memiliki kondisi geografis dan iklim yang lebih mendukung untuk pertanian, misalnya tanah yang subur, curah hujan yang cukup, dan sinar matahari yang cukup. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman dan produksi pertanian yang lebih tinggi.

Pansela memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang lebih tinggi, termasuk jenis tanaman yang berbeda, tanah yang lebih subur, atau adanya sumber air yang melimpah. Hal ini dapat menciptakan kesempatan untuk diversifikasi produksi pertanian dan meningkatkan produktivitas.



Gambar 29 Rata-Rata Sumber Daya Alam Di Wilayah Pantura dan Pansela di Provinsi Jawa Timur
 Sumber : Badan Pusat Statistik 2012-2022

1. Distribusi Spasial Sumber Daya Alam Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur

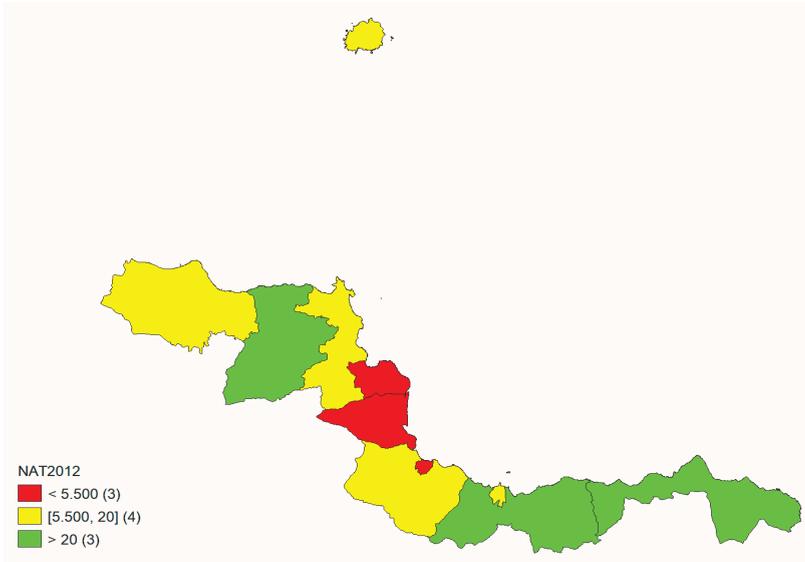
Berdasarkan Gambar 30 dan Gambar 31 terlihat bahwa distribusi spasial sumber daya alam di wilayah pantura dan pansela tahun 2012 tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan 3 area yakni area merah (<5.5%), area kuning (5.5-20%) dan area hijau (>20%).

Distribusi spasial sumber daya alam wilayah pantura tahun 2012 yang berada di *area merah* (<5%) terletak di Kota Pasuruan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo. Adanya transformasi ekonomi telah merubah struktur ekonomi beberapa daerah di Jawa Timur dari sektor pertanian ke sektor lain seperti industri, perdagangan, dan jasa. Perkembangan sektor-sektor ini menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transformasi ekonomi dari pertanian ke sektor-sektor lain. Di samping itu, beberapa daerah tersebut telah

mengalami urbanisasi dan pertumbuhan industri yang pesat. Dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, lahan pertanian telah berubah menjadi area komersial, industri, dan permukiman. Akibatnya, luas lahan yang tersedia untuk pertanian berkurang dan fokus ekonomi pada sektor pertanian berkurang.

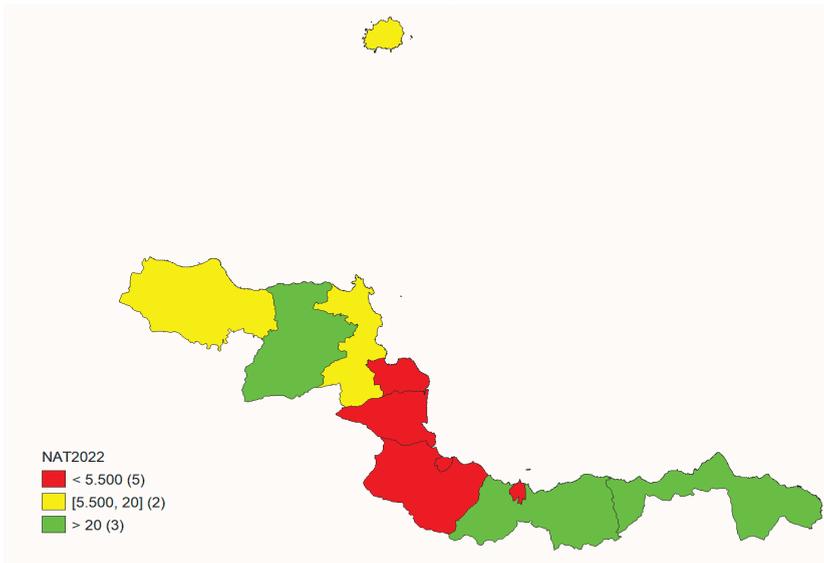
Sedangkan distribusi spasial sumber daya alam wilayah pantura tahun 201 yang berada di *area kuning* (5.5-20%) terletak di Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Tuban. Struktur ekonomi di Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Tuban telah bergeser dari sektor pertanian ke industri, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di sektor non-pertanian telah menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Akibatnya, ketergantungan pada sektor pertanian telah berkurang.

Sedangkan distribusi spasial sumber daya alam wilayah pantura tahun 2012 yang berada di *area hijau* (>20%) terletak di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo. Keempat daerah tersebut memiliki lahan pertanian yang potensial yang luas dan subur. Banyak tanaman pangan dan hortikultura, seperti jagung, padi, tebu, kopi, kakao, dan lainnya, tumbuh di lahan-lahan ini. Selain itu, kondisi geografis dan iklim yang mendukung membuat pertanian lebih produktif.



Gambar 30. Distribusi Spasial Sumber Daya Alam Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 31. Distribusi Spasial Sumber Daya Alam Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Berbeda dengan distribusi spasial Sumber Daya Alam Di Wilayah Pantura Tahun 2022 yang berada di area merah (<5.5%) tersebar di 5 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Kota Surabaya dan Sidoarjo adalah kota metropolitan dan kawasan industri besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Banyak lahan pertanian sekarang digunakan untuk perumahan, industri, dan komersial. Sektor industri, perdagangan, dan jasa menjadi fokus utama pembangunan. Meskipun kedua kota yakni Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo ini lebih kecil dibandingkan Surabaya, banyak lahan pertanian telah berubah fungsi menjadi area perkotaan dan industri.

Sedangkan distribusi spasial sumber daya alam di Wilayah Pantura Tahun 2022 yang berada di area kuning (5.5-20%) tersebar di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban. Perekonomian di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik lebih variatif. Selain pertanian, industri dan jasa juga berkembang di kedua kabupaten ini, tetapi tidak sebesar atau seintensif di kota-kota seperti Surabaya dan Sidoarjo. Diversifikasi ini menjaga kontribusi pertanian tetap signifikan, meskipun tidak dominan.

Distribusi spasial sumber daya alam di Wilayah Pantura Tahun 2022 yang berada di area hijau (>20%) tersebar di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Ketiga kabupaten ini memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, yang memungkinkan produksi pertanian yang signifikan. Berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura juga didukung oleh kondisi tanah dan iklim yang cocok. Produktivitas pertanian yang tinggi, akses yang baik ke sumber air untuk irigasi, seperti sungai, waduk, atau sistem irigasi yang dikembangkan, sangat penting dalam mendukung sumber daya alam seperti sektor pertanian di kedua wilayah tersebut.

2. Distribusi Spasial Sumber Daya Alam Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur

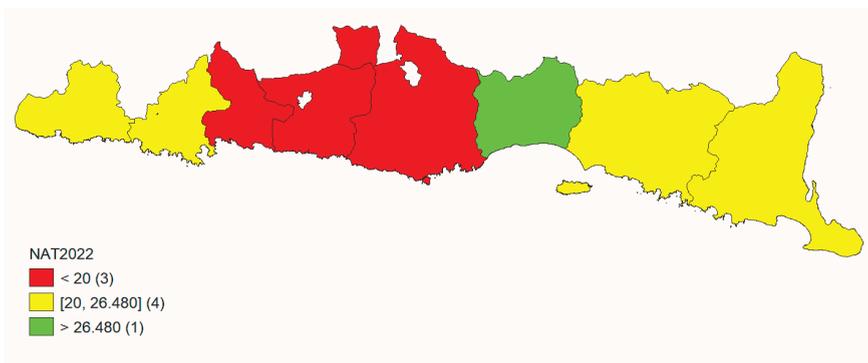
Berbeda dengan distribusi spasial sumber daya alam di wilayah pansela tahun 2012 tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan 3 area yakni area merah (<20%), area kuning (20-26.480%) dan area hijau (>26.480%). Distribusi spasial sumber daya alam wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area merah* (<20%) tersebar di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Malang mengalami urbanisasi yang signifikan dan pertumbuhan sektor non-pertanian seperti industri, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan kota dan industri ini cenderung menarik tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain yang menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan dan lebih banyak potensi ekonomi.

Berdasarkan distribusi spasial sumber daya alam wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area kuning* (20-26.480%) tersebar di Kabupaten Tulungagung. Meskipun luas lahan pertanian di Kabupaten Tulungagung terbatas, terutama karena sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, namun sebagian besar lahan tersebut digunakan untuk pertanian.

Sementara distribusi spasial sumber daya alam wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area hijau* (>26.480%) tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Daerah-daerah ini memiliki potensi pertanian yang luas dan subur. Tanah yang subur mendukung pertumbuhan berbagai tanaman pangan dan hortikultura, seperti cengkeh, kopi, kedelai, jagung, padi, dan lainnya. Disamping itu, berbagai jenis pertanian dapat dilakukan karena variasi lingkungan dari dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan. Misalnya, di Kabupaten Lumajang, yang terletak di lereng Gunung Semeru, iklim ini menguntungkan pertanian kopi, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya.



Gambar 32. Distribusi Spasial Sumber Daya Alam Di Wilayah Pansela
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 33. Distribusi Spasial Sumber Daya Alam Di Wilayah Pansela
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan 2022
Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Berdasarkan distribusi spasial sumber daya alam wilayah pansela tahun 2022, wilayah yang berada di *area merah* (<20%) terletak di Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung. Beberapa wilayah tersebut mengalami pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke sektor lain. Ini terjadi karena pertumbuhan industri dan jasa cenderung mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara distribusi spasial sumber daya alam wilayah pansela tahun 2022, wilayah yang berada di *area kuning* (20-26.480%) tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Daerah-daerah ini memiliki potensi pertanian yang luas dan subur. Tanah yang subur mendukung pertumbuhan berbagai tanaman pangan dan hortikultura, seperti cengkeh, kopi, kedelai, jagung, padi, dan lainnya.

Sementara distribusi spasial sumber daya alam wilayah pansela tahun 2022, wilayah yang berada di *area hijau* (>26.480%) tersebar di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang terletak di lereng Gunung Semeru, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, Kabupaten Lumajang juga memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan. Tanah yang beragam dan subur cocok untuk pertanian berbagai jenis tanaman, seperti cengkeh, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya. Sehingga sumber daya alam dalam hal ini share sektor pertanian cukup tinggi di Kabupaten Lumajang.

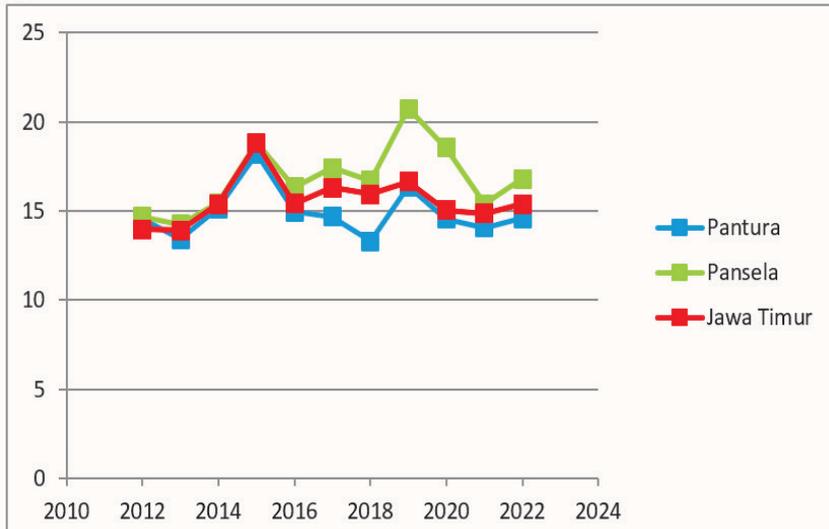
G. Kesehatan dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur

Perkembangan rata-rata kesehatan di wilayah Pantura dan Pansela Jawatimur tahun 2012-2022 terpotret pada Gambar 4.2.11, berdasarkan Gambar 34 wilayah pansela memiliki angka kesakitan diatas wilayah pantura dan Provinsi Jawa Timur. Pansela memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau karena jarak yang jauh dari pusat kesehatan, kekurangan infrastruktur kesehatan, atau kekurangan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan tingkat kesakitan.

Akses penduduk Pansela terhadap nutrisi kurang memadai, perawatan medis kurang layak, dan lingkungan tidak sehat secara keseluruhan menjadikan angka kesakitan semakin tinggi. Kurangnya sumber daya

ekonomi juga dapat membatasi kemampuan mereka untuk menangani penyakit dan cedera.

Gambar 4.2.11 dibawah juga terlihat terjadi peningkatan angka kesakitan pada tahun 2020-2021 baik diwilayah pantura maupun di wilayah pansela , hal ini disebabkan karena adanya pandemic covid 19, terjadi lonjakan masyarakat yang terinfeksi virus covid 19 sehingga menyebabkan morbidity rate semakin tinggi.

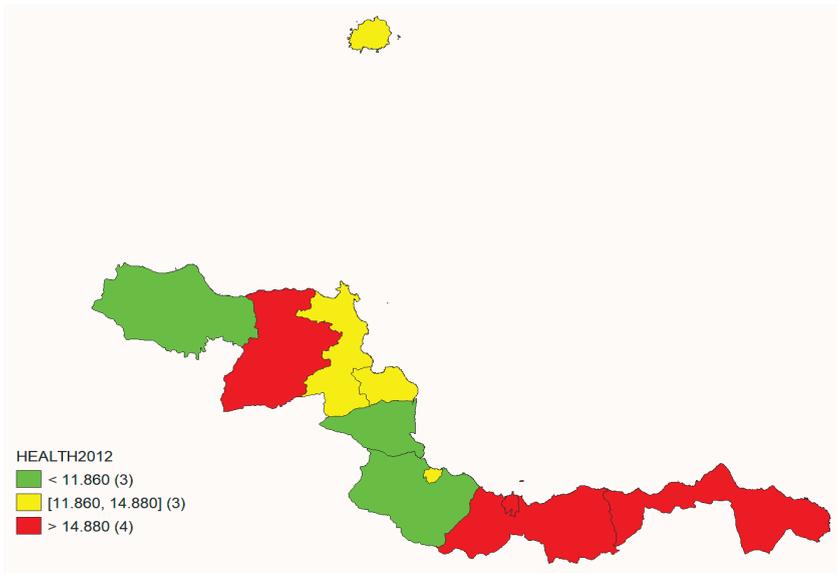


Gambar 34. Rata-Rata Kesehatan Di Wilayah Pantura dan Pansela di Provinsi Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012-2022

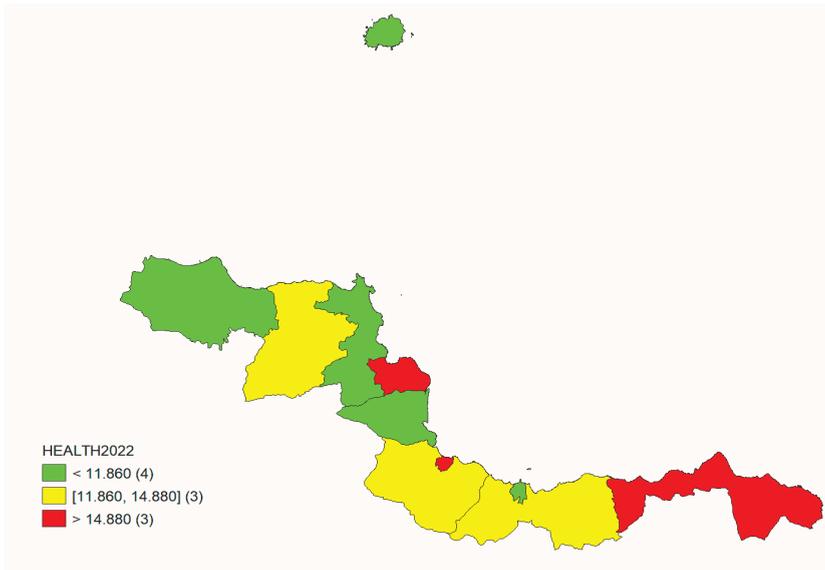
1. Distribusi Spasial Kesehatan Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 35 dan Gambar 36 terlihat bahwa distribusi spasial kesehatan di wilayah pantura dan pansela tahun 2012 dan tahun 2022 tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan 3 area yakni area merah (>14,88%), area kuning (11,86-14,88%) dan area hijau (<11,86%).



Gambar 35. Distribusi Spasial Kesehatan Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 36. Distribusi Spasial Kesehatan Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Distribusi spasial kesehatan wilayah pantura tahun 2012 yang berada di **area merah** (>14,88%) terletak di Kota Probolinggo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo. Beberapa daerah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi cenderung memiliki angka morbiditas yang tinggi karena kemiskinan dapat menyebabkan kurangnya akses terhadap makanan bergizi, perawatan kesehatan yang layak, dan lingkungan yang sehat, serta ketidaksetaraan sosial.

Sementara distribusi spasial kesehatan wilayah pantura tahun 2012 yang berada di **area kuning** (11,86-14,88%) terletak di Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. Dibandingkan dengan daerah pedesaan, kota-kota seperti Surabaya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan medis secara baik.

Berbeda dengan distribusi spasial kesehatan wilayah pantura tahun 2012 yang berada di **area hijau** (<11,86%) terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Tuban. Stabilitas ekonomi dan tingkat kemiskinan yang rendah di beberapa daerah tersebut memungkinkan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan.

Sedangkan berdasarkan Gambar 35 dan Gambar 36 terlihat bahwa distribusi spasial kesehatan di wilayah pantura tahun 2022 yang berada di **area merah** (>14,88%) terletak di Kota Pasuruan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Situbondo. Kota-kota besar seperti Kota Surabaya dan Kota Pasuruan cenderung memiliki populasi penduduk yang padat dan tinggi karena adanya efek urbanisasi penduduk, yang dapat meningkatkan risiko kemiskinan dikota, adanya kemiskinan dapat menyebabkan seseorang kurang dapat mengakses terhadap pelayanan medis.

Distribusi spasial kesehatan di wilayah pantura tahun 2022 yang berada di **area kuning** (11,86-14,88%) terletak di Kabupaten Lamongan, Kabupaten pasuruan dan Kabupaten probolinggo. Beberapa daerah tersebut tergolong daerah yang cukup berkembang namun

kabupaten-kabupaten tersebut masih memiliki keterbatasan dalam akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya fasilitas medis dan tenaga medis yang memadai dapat menghalangi orang untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara distribusi spasial kesehatan di wilayah pantura tahun 2022 yang berada di **area hijau** (<11,86%) terletak di Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Sidoarjo dan Tuban. Kabupaten dan kota-kota tersebut memiliki infrastruktur kesehatan yang baik, yang mencakup rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu dapat ditingkatkan dengan akses yang baik terhadap layanan kesehatan.

2. Distribusi Spasial Kesehatan Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur

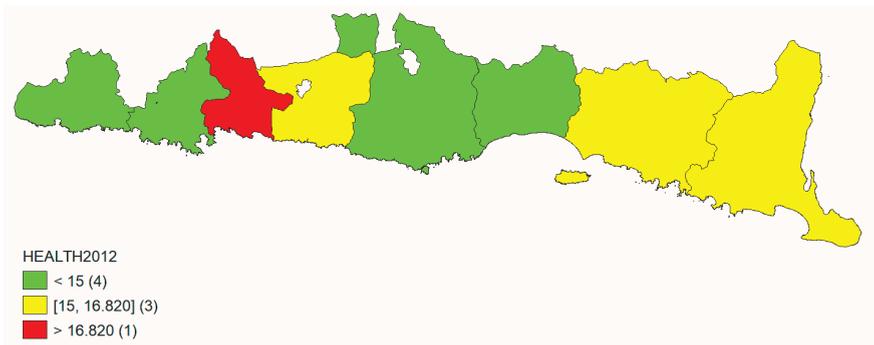
Berdasarkan Gambar 37 dan Gambar 38 distribusi spasial kesehatan di wilayah pansela tahun 2012 dan tahun 2022 terbagi ke beberapa area. Area merah yakni dengan angka morbiditas >16,82%, area kuning dengan angka morbiditas 15-16,82% dan area hijau dengan angka morbiditas <15%.

Distribusi spasial kesehatan di wilayah pansela tahun 2012 yang berada di **area merah** (>16,82%) tersebar di Kabupaten Tulungagung. Salah satu faktor yang menyebabkan kesehatan rendah adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau dokter. Ini terutama berlaku di daerah pedesaan atau daerah terpencil, di mana jarak yang jauh dan infrastruktur yang tidak memadai dapat membuat masyarakat sulit mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan.

Sedangkan distribusi spasial kesehatan di wilayah pansela tahun 2012 yang berada di **area kuning** (15-16,82%) tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jember. Akses masyarakat terhadap pangan bergizi, air bersih, sanitasi yang layak, dan perawatan kesehatan dapat dibatasi oleh tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan

ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan risiko malnutrisi dan penyakit menular dan tidak menular.

Sementara distribusi spasial kesehatan di wilayah pangsela tahun 2012 yang berada di *area hijau* (<15%) tersebar di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dapat ditingkatkan dengan adanya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, dan dokter serta aksesibilitas yang baik.



Gambar 37. Distribusi Spasial Kesehatan Di Wilayah Pangsela Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 38. Distribusi Spasial Kesehatan Di Wilayah Pangsela Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Berbeda dengan distribusi spasial kesehatan di wilayah pansela tahun 2022 yang berada di **area merah** (>16.82%) tersebar di Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang tinggi terjadi di Kabupaten Blitar, Pacitan, dan Trenggalek. Tingkat kemiskinan ini dapat membatasi akses masyarakat terhadap makanan bergizi, air bersih, sanitasi yang layak, dan layanan kesehatan.

Sementara distribusi spasial kesehatan di wilayah pansela tahun 2022 yang berada di **area kuning** (15-16,82%) tersebar di Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang. Meskipun fasilitas kesehatan tersedia di beberapa daerah tersebut, namun kualitas layanan, peralatan medis, dan jumlah tenaga medis yang cukup dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Disamping itu, tingkat pendidikan yang tinggi serta kesadaran akan pentingnya praktik kesehatan yang baik dan gaya hidup sehat dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat di kedua kabupaten tersebut.

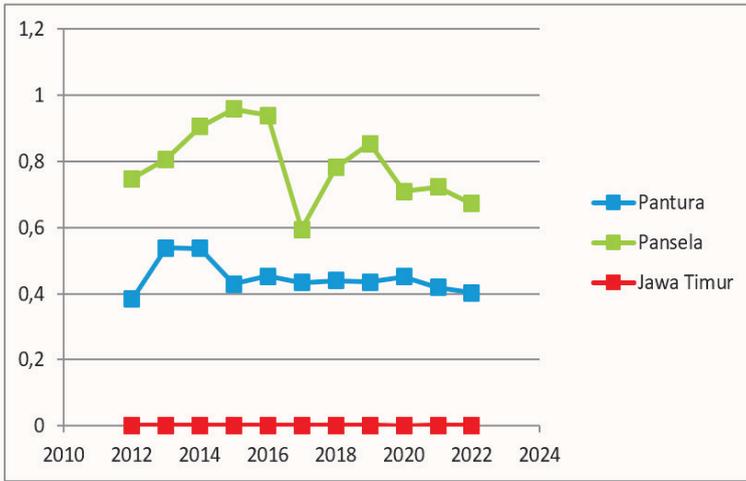
Distribusi spasial kesehatan di wilayah pansela tahun 2022 yang berada di **area hijau** (<15%) tersebar di Kabupaten banyuwangi, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Tulungagung. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dapat ditingkatkan dengan adanya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, dan dokter, serta aksesibilitas yang baik. Disamping itu, fasilitas kesehatan yang lengkap dengan peralatan medis yang memadai dan tenaga medis yang cukup dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat diagnosis dan pengobatan penyakit, serta mengurangi risiko komplikasi.

H. Aksesibilitas Wilayah dan Distribusi Spasialnya di Wilayah Pantura dan Pansela Provinsi Jawa Timur

Perkembangan rata-rata aksesibilitas wilayah di wilayah Pantura dan Pansela tergambar pada Gambar 39 nilai aksesibilitas wilayah di wilayah pantura dan pansela berada di atas rata-rata nilai aksesibilitas Jawa Timur . Wilayah Pantura dan Pansela memiliki infrastruktur

transportasi yang lebih baik, seperti jalan raya utama, rel kereta api, dan jalur laut yang memadai. Infrastruktur ini meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan mobilitas penduduk. Pantura dan Pansela terhubung dengan pusat ekonomi dan komersial Jawa Timur, seperti kota-kota besar dan pelabuhan utama. Koneksi ini dapat membuat mereka lebih terhubung ke pasar kerja, bisnis, dan layanan lainnya. Selain itu, Pemerintah daerah telah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura dan Pansela.

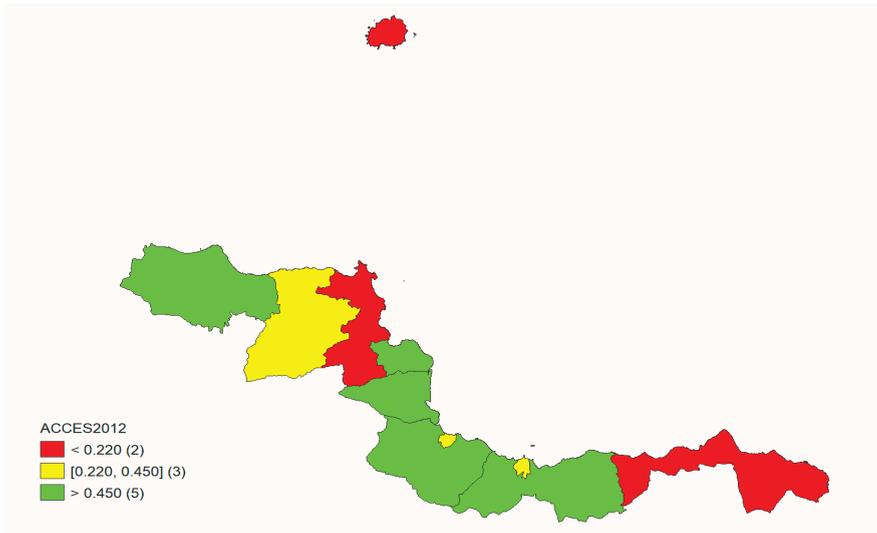
Pada tahun 2017 aksesibilitas di wilayah pansela mengalami penurunan aksesibilitas yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pembangunan infrastruktur secara umum dibandingkan dengan wilayah lain seperti wilayah pantura yang dianggap lebih strategis secara ekonomi atau politik, wilayah pansela mendapat perhatian yang lebih sedikit untuk pembangunan infrastruktur. Adanya risiko bencana alam di wilayah pansela seperti banjir, tanah longsor, atau erosi pantai. Jalan yang buruk atau rusak juga dapat menjadi faktor risiko tambahan selama bencana alam, yang dapat menyebabkan komunitas lokal menjadi lebih terisolasi dan rentan.



Gambar 39 Rata-Rata Aksesibilitas Wilayah Di Wilayah Pantura dan Pansela di Provinsi Jawa Timur

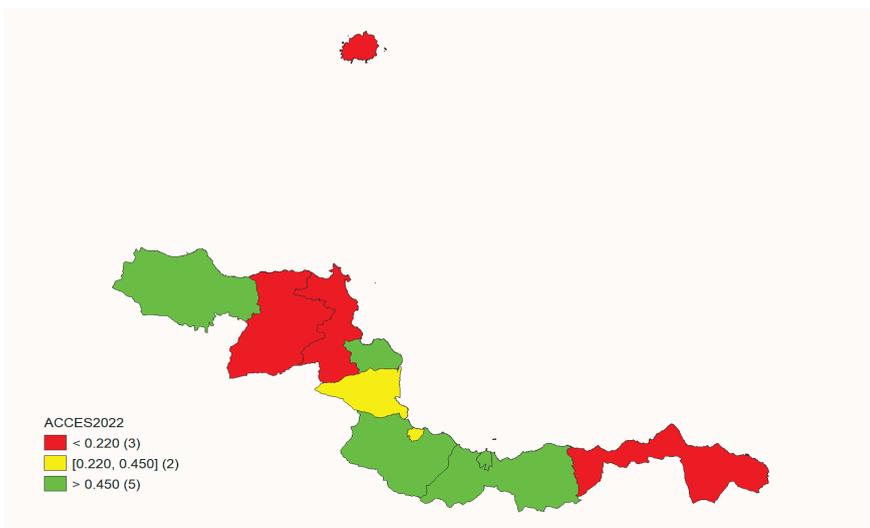
Sumber : Badan Pusat Statistik 2012-2022

1. Distribusi Spasial Aksesibilitas Wilayah Di Wilayah Pantura



Gambar 40. Distribusi Spasial Aksesibilitas Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 41. Distribusi Spasial Aksesibilitas Di Wilayah Pantura Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pantura tahun 2012 yang berada di *area merah* ($<0,22\%$) tersebar di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Situbondo. Nilai aksesibilitas $< 0,22\%$ menunjukkan adanya permasalahan aksesibilitas di wilayah tersebut. Kabupaten Gresik dan Situbondo terletak di pesisir utara Pulau Jawa, yang merupakan area penting untuk konektivitas transportasi karena merupakan bagian dari jaringan transportasi utama Indonesia. Jika area dengan tingkat aksesibilitas yang rendah menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, atau jalur transportasi lainnya kurang berkembang atau tidak memadai. Tingkat aksesibilitas ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kebijakan pembangunan, kondisi geografis, atau kurangnya investasi dalam infrastruktur transportasi.

Sementara Distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pantura tahun 2012 yang berada di *area kuning* (0,22-0,45 %) tersebar di Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lamongan. Area kuning (0,22–0,45%) yang terletak di Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan menunjukkan tingkat aksesibilitas yang sedang

pada tahun 2012. Meskipun infrastruktur transportasi di daerah ini mungkin lebih baik dibandingkan dengan daerah merah, masih ada ruang untuk peningkatan. Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan merupakan wilayah pantura yang penting untuk menjadikan prioritas karena berada di jalur utama antara kota-kota besar di Jawa Timur dan memiliki akses ke pelabuhan laut yang penting, wilayah ini sangat penting untuk konektivitas transportasi. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di wilayah ini dapat dicapai melalui perbaikan jalan, sistem transportasi publik yang dibangun, dan sarana transportasi yang memadai.

Sedangkan distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pantura tahun 2012 yang berada di *area hijau* (>0,45%) tersebar di Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Tuban. Beberapa Kota dan Kabupaten tersebut memiliki aksesibilitas tinggi, wilayah ini memiliki infrastruktur transportasi yang baik dan terhubung dengan jaringan transportasi utama. Kota Surabaya adalah kota terbesar di Jawa Timur dan pusat perdagangan dan ekonomi penting. Selain itu, Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, dan Tuban memiliki peran yang signifikan dalam hal transportasi dan ekonomi di wilayah pantura Jawa Timur. Aksesibilitas yang tinggi di daerah ini dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan mobilitas penduduk, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, orang dan perusahaan dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan dan kesempatan yang tersedia di daerah tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pantura tahun 2022, aksesibilitas yang berada di *area merah* (<0,22%) tersebar di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Situbondo. Kabupaten Gresik dan Lamongan terletak di pesisir utara Pulau Jawa, sedangkan Kabupaten Situbondo terletak di sebelah timur. Banyak faktor yang dapat menyebabkan aksesibilitas yang buruk di wilayah-wilayah ini, seperti infrastruktur transportasi yang buruk, kurangnya investasi untuk membangun jalan dan jembatan, dan kondisi

geografis yang mungkin sulit diakses. Aksesibilitas yang rendah dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kurangnya akses ke transportasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Sementara distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pantura tahun 2022 yang berada di *area kuning* (0,22-0,45 %) tersebar di Kota Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo. Kota Pasuruan terletak di Jawa Timur, dan merupakan salah satu kota penting di wilayah pantura. Kabupaten Sidoarjo juga terletak di Jawa Timur, dan keduanya memainkan peran penting dalam menghubungkan dan mempermudah akses ke wilayah pantura. Tingkat aksesibilitas di kedua area ini termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada infrastruktur transportasi di daerah tersebut, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal mobilitas penduduk dan distribusi barang.

Sedangkan distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pantura tahun 2022 yang berada di *area hijau* (>0,45%) tersebar di Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Tuban. Tingkat aksesibilitas yang tinggi di daerah ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di daerah tersebut baik dan terhubung dengan jaringan transportasi utama. Kota-kota di Jawa Timur, seperti Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Tuban, memiliki peran strategis dalam hal transportasi dan ekonomi. Sebagai kota terbesar di Jawa Timur, Surabaya adalah pusat ekonomi, perdagangan, dan transportasi penting. Aksesibilitas yang tinggi di daerah ini dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan mobilitas penduduk, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, orang dan perusahaan dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan dan kesempatan yang tersedia di daerah ini.

2. Distribusi Spasial Aksesibilitas Wilayah di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur

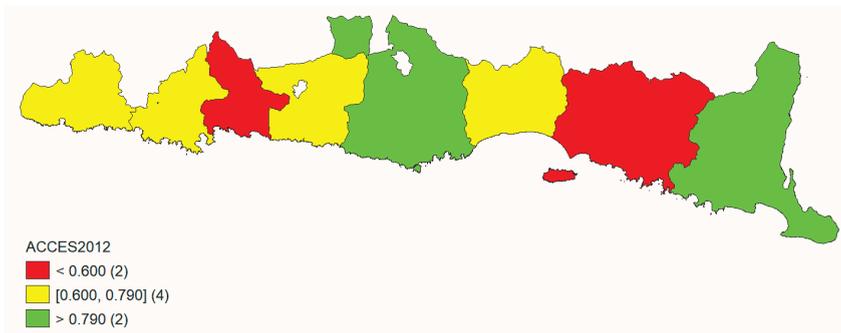
Berdasarkan Gambar 42 dan Gambar 43, distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pansela tahun 2012 dan tahun 2022 terbagi ke beberapa area. Area merah yakni dengan aksesibilitas $<0,60\%$, area kuning dengan aksesibilitas $0,60-0,79\%$ dan area hijau dengan aksesibilitas $>0,79\%$.

Distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area merah* ($<0,60\%$) tersebar di Kabupaten Jember dan Kabupaten Tulungagung. Beberapa bagian pantai selatan Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Tulungagung menunjukkan aksesibilitas yang rendah, hal ini dapat memengaruhi mobilitas penduduk serta distribusi barang dan layanan. Aksesibilitas yang rendah ($<0,60\%$) dapat disebabkan oleh banyak hal seperti infrastruktur transportasi yang kurang baik, kurangnya investasi dalam pembangunan jalan dan jembatan, dan kondisi geografis yang menghambat akses ke berbagai layanan pendidikan dan kesehatan.

Sementara distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area kuning* ($0,60-0,79\%$) tersebar di Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Tingkat aksesibilitas termasuk kategori sedang dengan nilai antara $0,60\%$ dan $0,79\%$, hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di wilayah tersebut telah berkembang secara signifikan pada tahun 2012, yang memungkinkan mobilitas penduduk serta distribusi barang dan layanan dengan cukup baik. Kabupaten Blitar, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek berada di pantai selatan Jawa Timur. Karena pantai-pantai indahya, tempat-tempat ini memiliki banyak potensi pariwisata, dan meningkatkan kemampuan orang untuk mengaksesnya dapat menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi lokal.

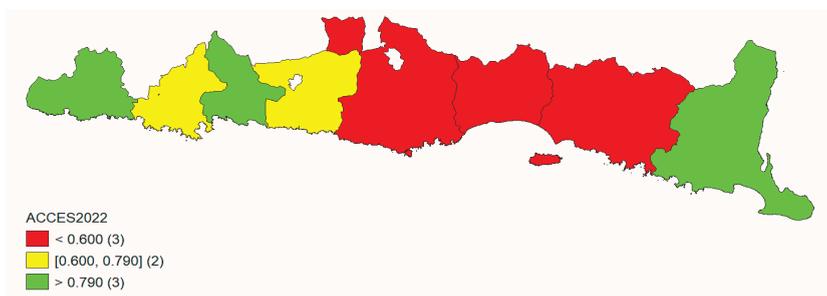
Sedangkan distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pansela tahun 2012 yang berada di *area hijau* ($>0,79\%$) tersebar di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang terletak di

daratan Jawa Timur, tetapi berbatasan langsung dengan pantai selatan. Sementara itu, Banyuwangi berada di ujung timur Jawa dan berbatasan langsung dengan Selat Bali. Pada tahun 2012, kedua wilayah ini memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, dengan nilai aksesibilitas di atas 0,79%. Tingkat aksesibilitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah tersebut sudah cukup baik pada tahun ini, memungkinkan mobilitas penduduk serta pengiriman barang dan layanan dengan lancar. Disamping itu, Kabupaten Malang terkenal dengan wisata alamnya yang menakjubkan seperti Gunung Bromo dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pariwisata yang besar dengan pantai-pantai indah dan sebagai gateway ke Pulau Bali.



Gambar 42. Distribusi Spasial Aksesibilitas Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda



Gambar 43. Distribusi Spasial Aksesibilitas Di Wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Sumber : BPS diolah dengan Software Geoda

Berbeda dengan Distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pansela tahun 2022 yang berada di *area merah* (<0,60%) tersebar di Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Aksesibilitas di wilayah-wilayah ini sangat rendah, dengan nilai aksesibilitas di bawah 0,60%. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah ini memiliki keterbatasan aksesibilitas yang mempengaruhi mobilitas penduduk dan distribusi barang dan jasa. Wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dengan pantai-pantai yang indah dan atraksi alam lainnya, tingkat aksesibilitas yang rendah dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi secara keseluruhan.

Sedangkan distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pansela tahun 2022 yang berada di *area kuning* (0,60-0,79%) tersebar di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Wilayah tersebut merupakan bagian dari pantai selatan Jawa Timur. Tingkat aksesibilitas di wilayah-wilayah ini termasuk kategori sedang, dengan nilai aksesibilitas antara 0,60 dan 0,79%, hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah ini telah cukup berkembang pada tahun 2022, yang memungkinkan penduduk untuk bergerak dan mengirimkan barang dan jasa dengan mudah. Kabupaten Trenggalek memiliki wisata alam yang menarik seperti Pantai Pelang dan Air Terjun Parang Gombang, sementara Kabupaten Blitar terkenal dengan potensi wisata alam seperti Air Terjun Coban Rondo dan pantai-pantai indah di pantai selatannya.

Sementara distribusi spasial aksesibilitas di wilayah pansela tahun 2022 yang berada di *area hijau* (>0,79 %) tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Tulungagung. Aksesibilitas di wilayah-wilayah ini sangat tinggi, dengan nilai aksesibilitas melebihi 0,79%. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah ini sangat baik pada tahun 2022. Aksesibilitas yang tinggi mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi lokal di daerah tersebut. Hal ini karena pengusaha dan wisatawan dapat dengan mudah mengakses berbagai bisnis di bidang pariwisata dan bidang lainnya. Oleh

karena itu, penting untuk terus mempertahankan dan mengembangkan infrastruktur transportasi di daerah-daerah ini untuk memastikan aksesibilitas yang berkelanjutan.



BAB 5

ASPEK SPASIAL DAN NON SPASIAL KEMISKINAN DI WILAYAH PANTAI UTARA DAN SELATAN

A. Pengaruh Aspek Spasial Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi model membuktikan bahwa terdapat interaksi spasial antar wilayah di wilayah pantura dan pansela melalui interaksi endogen dan eksogen antar variabel kemiskinan yang dapat diartikan bahwa meningkatnya kemiskinan wilayah akan mempengaruhi meningkatnya kemiskinan di wilayah yang berdekatan (tetangga). Hal tersebut dapat diartikan bahwa jika suatu kemiskinan suatu wilayah tinggi akan menyebabkan kemiskinan pada daerah lain yang berdekatan, dan sebaliknya jika suatu wilayah tingkat kemiskinannya rendah maka akan diikuti oleh daerah lain yang berdekatan dengan tingkat kemiskinan yang juga rendah.

Adapun untuk mengetahui informasi jarak dari kedekatan ketetanggaan (*neighborhood*) menggunakan Matriks pembobot spasial (W), metode yang digunakan yaitu menggunakan *Queen Contiguity* ialah persentuhan sisi maupun titik sudut wilayah satu dengan wilayah yang lain yaitu gabungan *rook contiguity* dan *bishop contiguity*, sehingga terpotret kedekatan ketetanggaan (*neighborhood*) untuk observasi di wilayah pengamatan. Wilayah Pantura untuk observasi Kabupaten Tuban memiliki satu tetangga yaitu Kabupaten Lamongan. Kabupaten

Lamongan memiliki dua tetangga yaitu Kabupaten Gresik dan Tuban. Sedangkan Kabupaten Gresik memiliki tiga tetangga yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sidoarjo. Kota Surabaya mempunyai dua tetangga yaitu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki tiga tetangga yaitu Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan memiliki tiga tetangga yaitu Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Probolinggo memiliki tiga tetangga yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo hanya memiliki satu tetangga yaitu Kabupaten Probolinggo. Jadi dapat disimpulkan wilayah pantura memiliki pola mengelompok (*Cluster*).

Secara geografis, daerah pantura bercirikan gelombang yang kuat tidak terlalu tinggi dengan arus yang cukup kuat (pengaruh musim). Ini karena pantai utara Jawa Timur merupakan badan air semi tertutup, dimana terdapat perairan kabupaten Tuban, Gresik yang merupakan perairan Laut Jawa yang berhubungan langsung dengan pantai Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin). Sedangkan laut teritorial Kota Surabaya sampai Kabupaten Situbondo perairannya masih terpengaruh oleh pergerakan arus laut di Pulau Madura (Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Vol 1 Utara Jawa Timur, 2016) sehingga kabupaten-kabupaten di daerah ini memiliki kesamaan dalam hal kondisi geografis, seperti jenis tanah, iklim, dan topografi, yang dapat memengaruhi pola pengelompokan. Secara struktur ekonomi Kabupaten-kabupaten di wilayah pantura saling terkait dalam rantai pasokan atau jaringan perdagangan, sehingga kabupaten-kabupaten yang memiliki masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan cenderung memiliki cluster yang sama.

Wilayah pansela untuk observasi Kabupaten Pacitan memiliki satu tetangga yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Trenggalek memiliki dua tetangga yaitu Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung memiliki dua tetangga yaitu Kabupaten

Trenggalek dan Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki dua tetangga yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Malang memiliki dua tetangga yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang memiliki dua tetangga yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki dua tetangga yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi. Serta Kabupaten Banyuwangi memiliki satu tetangga yaitu Kabupaten Jember. Jadi dapat disimpulkan wilayah pansela memiliki pola mengelompok (*Cluster*).

Wilayah Pansela berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, di mana karakter oseanografi cenderung keras, gelombang dan arus tinggi mencacah, hal tersebut mengakibatkan kelangsungan hidup ekosistem pesisir seperti terumbu karang, lamun, dan bakau cenderung tidak berkembang. Beberapa potensi yang bisa dikembangkan di daerah ini adalah industri perikanan dan pariwisata (Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Vol 2 Selatan Jawa Timur, 2016). Kabupaten-kabupaten di daerah ini memiliki kesamaan dalam hal kondisi geografis, seperti jenis tanah, iklim, dan topografi yang dapat memengaruhi pola pengelompokan. Selain itu, pansela terkenal dengan keindahan alamnya, seperti pantai, gunung, dan hutan tropis. Kabupaten-kabupaten di daerah ini dikelompokkan berdasarkan potensi wisata yang serupa, seperti keragaman tempat wisata alam, budaya, atau sejarah (Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Vol 2 Selatan Jawa Timur, 2016). Beberapa sektor di pansela memiliki hubungan ekonomi yang kuat, seperti pertanian, perikanan, atau industri pengolahan hasil pertanian. Kabupaten-kabupaten di daerah ini memiliki pola pengelompokan ekonomi yang serupa karena saling terkait dalam rantai pasokan atau jaringan perdagangan sehingga kabupaten-kabupaten yang memiliki masalah kemiskinan cenderung membentuk *cluster* yang sama.

Hal ini serupa dengan hukum geografi Tobler (1970) yang menyatakan semua hal dialam semesta ini saling terkait, tetapi segala hal lebih dekat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada yang jauh, dalam konteks analisis spasial segala sesuatu adalah terkait

dengan yang lain, tetapi segala sesuatu lebih terkait dengan yang dekat daripada yang jauh.

Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Alfred Marshall (1920) tentang *Agglomeration Economies* yakni menjelaskan seberapa kedekatan atau konsentrasi perusahaan serupa menarik layanan dan pasar yang mendukung, yang selanjutnya menarik lebih banyak perusahaan. Sebaliknya, di mana ada kemiskinan dan kondisi kemiskinan justru menghasilkan lebih banyak kemiskinan di daerah sekitarnya atau yang berdekatan. Myrdal juga menyebutkan dalam teori *spread effect* tentang pembangunan wilayah. Menurut teori ini, adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat merembes dan menyebar di daerah-daerah sekitarnya, adanya peningkatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah akan menghasilkan peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya akan menarik wisatawan ke wilayah sekitarnya. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan kesempatan kerja, kenaikan investasi yang masuk, kenaikan upah buruh, dan penduduk yang dapat promosi produksinya. Hal ini akan mendorong orang-orang di daerah sekitar untuk pindah dan bekerja di daerah tersebut agar dapat memperoleh penghasilan yang layak. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki kesempatan untuk membuka bisnis baru atau membangun industri di lingkungan sekitar, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan pendapatan dan mengurangi kemiskinan di wilayah sekitar.

Hasil penelitian sesuai dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Akinyemi & Bigirimana (2012) yang mengukur kemiskinan spasial dari empat indikator kemiskinan yaitu pengeluaran, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan, dalam temuannya menunjukkan terdapat pola kemiskinan dan terdapat pengelompokan kemiskinan antara kota dan desa secara spasial. Higgins, Bird, & Harris (2010) juga menyatakan terdapat pengelompokan kemiskinan antara wilayah dengan wilayah yang berdekatan sehingga perlu menjadi wacana bagi pembuat kebijakan, dalam hal meninjau bagaimana dimensi spasial dari fitur kemiskinan dan

sebagai serangkaian wacana kebijakan pembangunan untuk mengatasi perangkat kemiskinan.

Di samping itu, di sebagian besar negara, kemiskinan secara geografis terkonsentrasi di beberapa wilayah, faktor-faktor geografis yang berbeda dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di desa dapat membantu menjelaskan pola spasial berkelompok (M. Liu et al., 2021) (Gamboa, Barona, & Estrella, 2021). Hal yang sama juga diungkapkan oleh (Ge et al., 2021), (X. Chen et al., 2015), (Zhou & Xiong, 2018), (Gao et al., 2020) (M. Liu et al., 2022), (Amaliah & Ulimaz, 2021), (Minot et al., 2006), (Birungi et al., 2005) (Mosley & Miller, 2004), (Malerba, 2020) bahwa terdapat pengelompokan spasial dari kejadian kemiskinan di wilayah studi. (Cahyadi et al., 2020) juga menyebutkan akses fasilitas (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) secara signifikan berkorelasi dengan pengelompokan kemiskinan dan terkonsentrasi secara spasial.

Sebaliknya, peningkatan tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan di wilayah yang berdekatan dengannya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat kemiskinan di suatu wilayah meningkat, ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di daerah tersebut terhambat dan tidak berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya interaksi antar wilayah dengan wilayah sekitar, penurunan mobilitas dagang dan tenaga kerja, semakin sulit bagi masyarakat untuk mengakses pasar dan mencari pekerjaan di wilayah sekitar, dan semakin banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan di luar wilayah tersebut (Rustiadi, 2018). Hal Ini juga akan menghambat interaksi antar wilayah. Pada akhirnya, kemiskinan suatu wilayah menyebar ke wilayah sekitarnya.

Pola pengelompokan sesuai dengan hasil indeks moran nilai I valuennya lebih besar di wilayah pansela di bandingkan pantura, maka pola ketetanggaannya lebih cepat di area pansela. artinya pengaruh meningkatnya kemiskinan ke daerah tetangga lebih cepat di daerah pansela di bandingkan pantura. Hal ini disebabkan karena kondisi topografi yang sulit dan jarak ke pusat-pusat ekonomi sehingga membatasi

wilayah pansela untuk keluar dari kondisi kemiskinan, selain itu kondisi infrastruktur yang kurang memadai sehingga wilayah pansela memiliki pengelompokan spasial kemiskinan yang lebih kompleks di bandingkan wilayah pansela, hal ini terbukti dengan pembangunan jalur lintas selatan yang masih terhambat dengan permasalahan pembebasan tanah.

B. Pengaruh Aspek Non Spasial Kemiskinan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model *Spasial Durbin Model* (SDM) menunjukkan bahwa **pertumbuhan ekonomi terbukti mampu menurunkan kemiskinan di wilayah pantura**. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian sejalan dengan teori Kuznet yang menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur angsur berkurang (Kuznets, 1955). Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Peningkatan produksi barang dan jasa serta pendapatan per kapita biasanya terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan ekonomi ini dapat memberikan peluang baru bagi individu dan keluarga untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil seringkali diikuti oleh peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat, hal tersebut dapat memungkinkan individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, layanan kesehatan dan pendidikan yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat seringkali dapat mengalokasikan lebih banyak sumberdaya untuk investasi dalam infrastruktur dan program-program sosial, misalnya investasi dalam

pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang terjangkau, serta program bantuan sosial yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian Adams Jr (2004), Adeleye et al (2020), Fosu (2017), Perera & Lee (2013), Wan et al (2021), Hassan et al (2015) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, Permadi (2018) juga mengungkapkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejalan juga dengan riset yang dilakukan Marrero & Servén (2021) menyatakan korelasi antara pertumbuhan dengan kemiskinan bersifat negatif. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Dollar et al (2016) dan X. Chen et al (2015) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memecahkan masalah kemiskinan.

Namun berbeda dengan hasil analisis di wilayah pansela yang menunjukkan bahwa **pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh kemiskinan yang tinggi**, hal ini menandakan bahwa tidak selalu pertumbuhan ekonomi diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata. Jika pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan bagian masyarakat tertentu, perbedaan pendapatan dapat meningkat, meningkatkan perbedaan antara orang kaya dan miskin sehingga hal ini yang dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Menurut Suparmoko (2008) Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan pemerataan pendapatan tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu perlu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Hasil tersebut sesuai dengan riset yang dikemukakan (Hassan et al., 2015) yang menyatakan dalam jangka panjang ada hubungan positif yang signifikan antara PDB dan kemiskinan. Semestara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan riset Adams Jr (2004), Adeleye et al (2020), Fosu (2017), Perera & Lee (2013), Wan et al (2021), Hassan et al (2015)

dan Permadi (2018) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan.

Dapat disimpulkan dari hasil analisis pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di wilayah pantura dan pansela memiliki perbedaan. **Pertumbuhan ekonomi tinggi dapat menurunkan angka kemiskinan di Wilayah Pantura.** Arsyad (2010) berpendapat pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan terhadap akumulasi modal berupa investasi infrastruktur dan investasi sumber daya manusia. Wilayah Pantura sepanjang tahun 2012-2022 pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, pada tahun 2020-2022 angka pertumbuhan mencapai 10.11% (Badan Pusat Statistik, 2023), hal ini dapat mendorong pemerintah melakukan investasi di bidang infrastruktur fisik berupa pembangunan jalan, penyediaan listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil di wilayah Pantura juga dapat mendorong peningkatan investasi sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, yang akan memungkinkan penduduk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bersaing di pasar tenaga kerja dan pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan.

Wilayah Pansela menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh kemiskinan yang tinggi, hal ini menandakan bahwa tidak selalu pertumbuhan ekonomi diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023 tercatat bahwa Gini Ratio Wilayah Pansela tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sekitar 2%, seperti Kabupaten Lumajang tahun 2021 tercatat 0,309% tahun 2022 tercatat 0,349% tahun 2023 tercatat 0,391%, Walaupun angka pertumbuhan ekonominya cenderung mengalami peningkatan positif yakni sekitar 9.67% pada tahun 2022 tidak selalu merata di seluruh daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang lebih cepat di beberapa daerah, seperti perkotaan atau industri, dibandingkan di daerah pedesaan atau terpencil, hal ini dapat meningkatkan perbedaan ekonomi antara daerah yang makmur dan yang kurang makmur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah yang kurang makmur.

2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela

Berdasarkan hasil analisis analisis menggunakan model *Spatial Durbin Model* (SDM) diketahui bahwa **pendidikan terbukti mampu menurunkan kemiskinan di wilayah pantura**. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Nurkse (1971) menyatakan bahwa pendidikan mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas sumber daya yang rendah pula. Ketika kualitas sumber daya yang ada rendah akan berdampak pada produktivitas yang menurun. Menurunnya produktivitas akan mempengaruhi upah yang rendah sehingga menyebabkan bertambahnya kemiskinan.

Hasil penelitian juga sesuai dengan beberapa riset yaitu Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe (2014) yang mengungkapkan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, hal serupa dikemukakan oleh K.-M. Chen & Wang (2015), Mai & Mahadevan (2016), Bici (2017) mengatakan bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan melalui perbaikan sumberdaya manusianya (*human capital*). Sejalan juga dengan riset Hofmarcher (2021) Garza-Rodriguez et al (2021), Tilak (2007) Mohanty & Swain (2019) Peng et al (2019), D. E. Bloom et al (2006) menyatakan tingkat pendidikan merupakan salahsatu penentu utama kemiskinan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian yaitu Suropto & Subayil (2020) Zhang (2014), Barham, et al. (1995) Bonal (2007) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan.

Adanya pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di wilayah pantura disebabkan karena tingkat pendidikan yang tinggi khususnya

lulusan sarjana yang semakin meningkat setiap tahunnya, rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Perguruan Tinggi) di Wilayah Pantura mencapai 7,29% diatas pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Perguruan Tinggi) di Provinsi Jawa Timur yaitu 6,21% (Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2023). Pendidikan yang baik akan membuka akses lebih besar ke peluang pekerjaan yang lebih baik sehingga akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, adanya pendapatan yang tinggi dapat membantu seseorang keluar dari kemiskinan dengan memberikan akses kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang baik.

Berbeda dengan hasil analisis menggunakan *Spasial Durbin Model* (SDM) di Wilayah Pansela diketahui bahwa **pendidikan yang tinggi diikuti dengan kemiskinan yang tinggi**. Hal ini menandakan bahwa pendidikan yang tinggi justru menyebabkan kemiskinan khususnya di Wilayah Pansela, sejalan dengan riset yang dikemukakan Suripto & Subayil (2020) Zhang (2014), Barham, et al. (1995) Bonal (2007) yang menyatakan dampak Pendidikan tidak secara langsung dapat mengurangi kemiskinan dan bahkan menyebabkan kemiskinan yang tinggi.

Pendidikan memiliki dampak positif namun tidak signifikan dalam menurunkan kemiskinan di wilayah pansela. Sesuai data Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2023 rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Perguruan Tinggi) di Wilayah Pansela mencapai 4,52% jauh dibawah rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Perguruan Tinggi) Provinsi Jawa Timur yakni mencapai 6,21%. Lulusan pendidikan tinggi yang rendah menyebabkan kurangnya penguasaan keterampilan yang diperlukan dalam memasuki pasar kerja, disamping itu kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan dapat membatasi dampak pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan, hal ini tidak sejalan dengan beberapa riset yaitu Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe (2014) K.-M. Chen & Wang (2015), Mai & Mahadevan (2016), Bici (2017) Hofmarcher (2021) Garza-Rodriguez et al (2021), Tilak (2007) Mohanty & Swain (2019) Peng et al (2019),

D. E. Bloom et al (2006) menyatakan tingkat pendidikan merupakan salahsatu penentu utama kemiskinan.

Dapat disimpulkan **terdapat perbedaan hasil pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan** di kedua wilayah tersebut yaitu terkait kualitas pendidikan, wilayah Pantura yang terletak di sepanjang pantai utara Jawa Timur, memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang baik membantu masyarakat memasuki pasar kerja dengan lebih baik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan keterampilan yang baik, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghasilkan pendapatan yang memadai. Lulusan terdidik memiliki akses yang besar terhadap peluang ekonomi melalui pekerjaan yang stabil dan memulai usaha sendiri, sehingga dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka sendiri dan keluarga mereka. Dengan pendidikan yang baik dapat mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, wilayah pansela yang terletak di wilayah selatan pantai Jawa Timur memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah sehingga pendidikan yang tinggi tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Pendidikan yang rendah dapat menghambat keterampilan dan pengetahuan dalam memasuki pasar kerja. Kualitas pendidikan yang rendah dapat menghambat seseorang terhadap peluang ekonomi. Selain itu, lulusan perguruan tinggi dapat sulit keluar dari kemiskinan karena hal-hal seperti ketidaksetaraan upah, biaya hidup yang terus meningkat, dan ketidakstabilan ekonomi.

Selain kualitas pendidikan, ketersediaan fasilitas pendidikan juga menjadi penyebab perbedaan pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan karena kepadatan populasi yang lebih besar dan aksesibilitas yang lebih baik, Pantura memiliki lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi dibandingkan dengan Pansela. Ini bisa mencakup berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Solusi untuk memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan dari sisi pendidikan di wilayah pansela dengan meningkatkan investasi modal manusia berupa pendidikan karena menurut Nurske (1971) pendidikan merupakan kunci dalam meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan, pendidikan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan akumulasi modal.

3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Spasial Durbin Model* (SDM) diketahui bahwa **pengangguran yang tinggi akan diikuti dengan kemiskinan yang tinggi baik di Wilayah Pantura maupun Wilayah Pansela**, namun dampaknya tidak signifikan. Hal tersebut sejalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes yang menyatakan pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini dapat dilimpahkan pada mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan mengakibatkan kerugian, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, sehingga produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya menimbulkan kemiskinan. Menurut Sukirno (2011) pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mengurangi kekayaan yang dicapai seseorang. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yaitu penelitian M. Liu et al (2022), Ucha (2010), Xue & Zhong (2003), Mosley & Miller (2004), Faridi et al (2016) John & Morufu, (2013) Saunders (2002) berpendapat bahwa pengangguran meningkatkan risiko kemiskinan. Sejalan dengan Reinstadler & Ray (2010) berpendapat bahwa tingkat pengangguran regional dapat memiliki hubungan langsung terhadap kemiskinan. Efek langsung kemiskinan yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan pengangguran individu.

Namun hal ini tidak sesuai dengan Quy (2016) yang menyatakan pengangguran memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan, artinya pengangguran yang tinggi justru menurunkan kemiskinan.

Pengangguran dapat meningkatkan resiko kemiskinan, ketika angka pengangguran naik maka angka kemiskinan akan relatif lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena beberapa wilayah di Pantura merupakan wilayah dengan biaya hidup yang relatif tinggi, seperti Kabupaten Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, ketika mereka kehilangan pekerjaan maka sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan biaya hidup yang relatif tinggi, sehingga dapat meningkatkan resiko kemiskinan. Selain itu, beberapa wilayah di Pantura seperti Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo adalah wilayah pertanian, dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan, pengangguran di sektor pertanian dapat meningkatkan risiko kemiskinan jika produksi pertanian turun atau harga komoditas pertanian turun, pendapatan para petani akhirnya dapat menurun, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kemiskinan di daerah tersebut.

Wilayah Pansela sebagian besar masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, atau pertambangan. Masyarakat akan menghadapi risiko peningkatan pengangguran dan kemiskinan jika terjadi penurunan dalam sektor-sektor ini, baik karena perubahan ekonomi seperti penurunan harga komoditas maupun faktor alam seperti kekeringan atau banjir.

4. Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Spasial Durbin Model* (SDM) maka dapat diketahui bahwa **adanya sumber daya alam mampu mendorong peningkatan kemiskinan baik di Wilayah Pantura maupun Wilayah Pansela**, hal ini sejalan dengan teori *resource curse* Richard M. Auty (1995) yang berpendapat bahwa negara

yang kaya sumber daya alam justru merupakan negara yang lambat dalam mengembangkan perekonomian di wilayahnya sehingga akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan. Menurut Teori *Paradox of Plenty*, juga dikenal sebagai “*resource curse*”, adalah ketika negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam sering mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, tingkat korupsi yang lebih tinggi, konflik politik, dan standar hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang lebih sedikit.

Namun *resource curse* yang dimaksud dalam temuan penelitian ini merupakan *resource curse* yang bersumber dari sektor pertanian. Fenomena dimana Negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya di sektor pertanian justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi pendapatan Negara (Heryawan, 2014)

Negara-negara yang bergantung pada ekspor sumber daya alam dapat mengalami ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor ini, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan ketidakstabilan makroekonomi saat harga komoditas berubah-ubah. Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa studi empiris yang dilakukan oleh Schleicher et al (2018), Gray & Moseley (2005) Malerba (2020) menyebutkan terdapat korelasi positif antara sumber daya alam dengan kejadian kemiskinan, sehingga masing-masing Negara yang kaya akan sumber daya alam justru terjebak pada kemiskinan karena belum mampu mengolah sumber daya alam dengan baik.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Wright & Czelusta (2004) sumber daya alam menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut penelitian ini juga tidak sejalan dengan riset Zhou & Xiong (2018), Gao et al (2020) Birungi et al (2005), X. Chen et al (2015) Ge et al (2021) Kassa et al (2021) menyatakan sumber daya alam khususnya sektor pertanian memerankan peranan penting dalam menurunkan kemiskinan.

Walaupun wilayah Pantura dan Pansela memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian yang subur, hasil laut dan hasil hutan, namun tidak mampu menurunkan kemiskinan, hal ini sesuai teori jebakan sumber daya alam, yang menyatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam justru akan terjebak pada masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dibandingkan negara yang minim sumber daya alam.

Belum adanya optimalisasi nilai tambah produk (*value added*) sumber daya alam dapat meningkatkan kemiskinan, hal tersebut diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penguatan teknologi, diversifikasi produk, pengelolaan berkelanjutan, akses terhadap pasar, nilai tambah dan rantai pasok produk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2012-2022, share sektor pertanian terhadap PDRB di Wilayah Pantura dan Pansela mengalami penurunan. Di Wilayah Pantura sendiri turun 3,43% dari 15,65% tahun 2012 menjadi 12,22% pada tahun 2022, sedangkan di Wilayah Pansela turun mencapai 6,5% dari 29,68% pada tahun 2012 menjadi 23,14% tahun 2022. Hal ini menandakan adanya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri sehingga menyebabkan terjadi pergeseran struktur ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian ke sektor industri modern karena adanya efek urbanisasi. Sehingga penurunan share sektor pertanian tersebut menjadikan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar daerah yang bergantung pada sektor pertanian (pedesaan) dan daerah yang bergantung pada sektor industri (perkotaan).

Tanah dan sumber daya alam adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan proses pembangunan ekonomi Negara (Suparmoko, 2016). Selama ini rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian di Jawa Timur semakin menurun, berdasarkan hasil survey pertanian antar sensus (Sutas), 2018 mencapai rata-rata 3.531,26 menurun dari tahun 2013 yakni 8.900 , sehingga menjadikan tenaga

kerja yang bekerja disektor pertanian justru tidak mendapat manfaat dari kenaikan harga komoditas pertanian karena mereka hanya bekerja sebagai buruh tani bukan pemilik tanah. Kesejahteraan hanya akan dirasakan oleh pemilik tanah dan kemiskinan akan dirasakan oleh buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Hal ini menjadi sebuah *novelty* dalam penelitian ini, dimana adanya kekayaan sumber daya alam tidak menjamin suatu wilayah tersebut dapat keluar dari kemiskinan, wilayah pantura dan pansela yang memiliki sektor pertanian, perikanan yang baik namun belum mampu keluar dari kemiskinan.

5. Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Spasial Durbin Model* (SDM) baik kedua wilayah yaitu **wilayah pantura dan pansela, kesehatan (*morbidity rate*) memiliki dampak negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.** Menurut Todaro & Smith (2003) kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan merupakan inti makna pembangunan yang sebenarnya yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara hasil ini sesuai dengan beberapa riset yang menyatakan serupa yaitu riset yang dilakukan oleh Gragnolati & Marini (2003) status kesehatan tidak signifikan mengurangi kemiskinan.

Namun penelitian ini bertentangan dengan beberapa riset Gupta & Mitra (2004), D. Bloom & Canning (2003), Buddelmeyer & Cai (2009), Gounder & Xing (2012) Grant (2005) Novignon, Mussa, & Chiwaula (2012) Weziak-Bialowolska (2016), W. Liu, Li, & Zhao (2020) Szwarcwald, et al. (2000) yang menyatakan kondisi kesehatan yang buruk akan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Kesehatan memiliki dampak negatif namun tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela Jawa Timur hal ini disebabkan karena kesehatan bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab kemiskinan, misalnya kurangnya kesempatan kerja, pendidikan

yang buruk, kurangnya infrastruktur yang layak, disamping itu beberapa orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang baik namun tetap mengalami kemiskinan karena alasan lain misal kondisi sosial, ekonomi atau politik tertentu yang berada diluar kendali masyarakat menyebabkan mereka tetap berada dalam kondisi kemiskinan.

Sesuai data BPS, Jawa Timur 2023 terkait distribusi penduduk yang mengalami keluhan sakit selama sebulan terakhir dan tidak melakukan pengobatan karena tidak mempunyai biaya untuk berobat sekitar 0.42% pada tahun 2021 dan meningkat sebesar 0.54% pada tahun 2022. Hal ini menandakan kelompok masyarakat miskin, ketika mengalami sakit mereka cenderung menunda untuk melakukan pengobatan medis karena khawatir akan biaya perawatan yang mahal dan tentunya mempengaruhi pendapatan mereka dan menyebabkan beban financial bagi keluarga, sehingga angka kesakitan tidak akan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan. Sedangkan berbeda dengan sekelompok orang yang berpendapatan tinggi, ketika mereka sakit mereka cenderung akan cuti dan memilih melakukan perawatan kesehatan yang baik dan memadai, disamping karena pendapatan mereka yang tinggi, karena pekerja yang berpendapatan tinggi memiliki pekerjaan yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan jadwal kerja saat mereka sakit. Mereka juga dapat membayar layanan rumah tangga atau bantuan tambahan untuk membantu mereka menyelesaikan tugas rumah tangga selama masa pemulihan.

Sebab lain kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu tidak semua dampak kesehatan langsung terlihat dalam angka kemiskinan, efek dari kesehatan yang buruk tidak akan langsung terlihat dalam statistik kemiskinan. Walaupun kesehatan yang buruk dapat menjadi faktor penentu kemiskinan, dampaknya tidak selalu terukur dengan jelas dalam angka statistik kemiskinan.

6. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Spasial Durbin Model* (SDM), variabel **aksesibilitas mampu menurunkan kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela**. Hal tersebut menandakan bahwa semakin baik aksesibilitas seseorang terhadap infrastruktur fisik maka akan memudahkan seseorang tersebut lepas dari jeratan kemiskinan. Hasil penelitian juga senada dengan yang di kemukakan oleh Warr (2010) yang menyatakan bahwa penurunan kemiskinan dikaitkan dengan peningkatan akses aksesibilitas terutama aksesibilitas jalan. Beberapa riset juga menyebutkan aksesibilitas berpengaruh terhadap kemiskinan di suatu wilayah Liang, Li, Zeng, & Wu (2022), Martens & Bastiaanssen (2019), Sugasawa (2019), Ahlström, Pilesjö, & Lindberg (2011), Edith, Jaffu, & John (2011), Minot, Baulch, & Epprecht (2006), Pozzi, Robinson, & Nelson (2009).

Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Amaliah & Ulimaz (2021), Cahyadi et al (2020) yang menyatakan aksesibilitas terhadap layanan infrastruktur seperti jalan menunjukkan semakin jauh seseorang mengakses layanan infrastruktur maka semakin tinggi tingkat kemiskinan. Aksesibilitas yang tinggi justru menyebabkan kemiskinan semakin tinggi.

Aksesibilitas wilayah berpengaruh besar terhadap penurunan kemiskinan di Wilayah pantura dan pansela Jawa Timur, hal ini disebabkan kondisi wilayah yang memiliki aksesibilitas yang baik cenderung memiliki akses lebih mudah ke layanan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya sehingga dapat membantu masyarakat meningkatkan akses terhadap kualitas hidup dan pendidikan yang baik sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.

Wilayah yang mudah di akses memungkinkan konektivitas ekonomi yang lebih baik, memfasilitasi perdagangan dan pertukaran barang dan jasa, hal ini dapat membuka peluang bisnis, meningkatkan akses pasar

dan membantu pengusaha lokal dalam meningkatkan pendapatan. Selain itu aksesibilitas yang baik dapat memicu pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menarik investasi baru, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata, sehingga dapat menciptakan peluang ekonomi yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan. Aksesibilitas yang baik juga memungkinkan mobilitas penduduk yang lebih besar, penduduk dapat dengan mudah mencari pekerjaan ke tempat lain, mengakses pendidikan yang lebih baik, bahkan memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik di tempat lain, hal ini dapat membuka peluang bagi penduduk yang berada di wilayah dengan akses terbatas terhadap pemenuhan layanan tersebut.



BAB 6

PENUTUP

Dalam penutup ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan. *Pertama*, terdapat dependensi spasial antar wilayah di wilayah pantura dan pansela melalui interaksi endogen dan eksogen antar variabel independen yang dapat diartikan bahwa meningkatnya kemiskinan akan mempengaruhi meningkatnya kemiskinan di wilayah yang berdekatan (tetangga). Hal tersebut dapat diartikan bahwa jika suatu kemiskinan suatu wilayah tinggi akan menyebabkan kemiskinan pada daerah lain yang berdekatan, dan sebaliknya jika suatu wilayah tingkat kemiskinannya rendah maka akan diikuti oleh daerah lain yang berdekatan dengan tingkat kemiskinan yang juga rendah. Pengaruh meningkatnya kemiskinan ke daerah tetangga lebih cepat di wilayah pansela di bandingkan wilayah pantura. Hal ini tentunya menjadi sebuah *Novelty* dalam penelitian ini, karena ternyata kemiskinan di masing-masing daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan di wilayah yang berdekatan baik di wilayah pantura maupun di wilayah pansela dengan penyebaran kemiskinan ke daerah tetangga lebih cepat di wilayah pansela dibandingkan wilayah pantura.

Kedua, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah pantura. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan awal proses pembangunan yang pada

akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah pansela, hal ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak merata, dengan sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh sektor atau individu tertentu. Jika pertumbuhan terkonsentrasi di sektor tertentu, sementara sektor lain atau kelompok masyarakat tertentu tidak merasakan dampaknya, kesenjangan ekonomi dapat meningkat. Kesenjangan ini juga terlihat dari sisi spasial yang lebih terfokus pada kawasan urban atau pusat-pusat ekonomi diluar wilayah pansela, hal ini tentunya dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antar wilayah pansela dan wilayah lain yang mengalami pertumbuhan yang cepat, seperti Kabupaten Surabaya dengan Kabupaten Lumajang yang memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan.

Ketiga, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah pantura. Lulusan terdidik memiliki akses yang besar terhadap peluang ekonomi melalui pekerjaan yang stabil dan memulai usaha sendiri, sehingga dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka sendiri dan keluarga mereka. Dengan pendidikan yang baik dapat mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan di Wilayah Pansela Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan, Pendidikan yang rendah dapat menghambat keterampilan dan pengetahuan dalam memasuki pasar kerja. Kualitas pendidikan yang rendah dapat menghambat seseorang terhadap peluang ekonomi. Selain itu, lulusan perguruan tinggi dapat sulit keluar dari kemiskinan karena hal-hal seperti ketidaksetaraan upah, biaya hidup yang terus meningkat, dan ketidakstabilan ekonomi.

Keempat, pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan baik di Wilayah Pantura maupun Wilayah Pansela. Pengangguran dapat meningkatkan resiko kemiskinan, ketika angka pengangguran naik maka angka kemiskinan akan relatif lebih tinggi. Hal

ini disebabkan karena beberapa wilayah di Pantura merupakan wilayah dengan biaya hidup yang relatif tinggi, seperti Kabupaten Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, ketika mereka kehilangan pekerjaan maka sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan biaya hidup yang relatif tinggi, sehingga dapat meningkatkan resiko kemiskinan. Sedangkan Wilayah Pansela sebagian besar masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, atau pertambangan. Masyarakat akan menghadapi risiko peningkatan pengangguran dan kemiskinan jika terjadi penurunan dalam sektor-sektor ini, baik karena perubahan ekonomi seperti penurunan harga komoditas maupun faktor alam seperti kekeringan atau banjir.

Kelima, sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan baik di Wilayah Pantura maupun Wilayah Pansela, Walaupun wilayah Pantura dan Pansela memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian yang subur, tambang mineral, hasil laut dan hasil hutan, namun tidak mampu menurunkan kemiskinan, hal ini sesuai teori *resource curse*, yang menyatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam justru akan terjebak pada masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dibandingkan negara yang minim sumber daya alam. Belum adanya optimalisasi nilai tambah produk (*value added*) sumber daya alam dapat meningkatkan kemiskinan, selain itu adanya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri sehingga menyebabkan terjadi pergeseran struktur ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian ke sektor industri modern karena adanya efek urbanisasi. Tanah dan sumber daya alam adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan proses pembangunan ekonomi Negara (Suparmoko, 2016). Selama ini rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian di Jawa Timur semakin menurun, berdasarkan hasil survey pertanian antar sensus (Sutas), 2018 mencapai rata-rata 3.531,26 menurun dari tahun 2013 yakni 8.900 , sehingga menjadikan tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian justru tidak mendapat manfaat dari kenaikan harga komoditas pertanian karena mereka hanya bekerja

sebagai buruh tani bukan pemilik tanah. Kesejahteraan hanya akan dirasakan oleh pemilik tanah dan kemiskinan akan dirasakan oleh buruh tani yang tidak memiliki tanah. Hal ini sekaligus menjadi sebuah *Novelty* dalam penelitian sesuai teori *resource curse* dengan sumber daya sektor pertanian yang melimpah di Wilayah Pantura dan Pansela justru tidak dapat keluar dari kemiskinan.

Keenam, kesehatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di wilayah pantura dan pansela. Karena Sesuai data BPS, Jawa Timur 2023 terkait distribusi penduduk yang mengalami keluhan sakit selama sebulan terakhir dan tidak melakukan pengobatan karena tidak mempunyai biaya untuk berobat sekitar 0.42% pada tahun 2021 dan meningkat sebesar 0.54% pada tahun 2022. Hal ini menandakan kelompok masyarakat miskin, ketika mengalami sakit mereka cenderung menunda untuk melakukan pengobatan medis karena khawatir akan biaya perawatan yang mahal dan tentunya mempengaruhi pendapatan mereka dan menyebabkan beban financial bagi keluarga, sehingga angka kesakitan tidak akan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan. Sedangkan berbeda dengan sekelompok orang yang berpendapatan tinggi, ketika mereka sakit mereka cenderung akan cuti dan memilih melakukan perawatan kesehatan yang baik dan memadai, disamping karena pendapatan mereka yang tinggi, karena pekerja yang berpendapatan tinggi memiliki pekerjaan yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan jadwal kerja saat mereka sakit. Mereka juga dapat membayar layanan rumah tangga atau bantuan tambahan untuk membantu mereka menyelesaikan tugas rumah tangga selama masa pemulihan.

Ketujuh, aksesibilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Wilayah Pantura dan Pansela. Kondisi wilayah yang memiliki aksesibilitas yang baik cenderung memiliki akses lebih mudah ke layanan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya sehingga dapat membantu masyarakat meningkatkan akses terhadap kualitas hidup dan pendidikan yang baik sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan. Aksesibilitas wilayah

sekaligus menjadi *novelty* dalam penelitian ini karena belum banyak riset yang mengulas terkait pemanfaatan jaringan jalan yang dapat mempengaruhi terhadap penurunan kemiskinan.

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran untuk pengembangan lanjutan sebagai berikut: Pertama, adanya dependensi spasial kemiskinan antar wilayah memerlukan program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial dengan menggabungkan informasi spasial dan analisis data kemiskinan. Data spasial digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau konsentrasi kemiskinan tinggi, data spasial juga digunakan untuk memetakan distribusi kemiskinan di seluruh ruang dan mengidentifikasi kluster kemiskinan. Selain itu analisis data kemiskinan dengan memetakan determinan kemiskinan baik data sosial maupun ekonomi sehingga terpotret lokasi dan program yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pantura dan pansela. Data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat program penganggulungan kemiskinan lebih mudah, efisien, dan efektif. Dengan kebijakan yang terpadu, kebijakan penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada daerah yang memiliki konsentrasi kemiskinan tinggi sehingga tidak akan terjadi dependensi spasial kemiskinan antar daerah yang berdekatan.

Kedua, pemerintah dapat melakukan peningkatan *pertumbuhan ekonomi* inklusif dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi seperti, program kredit usaha kecil menyediakan akses permodalan usaha bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke lembaga perbankan formal dan menumbuhkan sektor-sektor ekonomi khususnya di wilayah pansela.

Ketiga, mengembangkan Pendidikan yang berkualitas dan akses pendidikan kesemua lapisan masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan berpenghasilan rendah melalui pendidikan gratis dan subsidi pendidikan, penguatan keterampilan, pengetahuan dan hubungan sosial untuk memasuki pasar kerja khususnya di wilayah pansela.

Keempat, pengelolaan dan pemanfaatan *sumber daya alam* yang berkelanjutan melalui Penerapan sistem pertanian terpadu di beberapa wilayah yang menggabungkan berbagai jenis usaha tani seperti tanaman, ternak, dan perikanan untuk memaksimalkan pendapatan petani dan menjaga kesuburan tanah diharapkan dapat keluar dari *resource curse* sehingga dapat meningkatkan hasil dari sumber daya alam seperti sektor pertanian, serta pengembangan program diversifikasi produk pertanian untuk menambah value added di sektor pertanian baik wilayah pantura maupun pansela.

Kelima, penguatan jaringan sosial dan perlindungan sosial melalui bantuan sosial dan layanan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan dan pelatihan keterampilan guna mendukung terciptanya lapangan kerja baru dan peluang ekonomi masyarakat yang rentang terhadap kemiskinan baik di wilayah pantura maupun pansela.

Keenam, pemerintah hendaknya meningkatkan anggaran kesehatan sehingga ada lebih banyak dana untuk subsidi obat-obatan dan perawatan medis bagi masyarakat miskin. Mengembangkan atau memperluas program asuransi kesehatan nasional yang mencakup berbagai jenis kondisi medis dan penyakit, serta memastikan cakupan untuk pengobatan mahal seperti penyakit langka dan kronis. Menyediakan layanan kesehatan yang memadai terutama di daerah terpencil, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan baik di wilayah pantura maupun pansela.

Ketujuh, peningkatan aksesibilitas wilayah di wilayah pantura dan pansela jawa timur dengan melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, di wilayah pantura meningkatkan akses jalan penumpang dan barang termasuk pembangunan *underpass* dan *flyover* di beberapa titik rawan kemacetan, di wilayah pansela dengan mempercepat jalur lintas selatan yang menghubungkan daerah-daerah disepanjang jalan pantai selatan jawa timur sehingga dapat membuka akses kota dan kabupaten yang relatif kurang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulai, A.-M., Shamshiry, E., Abdulai, A.-M., & Shamshiry, E. (2014). Theory and practice on the nexus between poverty, natural resources and governance. *Linking Sustainable Livelihoods to Natural Resources and Governance: The Scale of Poverty in the Muslim World*, 11-40.
- Adams Jr, R. H. (2004). Economic growth, inequality and poverty: estimating the growth elasticity of poverty. *World Development*, 32(12), 1989-2014.
- Adeleye, B. N., Gershon, O., Ogundipe, A., Owolabi, O., Ogunrinola, I., & Adediran, O. (2020). Comparative investigation of the growth-poverty-inequality trilemma in Sub-Saharan Africa and Latin American and Caribbean Countries. *Heliyon*, 6(12), e05631.
- Ahlström, A., Pilesjö, P., & Lindberg, J. (2011). Improved accessibility modeling and its relation to poverty – A case study in Southern Sri Lanka. *Habitat International*, 35(2), 316-326. doi: <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2010.11.002>
- Akinyemi, F. O., & Bigirimana, F. (2012). A Spatial Analysis of Poverty in Kigali, Rwanda using indicators of household living standard. *Rwanda Journal*, 26, 3-22.
- Ali, K., Partridge, M. D., & Olfert, M. R. (2007). Can geographically weighted regressions improve regional analysis and policy making? *International Regional Science Review*, 30(3), 300-329.

- Álvarez-Gamboa, J., Cabrera-Barona, P., & Jácome-Estrella, H. (2021). Financial inclusion and multidimensional poverty in Ecuador: A spatial approach. *World Development Perspectives*, 22, 100311.
- Amaliah, Y., & Ulimaz, M. (2021). Spatial modeling on the influence of social network and infrastructure accessibility on the number of poverty alleviation program recipients in Budaya Pampang Village. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 739(1), 012054. doi: 10.1088/1755-1315/739/1/012054
- Anselin, L., & Hudak, S. (1992). Spatial econometrics in practice: A review of software options. *Regional science and urban economics*, 22(3), 509-536.
- Anselin, L., & Rey, S. J. (2010). Perspectives on spatial data analysis *Perspectives on spatial data analysis* (pp. 1-20): Springer.
- Auty, R. M. (1995). Economic Development and the Resource Curse Thesis. In O. Morrissey & F. Stewart (Eds.), *Economic and Political Reform in Developing Countries* (pp. 58-80). London: Palgrave Macmillan UK.
- Auty, R. M., & Mikesell, R. F. (1998). *Sustainable development in mineral economies*: Clarendon Press.
- Bank, W. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *The World Bank*, 112(483), 211-212.
- Barham, V., Boadway, R., Marchand, M., & Pestieau, P. (1995). Education and the poverty trap. *European Economic Review*, 39(7), 1257-1275.
- Bhattacharyya, A., Haldar, S. K., & Banerjee, S. (2021). Determinants of crime against women in India: A spatial panel data regression analysis. *Millennial Asia*, 09763996211003379.
- Bici, R. (2017). Education as an Important Dimension of the Poverty. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(3), 88-95.
- Bird, K., Higgins, K., & Harris, D. (2010). Spatial poverty traps: An overview.

- Birungi, P., Okwi, P. O., & Isoke, D. (2005). Incorporating environmental factors in poverty analysis using small area estimation and spatial regression techniques: The case of land use indicators in Uganda. *A draft report prepared for Poverty Evaluation Project (PEP)*.
- Bloom, D., & Canning, D. (2003). The health and poverty of nations: from theory to practice. *Journal of human development*, 4(1), 47-71.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Chan, K. (2006). *Higher education and economic development in Africa* (Vol. 102): World Bank Washington, DC.
- Boediono, D. (2012). *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama*: Yogyakarta.
- Bonal, X. (2007). On global absences: Reflections on the failings in the education and poverty relationship in Latin America. *International Journal of Educational Development*, 27(1), 86-100.
- Booth, A. (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities*: Springer.
- Bourguignon, F. (2003). The growth elasticity of poverty reduction: explaining heterogeneity across countries and time periods. *Inequality and growth: Theory and policy implications*, 1(1).
- Bourguignon, F., & Chakravarty, S. R. (2003). *The Measurement Of*. Paper presented at the Journal Of Economic Inequality 1: 25--49, 2003.
- Brunsdon, C., Fotheringham, S., & Charlton, M. (1998). Geographically weighted regression. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, 47(3), 431-443.
- Buddelmeyer, H., & Cai, L. (2009). Interrelated dynamics of health and poverty in Australia.
- Bradshaw, T. K. (2006). Rural Poverty Research Center.
- Cahyadi, N., Wibisono, I. D., Syamsulhakim, E., & Setiawan, A. (2020). Towards Spatial Poverty Targeting: Identification of Poverty Clustering in Indonesia: Go to reference in article.

- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and urbanization*, 7(1), 173-204.
- Chen, A. (2010). Reducing China's regional disparities: Is there a growth cost? *China Economic Review*, 21(1), 2-13.
- Chen, J., Wang, Y., Wen, J., Fang, F., & Song, M. (2016). The influences of aging population and economic growth on Chinese rural poverty. *Journal of Rural Studies*, 47, 665-676.
- Chen, K.-M., & Wang, T.-M. (2015). Determinants of poverty status in Taiwan: A multilevel approach. *Social Indicators Research*, 123(2), 371-389.
- Chen, X., Pei, Z., Chen, A. L., Wang, F., Shen, K., Zhou, Q., & Sun, L. (2015). Spatial Distribution Patterns and Influencing Factors of Poverty - A Case Study on Key Country From National Contiguous Special Poverty-stricken Areas in China. *Procedia Environmental Sciences*, 26, 82-90. doi: <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.05.005>
- Creswell, J. W. (2013). Steps in conducting a scholarly mixed methods study.
- Dambudzo, I. I. A Spatial Analysis Of Poverty And Roads Network In Sofala Province Ibraimo Hassane Mussagy.
- Davis, E. P. (2014). A review of the economic theories of poverty.
- Debarys, N., & Ertur, C. (2010). Testing for spatial autocorrelation in a fixed effects panel data model. *Regional Science and Urban Economics*, 40(6), 453-470.
- Dollar, D., Kleineberg, T., & Kraay, A. (2016). Growth still is good for the poor. *European Economic Review*, 81, 68-85.
- Edith, K., Jaffu, C., & John, M. (2011). The impact of road accessibility of rural villages on recognition of poverty reduction opportunities. *African Journal of Marketing Management*, 3(2), 22-31.
- Elhorst, J. P. (2014). *Spatial econometrics from cross-sectional data to spatial panels*: Springer.

- Faridi, M. Z., Chaudhry, M. O., Farooq, F., & Arif, R. (2016). Labor Force Participation and Poverty Alleviation in Pakistan: An Empirical Analysis. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 36(2).
- Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. *Research in Economics*, 71(2), 306-336.
- Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., & Charlton, M. (2003). *Geographically weighted regression: the analysis of spatially varying relationships*: John Wiley & Sons.
- Gao, P., Liu, S., Qi, W., & Qi, H. (2020). The nexus between poverty and the environment: A case study of Lijiang, China. *Sustainability*, 12(3), 1066.
- Garza-Rodriguez, J., Ayala-Diaz, G. A., Coronado-Saucedo, G. G., Garza-Garza, E. G., & Ovando-Martinez, O. (2021). Determinants of poverty in Mexico: A quantile regression analysis. *Economies*, 9(2), 60.
- Ge, Y., Ren, Z., & Fu, Y. (2021). Understanding the Relationship between Dominant Geo-Environmental Factors and Rural Poverty in Guizhou, China. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 10(5), 270.
- Gounder, R., & Xing, Z. (2012). Impact of education and health on poverty reduction: Monetary and non-monetary evidence from Fiji. *Economic Modelling*, 29(3), 787-794.
- Gragnotati, M., & Marini, A. (2003). Health and poverty in Guatemala. *Available at SSRN 636328*.
- Grant, U. (2005). Health and poverty linkages: perspectives of the chronically poor. *Chronic Poverty Research Centre Working Paper(2008-09)*.
- Gray, L. C., & Moseley, W. G. (2005). A geographical perspective on poverty–environment interactions. *Geographical Journal*, 171(1), 9-23.

- Gupta, I., & Mitra, A. (2004). Economic growth, health and poverty: An exploratory study for India. *Development policy review*, 22(2), 193-206.
- Hassan, S. A., Zaman, K., & Gul, S. (2015). The relationship between growth-inequality-poverty triangle and environmental degradation: unveiling the reality. *Arab Economic and Business Journal*, 10(1), 57-71.
- Heryawan, A., Fauzi, A., & Hidayat, A. (2014). Analisis ekonomi dan kebijakan sumber daya alam Provinsi Jawa Barat. *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, 1(2), 1-11.
- Hidalgo-Hidalgo, M., & Iturbe-Ormaetxe, I. (2014). Long-run effects on poverty of public expenditure in education: WP-AD.
- Higgins, K., Bird, K., & Harris, D. (2010). Policy responses to the spatial dimensions of poverty.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*.
- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83, 102124.
- Jefferson, P. N. (2012). *The Oxford handbook of the economics of poverty*: Oxford University Press.
- John, E., & Morufu, A. (2013). Unemployment and poverty: Implications for national security and good governance in Nigeria. *International Journal of Public Administration and Management Research*, 2(1), 1-11.
- Kassa, G., Teferi, B., & Delelegn, N. (2021). The Poverty-Environment Nexus in Developing Countries: Evidence from Ethiopia: A Systematic.
- Kiaušienė, I. (2015). Comparative assessment of women unemployment and poverty in European Union. *Intellectual Economics*, 9(2), 91-101.

- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan daerah: bagaimana membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan? : Salemba Empat.*
- Kutscherauer, A., Fachinelli, H., Hučka, M., Skokan, K., Sucháček, J., Tománek, P., & Tuleja, P. (2010). Regional disparities in regional development of the Czech Republic. *Ostrava: University Of Ostrava.*
- Kuznets, S. (1955). American Economic Association. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- LeSage, J. P. (1999). The theory and practice of spatial econometrics. *University of Toledo. Toledo, Ohio*, 28(11), 1-39.
- Liang, Y., Li, S., Zeng, J., & Wu, T. (2022). Examining the impact of multidimensional accessibility on regional poverty in Laos. *Applied Geography*, 148, 102789. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102789>
- Liu, M., Ge, Y., Hu, S., Stein, A., & Ren, Z. (2022). The spatial-temporal variation of poverty determinants. *Spatial Statistics*, 50, 100631. doi: <https://doi.org/10.1016/j.spasta.2022.100631>
- Liu, M., Ge, Y., Hu, S., & Hao, H. (2023). The Spatial Effects of Regional Poverty: Spatial Dependence, Spatial Heterogeneity and Scale Effects. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 12(12), 501.
- Liu, M., Hu, S., Ge, Y., Heuvelink, G. B., Ren, Z., & Huang, X. (2021). Using multiple linear regression and random forests to identify spatial poverty determinants in rural China. *Spatial Statistics*, 42, 100461.
- Liu, W., Li, J., & Zhao, R. (2020). Rural public expenditure and poverty alleviation in China: A spatial econometric analysis. *Journal of Agricultural Science*, 12(6), 46-56.
- Mai, T., & Mahadevan, R. (2016). A research note on the poverty dynamics and cost of poverty inequality: Case study of Indonesia. *Economic Analysis and Policy*, 49, 100-107.

- Malerba, D. (2020). Poverty alleviation and local environmental degradation: An empirical analysis in Colombia. *World Development*, 127, 104776.
- Malizia, E., Feser, E., Renski, H., & Drucker, J. (2020). *Understanding local economic development*: Routledge.
- Marrero, G. A., & Servén, L. (2021). Growth, inequality and poverty: a robust relationship? *Empirical Economics*, 1-67.
- Marrero, G. A., & Servén, L. (2022). Growth, inequality and poverty: a robust relationship? *Empirical Economics*, 63(2), 725-791.
- Martens, K., & Bastiaanssen, J. (2019). 3 - An index to measure accessibility poverty risk. In K. Lucas, K. Martens, F. Di Ciommo & A. Dupont-Kieffer (Eds.), *Measuring Transport Equity* (pp. 39-55): Elsevier.
- Minot, N., Baulch, B., & Epprecht, M. (2006). Poverty and inequality in Vietnam: Spatial patterns and geographic determinants.
- Miro, F. (2005). Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi.
- Mohanty, B., & Swain, A. (2019). Identifying social group-wise household-level determinants of poverty in Rural Odisha using logistic regression model. *Journal of Statistical Theory and Practice*, 13(2), 1-12.
- Mosley, J. M., & Miller, K. K. (2004). Spatial variations in factors affecting poverty. *Public Policy publications (MU)*.
- Myrdal, G., & Sitohang, P. (1957). Economic theory and underdeveloped regions.
- Novignon, J., Nonvignon, J., Mussa, R., & Chiwaula, L. S. (2012). Health and vulnerability to poverty in Ghana: evidence from the Ghana Living Standards Survey Round 5. *Health economics review*, 2(1), 1-9.
- Nugroho, T., Wahyono, E. B., & Bimasena, A. N. (2011). Analisis Spasial-Analitik Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.

- Nurkse, R. (1971). The theory of development and the idea of balanced growth *Developing the underdeveloped countries* (pp. 115-128): Springer.
- Okwi, P. O., Ndeng'e, G., Kristjanson, P., Arunga, M., Notenbaert, A., Omolo, A., . . . Owuor, J. (2007). Spatial determinants of poverty in rural Kenya. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(43), 16769-16774.
- Peng, C., Fang, L., Wang, J. S.-H., Law, Y. W., Zhang, Y., & Yip, P. S. (2019). Determinants of poverty and their variation across the poverty spectrum: evidence from Hong Kong, a high-income society with a high poverty level. *Social Indicators Research*, 144(1), 219-250.
- Perera, L. D. H., & Lee, G. H. (2013). Have economic growth and institutional quality contributed to poverty and inequality reduction in Asia? *Journal of Asian Economics*, 27, 71-86.
- Permadi, Y. A. (2018a). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 216-233.
- Permadi, Y. A. (2018b). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 216-233.
- Pozzi, F., Robinson, T., & Nelson, A. (2009). Accessibility mapping and rural poverty in the horn of Africa. *PPLPI Working Paper-Pro-Poor Livestock Policy Initiative*, FAO(47).
- Quy, N. H. (2016). Relationship between economic growth, unemployment and poverty: Analysis at provincial level in Vietnam. *International Journal of Economics and Finance*, 8(12), 113-119.
- Ravallion, M. (1998). *Poverty lines in theory and practice* (Vol. 133): World Bank Publications.
- Reinstadler, A., & Ray, J.-c. (2010). Macro determinants of individual income poverty in 93 regions of Europe.
- Rustiadi, E. (2018). Perencanaan dan pengembangan wilayah.

- Sachs, J. D. (2005). Can extreme poverty be eliminated? *Scientific American*, 293(3), 56-65.
- Saefuddin, A., Setiabudi, N. A., & Achsani, N. A. (2011). Comparisson between Ordinary Linear Regression and Geographically Weighted Regression: With Application to Indonesian Poverty Data. *European Journal of Scientific Research*, 57(2), 275-285.
- Sameti, M., Esfahani, R. D., & Haghghi, H. K. (2012). Theories of poverty: A comparative analysis. *Kuwait chapter of Arabian journal of business and management review*, 1(6), 45-56.
- Saunders, P. (2002). The direct and indirect effects of unemployment on poverty and inequality. *Australian Journal of Labour Economics*, 5(4), 507-529.
- Schleicher, J., Schaafsma, M., Burgess, N. D., Sandbrook, C., Danks, F., Cowie, C., & Vira, B. (2018). Poorer without it? The neglected role of the natural environment in poverty and wellbeing. *Sustainable Development*, 26(1), 83-98.
- Sharp, A., & McDermott, P. (2009). *Workflow modeling: tools for process improvement and applications development*. Artech House.
- Shindo, Y. (2010). The effect of education subsidies on regional economic growth and disparities in China. *Economic Modelling*, 27(5), 1061-1068.
- Sugasawa, T. (2019). Accessibility to the nearest urban metropolitan area and rural poverty in Japan. *DSSR Discussion Papers*, 94, 1-30.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sukirno, S. (2011). Makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Suparmoko, M. (2016). Peranan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam Pembangunan. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 1-43.

- Suripto, S., & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Di Yogyakarta Priode 2010-2017. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127-143.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Syaadah, L., & Listyani, E. (2016). Spatial Autoregressive Model dan Matriks Pembobot Spasial Rook Contiguity untuk Pemodelan Gini Ratio di Indonesia Tahun 2014. *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika*, 5(4).
- Szajnowska-Wysocka, A. (2009). Theories of regional and local development-abridged review. *Bulletin of Geography. Socio-economic series*(12), 75–90-75–90.
- Szwarcwald, C. L., Bastos, F. I., Barcellos, C., de Fátima Pina, M., & Esteves, M. A. P. (2000). Health conditions and residential concentration of poverty: a study in Rio de Janeiro, Brazil. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 54(7), 530-536.
- Tamin, O. Z. (2000). *Perencanaan dan pemodelan transportasi*: Penerbit ITB.
- Tilak, J. B. (2007). Post-elementary education, poverty and development in India. *International Journal of Educational Development*, 27(4), 435-445.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan ekonomi: Di dunia ketiga*, Jilid 1.
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living*: Univ of California Press.
- Ucha, C. (2010). Poverty in Nigeria: Some dimensions and contributing factors. *Global Majority E-Journal*, 1(1), 46-56.

- USAID, Ý. (2006). Issues in Poverty Reduction and Natural Resource Management. *Washington, DC: United States Agency for International Development.*
- Wan, G., Hu, X., & Liu, W. (2021). China's poverty reduction miracle and relative poverty: Focusing on the roles of growth and inequality. *China Economic Review, 68*, 101643.
- Warr, P. (2010). Roads and poverty in rural Laos: An econometric analysis. *Pacific Economic Review, 15*(1), 152-169.
- Weziak-Bialowolska, D. (2016). Spatial variation in EU poverty with respect to health, education and living standards. *Social Indicators Research, 125*(2), 451-479.
- Wright, G., & Czelusta, J. (2004). Why economies slow: the myth of the resource curse. *Challenge, 47*(2), 6-38.
- Xu, Z., Cai, Z., Wu, S., Huang, X., Liu, J., Sun, J., . . . Weng, M. (2019). Identifying the geographic indicators of poverty using geographically weighted regression: a case study from qiandongnan miao and dong autonomous prefecture, Guizhou, China. *Social Indicators Research, 142*(3), 947-970.
- Xue, J., & Zhong, W. (2003). Unemployment, poverty and income disparity in urban China. *Asian Economic Journal, 17*(4), 383-405.
- Zhang, H. (2014). The poverty trap of education: Education–poverty connections in Western China. *International Journal of Educational Development, 38*, 47-58.
- Zhou, L., & Xiong, L.-Y. (2018). Natural topographic controls on the spatial distribution of poverty-stricken counties in China. *Applied Geography, 90*, 282-292.

Internet :

Shofihara, Inang Jalaludin. 2022. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/09/30/17045481/Penurunan-Kemiskinan-Jatim-2022-Terbaik-Nasional-Khofifah-Siap-Tan-cap-Gas?Page=All>). Diakses 04 Desember 2022.

<https://jatimprov.go.Id/>

<https://bps.go.Id/>

Mulyono, Agus Taufik .2020. Konektivitas Prasarana Jalan Untuk Kesejahteraan Bangsa. https://aptrindo.or.id/assets/uploads/115.-Konektivitas_Prasarana_jalan_untuk_kesejahteraan_Bangsa.pdf. Diakses 02 November 2022

INDEKS

B

Bantuan Sosial 136, 154
Budaya 7, 10, 11, 15, 19, 20, 48, 59, 60,
69, 71, 81, 85, 132

D

Distribusi Spasial viii, ix, 81, 83, 84,
86, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97,
98, 101, 103, 104, 106, 108, 110,
112, 113, 115, 116, 118, 119,
122, 123, 126, 127

E

Ekonomi v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 46,
49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
104, 105, 107, 108, 109, 112,
113, 114, 115, 117, 119, 120,
121, 124, 125, 126, 128, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 140, 141, 142, 143, 144,
146, 147, 148, 149, 150, 151,
153, 154, 160, 161, 164, 165, 176

Energi 102

G

Geografis v, 9, 20, 32, 33, 53, 58, 63,
64, 68, 75, 80, 85, 86, 100, 107,
109, 123, 125, 126, 131, 132, 134

I

Iklm 7, 78, 79, 80, 82, 88, 107, 109,
111, 112, 131, 132
Industri 6, 19, 20, 30, 67, 68, 72, 78,
80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 92,
97, 100, 102, 104, 105, 107, 108,
109, 111, 112, 113, 128, 132,
133, 138, 144, 151

Internet 94

Investasi 23, 44, 92, 93, 100

J

Jasa 6, 10, 26, 27, 30, 69, 72, 84, 87,
89, 105, 107, 108, 109, 111, 112,
113, 128, 135, 141, 147
Jawa Timur iv, v, viii, ix, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
60, 64, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103,
104, 106, 107, 108, 110, 112,
113, 114, 115, 116, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 131, 132, 137,
139, 140, 144, 145, 146, 147,
151, 152, 162

K

Kemiskinan v, vi, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 95, 97, 117, 119, 120, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154,
165, 174

Keterampilan 10, 17, 20, 24, 25, 59, 81,
97, 100, 102, 104, 105, 107, 137,
139, 140, 150, 153, 154

L

Lapangan Kerja 5, 9, 10, 20, 42, 59, 84,
89, 91, 100, 102, 104, 108, 109,
154

Lingkungan Alam 13, 35, 72

M

Manufaktur 6, 10, 69, 81, 102, 104

O

Organisasi Swasta 94

P

Pansela 5, 6, 7, 8, 62, 63, 64, 78, 79, 80,
81, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93,
97, 98, 99, 100, 101, 104, 105,
106, 107, 108, 112, 113, 114,
115, 118, 119, 120, 121, 126,
128, 130, 131, 132, 134, 135,
136, 137, 139, 140, 141, 145,
147, 149, 150, 152, 153, 154

Pantura 5, 6, 7, 8, 62, 63, 64, 78, 79, 81,
82, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94, 95,
97, 100, 101, 102, 104, 107, 108,
109, 114, 115, 117, 118, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 130,
131, 134, 135, 137, 138, 145,
147, 149, 150, 152, 153, 154

Pariwisata 6, 78, 85, 92, 93, 100, 102,
104, 105, 107, 126, 127, 128,
132, 148

Pasar Kerja 102, 104, 105, 121, 139,
140, 150, 153

Pembangunan 1, 2, 4, 8, 9, 11, 13, 18,
19, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 37, 59,
61, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 80, 82,
111, 121, 123, 126, 133, 134,
135, 137, 140, 144, 145, 148,
149, 150, 151, 153, 154

Pemerintah 4, 8, 15, 26, 44, 53, 54, 94,
98, 137, 139, 153, 154

Pendidikan 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20,
22, 24, 25, 31, 36, 39, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 59, 60,
61, 66, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 105,
120, 125, 126, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141,
146, 147, 148, 150, 152, 153,
164, 174

Pengangguran 1, 11, 12, 26, 27, 35,
43, 44, 47, 60, 66, 70, 71, 81, 99,
100, 101, 102, 104, 105, 106,
107, 141, 142, 150, 151

Perdagangan 5, 6, 82, 84, 85, 87, 89,
107, 108, 109, 111, 112, 124,
125, 131, 132, 147

Perguruan Tinggi 97, 99, 140, 150

Pertanian 5, 6, 10, 13, 20, 21, 28, 30,
38, 39, 40, 41, 60, 61, 64, 69, 71,
72, 73, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88,
89, 91, 92, 93, 99, 102, 104, 105,
107, 108, 109, 111, 112, 113,
114, 132, 142, 143, 144, 145,

151, 152, 154

Politik 7, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 58,
63, 71, 121, 143, 146

S

Sekolah 11, 24, 44, 48, 49, 60, 70, 94,
95, 99, 140

Sekolah Dasar 11, 44, 49, 70, 140

Spasial v, vi, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19,
20, 34, 36, 39, 40, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 65, 68, 72, 73, 75, 81, 84,
86, 88, 91, 95, 97, 98, 99, 101,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
111, 112, 113, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 122, 123, 124,
125, 126, 128, 130, 132, 133,
134, 135, 149, 150, 153, 176

Sumber Daya Alam 5, 6, 13, 18, 28, 29,
30, 31, 35, 60, 63, 64, 66, 72, 79,
85, 100, 107, 108, 109, 111, 112,
113, 114, 142, 143, 144, 145,
151, 154, 160

Sumber Saya Manusia 11, 23, 95, 114,
137

T

Teknologi 7, 10, 12, 20, 23, 24, 46, 59,
70, 144

Tenaga Kerja 23, 24, 26, 31, 73, 97, 99,
100, 102, 104, 105, 107, 112,
134, 137, 141, 144, 151

U

Upah 25, 26, 27, 59, 66, 69, 133, 138,
140, 141, 150

Urbanisasi 100, 102, 104, 109, 111,
112, 117, 144, 151

W

Wilayah Pesisir v, 78

BIOGRAFI PENULIS



KHOIRUL IFA adalah Dosen Tetap di Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Lahir di Jember, 30 Maret 1987. Meraih Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (2009), dan Magister Science Of Economic (2012) Bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR). Gelar Doktor Bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Universitas Jember (UNEJ) tahun 2024. Selain sebagai staf pengajar juga aktif dalam penelitian yang berfokus pada analisis kemiskinan, berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mengatasi isu-isu perekonomian masyarakat lokal. Saat ini dipercaya menjabat sebagai kepala lembaga penjaminan mutu dan pengawasan internal ITB Widya Gama Lumajang. Selain itu juga aktif sebagai ketua komite LSP P1 ITB Widya Gama Lumajang. Sebagai penggiat mutu juga aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan mutu di lingkungan pendidikan tinggi, baik dalam hal akademik maupun non akademik.



SEBASTIANA VIPHINDRARTIN adalah staf pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (UNEJ). Lahir di Jember, 8 November 1964. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1987), Graduate Diploma (2002) dan M.Kes (1994) peminatan Biostatistik dan Kependudukan dari Universitas Airlangga. Gelar Doktor Bidang Ilmu Ekonomi

diperoleh dari Universitas Brawijaya (UB) tahun 2010. Selain sebagai staf pengajar juga aktif sebagai peneliti pada Kelompok Riset Monetary and Public Economics Studies (MPES) FEB UNEJ. Saat ini dipercaya menjabat sebagai Koordinator Program Studi S3 Doktor Ilmu Ekonomi FEB-UNEJ. Selain itu juga aktif sebagai Pembina UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi FEB-UNEJ dan Pembina UKM Satuan Resimen Mahasiswa (MENWA) 807 Universitas Jember.



EDY SANTOSO adalah staf pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (UNEJ). Lahir di Malang, 5 November 1975. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1998), Graduate Diploma (2002) dan Master of Science (2003) Bidang Teknologi Informasi untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Gelar Doktor

Bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Universitas Brawijaya (UB) tahun 2021. Selain sebagai staf pengajar juga aktif sebagai peneliti pada kelompok riset Pembangunan Ekonomi Lokal Berkelanjutan (PELB) UNEJ. Saat ini dipercaya menjabat sebagai ketua Laboratorium

Ekonomika dan Komputasi FEB UNEJ. Selain itu juga aktif sebagai pengelola Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan. Ia juga aktif memberikan pelatihan mengenai metode-metode kuantitatif dan ekonometrika untuk analisis ekonomi wilayah dan spasial.



TEGUH HADI PRIYONO adalah staf pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (UNEJ). Lahir di Nganjuk, 6 Februari 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1993), dan Master of Science Bidang Perencanaan Wilayah dan Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) (2000). Gelar Doktor Bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Universitas Brawijaya (UB) (2012). Saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB-UNEJ. Selain aktif dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan kewilayahan (ekonometrika spasial), juga menguasai alat-alat analisis kuantitatif dan ekonometrika (AMOS, EXPERT CHOICE, GRIMS, Arc-GIS, MINITAB, SPSS, EVIEWS, STATA, dan R-PROGRAM).

